

ANALISA

1986 – 11

Satu Dasawarsa Timor Timur

Dekolonisasi Timor Timur

Dimensi Internasional Masalah Timor Timur

"Timor Gap" dalam Penetapan
Batas-batas Landas Kontinen
Indonesia-Australia

Sepuluh Tahun Pembangunan
Timor Timur



ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

*Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab*

Pande Radja SILALAH

Dewan Redaksi

Daqod JOESOEF
Rufinus LAHUR
A.M.W. PRANARKA
M. Hadi SOESASTRO
Harry TJAN SILALAH
Jusuf WANANDI
Clara JOEWONO
Kirdi DIPOYUDO
Djisman S. SIMANDJUNTAK
J. Soedjati DJIWANDONO

Redaksi Pelaksana

Pande Radja SILALAH
Medelina KUSHARWANTI
S. TJOKROWARDOJO
Ronald NANGOI

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X

Tata Usaha

Harga Rp 1.000,00 per eksemplar; langganan setahun (12 nomor, sudah termasuk ongkos kirim) Rp 12.000,00. Pesanan ke Biro Pemasaran CSIS.

Alamat

Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160,
Telepon 356532, 356533, 356534, 356535

Daftar Isi

TAHUN XV, NO. 11, NOVEMBER 1986

Pengantar Redaksi	926
Dekolonisasi Timor Timur <i>J. KRISTIADI</i>	928
Dimensi Internasional Masalah Timor Timur <i>Bantarto BANDORO</i>	961
"Timor Gap" dalam Penetapan Batas-batas Landas Kontinen Indonesia-Australia <i>Asnani USMAN</i>	980
Sepuluh Tahun Pembangunan Timor Timur <i>J. KRISTIADI</i>	997

Pengantar Redaksi

Beberapa saat setelah Timor Timur dinyatakan secara resmi berintegrasi dengan Indonesia, masalah Timor Timur tampaknya lebih banyak disorot orang di luar negeri dibanding di dalam negeri sendiri. Tidak sulit menebaknya, hal ini disebabkan ada sementara pihak yang bersuara sumbang di dalam menanggapi integrasi tersebut. Namun lambat-laun publik opini dunia dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi di Timor Timur; sehingga dihadapkan pada suara-suara yang cenderung mendiskreditkan Indonesia, mereka sudah dapat menilai secara obyektif. Sebagai bukti adalah Resolusi Portugal yang semakin kehilangan pamornya.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah RI dengan mengerahkan daya dan dana untuk mengubah wajah Timor Timur dari kemiskinan, keterbelakangan menjadi setara dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia, semakin menguatkan pendapat bahwa penyatuan Timor Timur dengan Indonesia merupakan alternatif terbaik untuk menjamin masa depan wilayah itu.

ANALISA bulan ini menyajikan tema SATU DASAWARSA TIMOR TIMUR; dimaksudkan untuk membantu melakukan kilas balik tentang perjalanan sejarah propinsi termuda tersebut, dengan mengajukan fakta yang obyektif. Dengan meninjau keadaan Timor Timur semasa menjadi koloni Portugis, dan melihat keadaannya sekarang, diharapkan dapat menjadi bekal untuk membangun harapan bagi wilayah ini di hari esok.

Tulisan pertama berjudul "Dekolonisasi Timor Timur" oleh J. KRISTIADI, tulisan ini diajukan untuk menyegarkan ingatan kita tentang gejolak yang terjadi di Timor Timur sejak awal hingga berlangsungnya integrasi dengan RI. Diuraikan secara terinci bersama data-data kronologisnya.

Salah satu masalah diplomasi internasional yang cukup meminta perhatian Pemerintah Indonesia dengan waktu yang relatif panjang, adalah masalah Timor Timur. Daerah itu oleh Portugal, bekas penjajahnya, dimasukkan ke

dalam agenda PBB untuk diperdebatkan sebagai suatu masalah dekolonisasi. Meskipun perimbangan suara di PBB dari tahun ke tahun semakin memihak Indonesia, namun selama masalah tersebut belum dicabut dari agenda sidang maka perjuangan diplomasi tetap belum selesai. Tulisan kedua membahas dimensi internasional masalah Timor Timur serta perjuangan diplomasi Indonesia di forum PBB serta fora internasional lainnya, berjudul "Dimensi Internasional Masalah Timor Timur," oleh Bantarto BANDORO. Bagian terakhir tulisan ini membahas pengaruh masalah tersebut pada hubungan Indonesia-Australia.

Hubungan Indonesia-Australia memang agak tegang sejak timbul masalah Timor Timur. Ketegangan ini menjadi salah satu ganjalan bagi tercapainya kompromi dalam perundingan tentang penetapan batas landas kontinen kedua negara mengenai "Timor Gap." Di samping hambatan politis, perundingan tentang penetapan batas maritim tersebut terhambat pula oleh masalah-masalah yang bersifat ekonomis, teknis dan yuridis. Kesemuanya itu dibahas oleh Asnani USMAN dalam tulisannya yang berjudul "Timor Gap dalam Penetapan Batas-batas Landas Kontinen Indonesia-Australia."

Selama sepuluh tahun sejak Timor Timur menjadi bagian negara kesatuan RI, berbagai upaya dan langkah penataan baik dalam segi pemerintahan maupun rehabilitasi sosial ekonomi telah dilakukan pemerintah. Dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Timor Timur tersebut, beberapa sektor yang dipandang menjadi kebutuhan mendasar mendapatkan prioritas utama. Penerbitan kali ini ditutup oleh tulisan J. KRISTIADI, berjudul "Sepuluh Tahun Pembangunan Timor Timur," mengemukakan penanganan pemerintah terhadap lima sektor yang diprioritaskan. Di dalamnya diajukan pula hambatan-hambatan yang dihadapi, penanggulangan masalah serta langkah-langkah bagi proyeksi masa depan.

Dekolonisasi Timor Timur

J. KRISTIADI*

LATAR BELAKANG POLITIK DEKOLONISASI

Kudeta 25 April 1974 di Portugal melahirkan dua program politik baru, yaitu politik demokratisasi dan politik dekolonisasi. Gagasan demokratisasi lahir sebagai reaksi terhadap sifat-sifat rezim lama yang otoriter dan fasis, sedangkan gagasan dekolonisasi lahir sebagai pantulan kenyataan "getirnya" perang kolonial di Afrika.

Gagasan dekolonisasi, baik yang tumbuh di kalangan perwira-perwira muda maupun yang tumbuh di pikiran Jenderal Spínola lahir karena latar belakang yang sama. Perang di Afrika (daerah jajahannya) menyebabkan negara itu tertinggal dan terbelakang di antara negara-negara Eropa. Dari gagasan dekolonisasi, kemudian terciptalah politik dekolonisasi. Tetapi karena sesudah kudeta muncul dua pool penentu strategi politik, maka politik dekolonisasinya pun mempunyai dua versi. Pertama, versi Spínola yang sifatnya konservatif dan kedua, versi Movimento, gerakan yang bersifat radikal dan konsekuen. Namun demikian keduanya mempunyai latar belakang dan motif yang sama, yaitu usaha untuk menyelamatkan bangsa dan negara Portugal sendiri, yang terlalu berat menanggung beban perang kolonialnya di Afrika sehingga negeri itu menjadi melarat dan terbelakang. Jadi, politik dekolonisasi Portugal itu bukan dilandasi oleh tuntutan zaman dan kesadaran bahwa kemerdekaan adalah hak bagi semua bangsa, yang mengharuskan semua penjajahan di muka bumi ini dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, melainkan karena kepentingan nasionalnya terancam.

Kudeta tersebut di atas tidak hanya membawa perubahan-perubahan radikal di dalam negeri Portugal saja, tetapi juga membuka lembaran baru

*Staf CSIS.

dalam sejarah politik di negeri-negeri jajahannya. Langkah-langkah dan janji-janji baru rezim baru pimpinan Jenderal De Spínola, walaupun belum sepenuhnya memenuhi harapan gerakan kemerdekaan di negeri-negeri jajahannya, telah memberikan nafas baru dan peluang lebih besar bagi para pejuang kemerdekaan.

Di Timor Timur, janji-janji itu antara lain berupa: pengembalian hak-hak sipil termasuk hak-hak demokrasi; pembubaran partai pemerintah Aksi Nasional Rakyat (ANP); penghapusan polisi rahasia yang menjadi hantu bagi rakyat; peniadaan sensor pers; dan rakyat bebas untuk membentuk partai-partai politik dan mengambil bagian dalam penyusunan kebijaksanaan pemerintahan. Selain itu rezim baru juga bermaksud untuk menerapkan asas-asas dekolonisasi bagi propinsi-propinsi seberang lautan dan mengadakan referendum untuk menentukan status politik dan hari depan negerinya masing-masing. Pemerintah akan secara konsekuen menerima hasilnya. Dengan landasan politik dekolonisasi itu, maka di Timor Timur kemudian berdiri tiga buah partai, yaitu Apodeti (Associação Popular Democrática Timorense), UDT (União Democrática Timorense) dan Fretilin (Frente Revolucionária de Timor Leste Independente - Front Radikal Timor Merdeka).

KEPARTAIAN DI TIMOR TIMUR

Pada masa penjajahan Portugal hanya ada satu partai pemerintah yaitu Partai Pemerintah Aksi Nasional Rakyat (ANP). Sesuai dengan politik dekolonisasi, maka Portugal memberikan kesempatan bagi rakyat Timor Timur untuk mendirikan partai politik. Namun tampaknya kesempatan itu justru merugikan rakyat Timor Timur, karena rakyat Timor Timur yang tingkat pendidikannya sangat terbatas, dan masih selalu dihadapkan kepada masalah-masalah yang lebih mendasar yaitu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, belum merasakan perlu adanya suatu partai politik. Sebagai masyarakat yang masih kuat memegang tradisi, di mana raja merupakan pemimpin dan sekaligus panutan rakyat, maka pranata sosial politik, seperti partai politik hanya dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kepentingan sempit, membentuk pengelompokan-pengelompokan yang dapat membahayakan semangat kebersamaan mereka dalam menentukan masa depannya. Dengan demikian aspirasi rakyat banyak justru tidak dapat disalurkan melalui institusi-institusi politik modern seperti itu. Dengan latar belakang yang demikian kiranya pemahaman mengenai kepartaian di Timor Timur dapat ditempatkan dalam proporsi yang lebih wajar.

Berdasarkan kronologi pembentukannya, partai politik di Timor Timur dapat disebutkan sebagai berikut:

Partai UDT

Partai UDT dibentuk pada tanggal 12 Mei 1974, merupakan partai terbesar, dan didirikan oleh sekelompok tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari 23 orang. Dalam kaitannya dengan politik dekolonisasi di dalam Partai UDT ada tiga aliran. Pertama, aliran di bawah pengaruh Ir. Mario Viegas Carascalao yang menghendaki rakyat sendiri yang menentukan nasibnya. Aspirasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa dengan formulasi seperti itu Partai UDT akan menjangkau wilayah akseptasi masyarakat yang lebih luas. Pertimbangan lain adalah adanya keyakinan dari Ir. Mario Viegas Carascalao bahwa aspirasi murni rakyat Timor Timur adalah berintegrasi dengan Republik Indonesia. Kedua, kelompok yang dipimpin oleh Moutinho menghendaki status quo, yaitu agar Timor Timur tetap di bawah naungan Portugal. Dan ketiga, kelompok yang dipimpin oleh Dominggus da Oliveira yang menghendaki Timor Timur sebagai federasi dengan Portugal. Di antara ketiga kelompok tersebut, tampaknya kelompok di bawah pimpinan Mario Viegas Carascalao adalah kelompok yang mempunyai pendukung paling kuat karena mempunyai aspirasi yang didasarkan atas kebebasan rakyat untuk menentukan nasib sendiri. Aspirasi ini mempunyai wilayah penerimaan yang luas mengingat hal itu dianggap sebagai cara untuk dapat meningkatkan martabat rakyat Timor Timur. Meskipun aspirasi ini tidak secara eksplisit menghendaki integrasi dengan Republik Indonesia tetapi mendapat dukungan pula dari anggota masyarakat yang mempunyai cita-cita integrasi dengan Republik Indonesia.

Perkembangan Partai UDT selanjutnya menunjukkan bahwa dengan pertimbangan segera perlu menyelamatkan rakyat Timor Timur dari keganasan Fretilin maka para pimpinan Partai UDT memutuskan untuk menyatakan secara eksplisit kehendaknya untuk integrasi dengan Republik Indonesia. Dengan pernyataan tersebut berarti kekuatan yang melawan Fretilin lebih besar, dan diharapkan dalam waktu yang singkat perang saudara dapat segera diakhiri. Namun hal itu mengakibatkan perpecahan dalam Partai UDT, sebagian ada yang bergabung dengan Fretilin, ada pula yang menjadi warga negara Portugis. Tetapi sebagian besar mendukung UDT menerima keputusan tersebut.

Partai Fretilin

Sebelumnya dikenal sebagai Associacao Social Democratica Timorenses (ASDT) yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1974 oleh beberapa orang, termasuk Jose Manuel Ramos Horta, yang kemudian menjabat Sekretaris Urusan Luar Negeri, sedangkan Ketuanya, Fransisco Xavier do Amaral. Perubahan nama partai tersebut terjadi setelah kedatangan lima orang mahasiswa dari Lisbon bulan Agustus 1974. Sejak itu nama Fretilin mulai dipakai. Di samping programnya lebih mantap, pola gerakannya lebih bergeser ke

Marxis. Fretilin menolak prinsip perjuangan UDT maupun Apodeti, dan tetap berpegang pada prinsipnya sendiri yakni kemerdekaan penuh bagi Timor Timur tanpa bergantung pada suatu negara manapun. Walaupun Fretilin menilai Indonesia mempunyai kedudukan penting di Asia Tenggara, dan menganggap perlu bahasa Indonesia diajarkan di sekolah-sekolah Timor Timur (karena banyak pemakainya), Ramos Horta berpendapat bahwa kebudayaan, bahasa dan adat-istiadat Indonesia sangat berbeda dengan rakyat Timor Timur yang dinilainya lebih dekat dengan Portugis. Karena itu bahasa Portugis dijadikannya bahasa resmi, sedangkan bahasa Tetum yang diakui sebagai bahasa yang banyak dimengerti dan dipakai rakyat Timor dinilainya tidak lengkap dan tidak dapat dipakai sebagai bahasa resmi.

Partai Apodeti

Sebelumnya dikenal sebagai Partai Perhimpunan Integrasi Timor-Indonesia (AITI), yang didirikan 27 Mei 1975 oleh Fernando Osorio Soares, bekas pengungsi Portugis. Di dalam partai ini tergabung pula Arnaldo dos Reis Araujo. Partai ini selalu diasumsikan sebagai wadah kelompok yang mempunyai aspirasi untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia. Sebagian dari asumsi itu benar, karena memang di dalam Partai Apodeti tergabung AITI yang sejak semula mempunyai aspirasi tersebut. Namun perlu diketahui pula bahwa masih banyak anggota masyarakat yang mempunyai aspirasi semacam itu tetapi tidak tergabung dalam Partai Apodeti. Demikian pula sebaliknya, tidak seluruh anggota Apodeti mempunyai aspirasi untuk integrasi secara murni. Setidak-tidaknya di dalam Apodeti terdapat pula beberapa unsur yang semula mempunyai aspirasi lain, yaitu menggabungkan Timor Timur dengan Timor bagian barat dan memerintah sendiri. Namun hal itu kiranya dinamika yang wajar dalam proses kristalisasi, dan akhirnya kelompok tersebut mencapai kesepakatan untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia.

Pada hakikatnya, AITI, adalah legalisasi dari gerakan-gerakan kemerdekaan di Timor Timur yang sudah lama ada. Banyak di antara tokoh-tokoh partai itu merupakan pejuang dalam pemberontakan rakyat tahun 1945-1949 di Los Palos. Oleh karena itu, seperti hanya perjuangan pada masa-masa tersebut, berdirinya Partai Apodeti berdasar pada aspirasi rakyat Timor Timur yang merasa bahwa dirinya adalah bagian dari bangsa Indonesia juga, yang terpencil karena perselisihan berabad-abad antara kolonialis Belanda dan Portugis, yang kemudian diakhiri dengan perjanjian tahun 1904 yang meresmikan pembelahan Pulau Timor menjadi dua bagian. Namun karena perselisihan terus berlangsung, pada tahun 1946 perselisihan tersebut dibawa ke pengadilan arbitrase di Den Haag. Pengadilan ini memutuskan bahwa Belanda tetap menguasai Timor bagian barat, sedangkan Portugis, selain

mendapatkan Pulau Timor bagian timur, juga mendapatkan Pulau Atauro (utara Dili) dan daerah Oekusi di pantai utara Timor bagian barat.

Sentimen historis yang tumbuh luas di kalangan rakyat menimbulkan anggapan bahwa pemisahan Timor Timur dengan Indonesia adalah suatu perkoasaan kemanusiaan yang harus dilawan.

Tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai aspirasi berintegrasi dengan Republik Indonesia telah menyusun kekuatan jauh sebelum kudeta Portugal untuk mewujudkan cita-citanya.

Sentimen historis yang tumbuh kuat di kalangan rakyat, yang menganggap dirinya bangsa Indonesia, menyebabkan hilangnya arti sebuah garis perbatasan. Hubungan dengan masyarakat Timor Indonesia berlangsung akrab, karena mereka sama-sama merasa bahwa semua suku Timor adalah bangsa Indonesia.

Prinsip perjuangan Partai Apodeti, selain tercermin dari nama lamanya, juga dari Manifesto Politiknya tanggal 27 Mei 1974 yang menyebutkan antara lain:

Mengingat bahwa untuk mengakhiri kebebasan yang diberikan itu maka Timor Timur akan memilih secara konkrit: (a) Integrasi ke dalam masyarakat Indonesia; (b) Kebebasan keadilan sosial; (c) Integrasi yang berdasarkan Hukum Internasional berstatus propinsi otonomi.

Sedangkan sampai seberapa jauh tekadnya memperjuangkan prinsip untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia, terlihat dari Anggaran Dasarnya, khususnya dalam Bab II tentang Asas dan Tujuan; Pasal 2 (Asas) berbunyi:

Partai Apodeti berasaskan:

- Ke Tuhanan Yang Maha Esa;
- Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- Kesatuan kultur, geneologis, persamaan sejarah dan persamaan nasib;
- Permusyawaratan perwakilan; dan
- Keadilan Sosial.

Sedangkan Pasal 3 (Tujuan) berbunyi:

Partai Apodeti bertujuan mewujudkan *cita-cita Kemerdekaan bagi rakyat Timor Portugis serta berintegrasi dengan Indonesia*, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Timor Portugis.

Sementara itu, sikap Apodeti terhadap tiga alternatif bagi masa depan Timor Timur adalah sebagai berikut: *Pertama*, alternatif yang diemban sebagai prinsip perjuangan Partai UDT, yaitu untuk menjadikan Timor Timur sebagai negeri berotonomi luas dalam suatu federasi Portugal atau merdeka tetapi berada dalam lingkungan kesemakmuran Portugal. Apodeti dengan tegas menolak cita-cita seperti itu karena selain tidak sesuai dengan aspirasi

rakyat Timor Timur, juga tidak akan dapat mencapai tujuan utama ke arah masyarakat adil dan makmur. Cita-cita yang dipandang masih menggantungkan diri pada Portugal itu tidak realistis karena Portugal dinilai sudah bangkrut sehingga tidak akan mampu memberikan payung pengayom bagi Timor Timur.

Kedua, alternatif yang menjadi tujuan Fretilin, yaitu merdeka penuh bagi Timor Timur tanpa bergantung pada negeri manapun. Apodeti juga menolak karena kondisi dan situasi Timor Portugis tidak memungkinkan untuk berdiri sendiri sebagai negara merdeka berdaulat dan bebas. Cita-cita ini dianggap sebagai ilusi yang kalau terlaksana akan membuat Timor Timur menjadi ajang percaturan kekuatan-kekuatan besar yang dapat lebih menyengsarakan rakyat. Selain itu, juga tidak sesuai dengan cita-cita rakyat Timor Timur yang mendambakan bersatu dengan Indonesia. Sebab secara geografis Timor Timur adalah bagian dari Pulau Timor, salah satu dari kepulauan Nusantara yang sejak dahulu sudah merupakan kesatuan geopolitik. Rakyat Timor juga merupakan satu suku bangsa dengan satu bahasa daerah yaitu bahasa Tetum. Itulah sebabnya hubungan famili masih terus berlangsung walaupun hukum kolonial memisahkannya.

Ketiga, adalah alternatif yang menjadi tujuan Apodeti yaitu pengintegrasian Timor Timur ke dalam Republik Indonesia, yang oleh Apodeti disebut sebagai "Kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi." Semula, kedua partai lainnya menolak alternatif ini, tetapi UDT kemudian dapat menerimanya. Di lain pihak Fretilin tetap menolak alternatif ketiga ini. Dengan demikian hanya ada dua alternatif bagi masa depan Timor Timur.

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH INDONESIA

Politik dekolonisasi Portugal yang membuka peluang bagi perjuangan kemerdekaan wilayah-wilayah jajahan Portugal, telah menumbuhkan pergolakan dan perang saudara yang berlarut-larut di Timor Timur. Hal yang demikian telah menarik perhatian Pemerintah Indonesia yang mempunyai kepentingan agar wilayah tersebut tidak menjadi daerah yang rawan.

Menghadapi perkembangan yang terjadi di Timor Timur, Indonesia sebagai bangsa yang berpegang teguh pada Pancasila sebagai landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasan struktural, serta GBHN sebagai pedoman penentu sikap dan arah tindakan, melalui Sidang Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional tanggal 8 Oktober 1974, Presiden Soeharto dengan resmi menyatakan "Sikap Dasar" Indonesia terhadap masalah Timor Timur sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai ambisi teritorial;

- b. Menghormati hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri;
- c. Bila rakyat Timor Timur ingin bergabung dengan Indonesia, maka tidak mungkin bergabung sebagai negara, melainkan akan menjadi sebagian wilayah dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Politik dekolonisasi sendiri adalah politik yang terpuji dan sejiwa dengan semangat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Karena itu Indonesia bisa menerima prinsip politik dekolonisasi Portugal itu. Tetapi, Indonesia akan menentang jika politik dekolonisasi itu hanya merupakan manifestasi dari bentuk kolonialisme lama menjadi kolonialisme model baru. Selain dari pada itu bagi Indonesia proses dekolonisasi itu tidak boleh mengganggu stabilitas kawasan sekitarnya. Maka hasil dekolonisasi juga tidak boleh membuat Timor Timur menjadi wilayah rawan, sebagai ajang persaingan negara-negara besar yang dapat mempersulit posisi Indonesia.

Sementara itu aspirasi dan sentimen satu nation, satu tanah air dan satu cita-cita dengan rakyat Indonesia tetap berkembang di kalangan rakyat Timor Timur, usaha menyatukan kembali Timor Timur sebenarnya merupakan suatu usaha menyatukan kembali bagian yang terpisah yang pada hakikatnya adalah satu. Untuk itu langkah pertama yang dilakukan ialah mengadakan pendekatan-pendekatan baik terhadap pemerintah jajahan maupun terhadap rakyat Timor Timur. Dalam hal ini Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur (saat itu), El Tari, yang wilayahnya berbatasan langsung dengan wilayah Timor Timur yang dikuasai Portugis itu, memegang peranan penting. Kebijaksanaan ini lebih mengenai sasarannya karena perekonomian Portugal yang menjadi penyangga utama perekonomian Timor Timur makin payah keadaannya. Sedangkan pajak dari rakyat hanya sebagai pelengkap yang kurang berarti. Dan produksi pangan tidak pernah dapat memenuhi kebutuhan Timor Timur sendiri.

Keadaan seperti itu menyadarkan pemerintahan jajahan akan perlunya bantuan ekonomi dari Indonesia dan membuka isolasi politik dan ekonomi yang semula sangat ketat. Bahkan melalui suratnya tertanggal 4 Mei 1974 yang ditujukan kepada Gubernur NTT El Tari, Gubernur pemerintahan jajahan Timor Timur, Fernando Alves Aldeia, mengajukan permintaan suplai minyak bumi maupun tepung terigu yang merupakan bahan pokok makanan penduduk. Selain itu, dalam perundingan dengan Gubernur NTT El Tari, pemerintahan jajahan Timor Timur itu, juga meminta suplai ternak secara teratur dari NTT. Dan dalam rangka kerjasama, direncanakan juga membuka pasar bersama di daerah perbatasan, di samping kerjasama di bidang

meteorologi, komunikasi radio, hubungan laut reguler, hubungan darat dengan bus, dan lain-lain. Singkatnya, kunjungan Gubernur NTT ke Dili tanggal 28 Februari - 2 Maret 1974, telah berhasil membuka isolasi yang sebelumnya tertutup rapat-rapat oleh pihak Pemerintah Portugal.

Hubungan baik ini tercermin juga setelah terjadinya kudeta 25 April 1974 di Portugal. Pada tanggal 17 Mei 1974, Gubernur Timor Timur telah mengutus Kepala Staf Angkatan Darat Portugis di Timor Timur, Mayor Arnao Matello, untuk menemui dan memberikan keterangan kepada Gubernur NTT di Kupang tentang terjadinya perubahan-perubahan politik di Portugal. Dijelaskan juga, bahwa sebagai konsekuensi perubahan ini rakyat Timor Timur akan diberikan kesempatan untuk secara demokratis menentukan nasibnya sendiri. Pihak tentara di Timor Timur akan menjamin dilangsungkannya pemilihan itu. Untuk itu dinyatakan sudah berdirinya Parpol UDT dan ASDT, walaupun program yang konkrit belum ada.

Di samping kedua partai itu, yang masing-masing menginginkan plebisit untuk menentukan nasib sendiri, dan kemerdekaan penuh bagi Timor Timur, muncul partai ketiga yaitu partai AITI (Associacao Integracao de Timor-Indonesia) yang menghendaki integrasi dengan Indonesia. Ketiganya merupakan wadah pembawa aspirasi rakyat untuk mengikuti referendum yang direncanakan berlangsung bulan Maret 1975.

Pada mulanya sepak terjang ketiga partai itu, untuk memenangkan referendum, cukup sportif dan masing-masing bergerak menurut aturan permainan yang telah ditentukan. Sedangkan pihak pemerintah menunjukkan kemampuannya sebagai stabilisator. Bahkan hubungan baik dengan Indonesia tetap dijaga. Akan tetapi, setelah Gubernur Fernando Alves Aldeia diganti oleh Gubernur baru, Letkol Lemos Pires (seorang perwira anggota Movimento) tanggal 8 November 1974, terjadi perubahan-perubahan besar dalam situasi politik di Timor Timur. Campur tangan penguasa terhadap parpol menyebabkan timbulnya ketidakpuasan di kalangan parpol yang merasa dianaktirikan. Persaingan antara parpol makin tajam, dan sportivitas mulai ditinggalkan.

Keadaan semakin tidak menentu setelah penguasa mengajukan rencana baru untuk membentuk "Dewan Konstituante" yang beranggotakan 10 orang, masing-masing satu orang dari partai, sedang tujuh lainnya praktis dimonopoli oleh penguasa. Melalui dewan itu Partai Komunis Portugal (PCP) berusaha mendominasi dan mendalangi pergolakan politik di Timor Timur, seperti yang mereka lakukan di Portugal melalui Movimento das Foreas Ar-nadas (MFA).

Rencana yang jelas menyimpang dari proses dekolonisasi sebagaimana

digariskan oleh Pemerintah Lisabon ditentang oleh ketiga partai politik dengan alasan masing-masing. Apodeti menentang dengan alasan bahwa dewan konstituante tidak akan ada gunanya, dan Apodeti menghendaki referendum. Fretilin menentang karena di dalam dewan tersebut akan ada wakil dari Apodeti. Sementara itu UDT menerima dewan tersebut berdasarkan pemikiran bahwa adanya wakil-wakil dari partai politik dalam dewan tersebut tidak akan mudah dimanipulasi oleh Pemerintah Portugis dalam hal ini MFA. Sedangkan rencana referendum, walaupun kemudian pelaksanaannya diundur sekitar bulan Juni 1975, namun hal ini tidak pernah menjadi kenyataan. Ini berarti proses dekolonisasi Timor Timur menjadi tidak menentu.

Data-data menunjukkan bahwa rusaknya proses dekolonisasi tersebut disebabkan adanya unsur-unsur PCP yang dengan sengaja menyusup ke Timor Timur dengan membonceng pergantian gubernur. Karena mereka mempunyai kepentingan strategis, yaitu dekolonisasi harus menghasilkan posisi Timor Timur yang menguntungkan strategi gerakan-gerakan golongan kiri. Karenanya mereka berusaha untuk dapat secara langsung mengarahkan proses dekolonisasi Timor Timur, walaupun prosesnya bertentangan dan menyimpang dari garis-garis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Lisabon.

Sebab, ternyata dari hasil pendekatan dan peninjauan delegasi Indonesia pimpinan Letjen Ali Moertopo pertengahan bulan Oktober 1974, jelas bahwa dalam proses dekolonisasi di Timor Timur Pemerintah Lisabon berpegang pada sikap dasar sebagai berikut:

1. Menyerahkan masa depan Timor Timur sepenuhnya pada aspirasi rakyat Timor Timur.
2. Merdeka dan berdiri sendiri bagi Timor Timur adalah suatu hal yang tidak realistis.
3. Berdiri sebagai negara bagian dalam federasi Portugal adalah mengingkari hakikat politik dekolonisasi Portugal.
4. Integrasi ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah kedudukan masa depan Timor Timur yang paling realistis.
5. Menghargai, mengakui dan memberi kesempatan kepada Indonesia untuk turut menggarap masa depan Timor Timur.
6. Menyadari sepenuhnya kepentingan dan kedudukan Indonesia dalam masalah Timor Timur.

Karena sikap Pemerintah Portugal ini tidak akan menguntungkan strategi gerakan golongan kiri maka PCP memaksa kehadirannya di Timor Timur. Itulah sebabnya terjadi situasi seperti tersebut di muka. Selain berusaha menyingkirkan peranan Indonesia, mereka juga berusaha menyatukan Fretilin dan UDT untuk menghadapi Apodeti. Tetapi UDT kemudian sadar bahwa

mereka hanya diperalat oleh para penguasa Timor Timur yang marxistis. Mereka juga merasa bahwa Fretilin yang dianakemaskan telah bergeser ke kiri dan nyata-nyata berhaluan marxistis. Karena itu koalisi UDT dengan Fretilin tidak mungkin dipertahankan lagi. Kesadaran UDT ini dijelaskan oleh ketua dan wakil ketuanya pada saat berkunjung ke Jakarta tanggal 14 April 1975, dalam rangka meminta bantuan kepada Indonesia.

PENDEKATAN KEPADA PEMERINTAH PORTUGAL

Sebagai pemerintah yang mempunyai prakarsa dekolonisasi, kedudukan Portugal sangat menentukan proses dekolonisasi wilayah jajahannya. Oleh karenanya perlu pendekatan dan penjajagan kepada Pemerintah Portugal di Lisabon. Untuk itu, melalui Sidang Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional tanggal 8 Oktober 1974, Presiden Soeharto menugaskan Letjen Ali Moertopo, untuk melaksanakan misi penting tersebut guna menerangkan kepada Pemerintah Portugal mengenai sikap Indonesia terhadap masalah Timor Timur. Selain itu, Letjen Ali Moertopo juga bertugas untuk meyakinkan Portugal bahwa mengingat posisi Indonesia maka adalah wajar kalau Pemerintah Indonesia juga mempunyai kepentingan terhadap masa depan Timor Timur. Dalam memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada Timor Timur, Pemerintah Portugal perlu bertindak sedemikian rupa, hingga langkahnya tidak akan menimbulkan gangguan terhadap stabilitas di kawasan itu, yang akhirnya akan merupakan beban bagi Pemerintah Portugal sendiri.

Oleh karena pada waktu itu hubungan diplomatik Pemerintah Indonesia dengan Portugal telah terputus, maka sebelum melakukan pendekatan langsung ke Lisabon, Jenderal Ali Moertopo menugaskan dua orang penghubung untuk berusaha merintis jalan ke Lisabon termasuk untuk mempertemukan Jenderal Ali Moertopo dengan pejabat-pejabat teras Pemerintah Portugal.

Sementara itu, dua minggu sebelum dilakukannya tugas pendekatan itu, tepatnya tanggal 30 September 1974, Presiden Spinola telah mengundurkan diri dan diganti oleh Jenderal Da Costa Gomez. Hal ini berarti terjadi perubahan-perubahan konstelasi politik di Portugal, yaitu tersisihnya golongan moderat dan makin menonjolnya peranan golongan radikal. Dengan kata lain adalah makin besarnya peranan Movimento dengan tokoh utamanya PM Vasco Gonalves dalam pemerintahan. Namun demikian, perubahan tersebut tidak mengubah acara kunjungan misi Jenderal Ali Moertopo, mengingat beberapa figur pejabat teras pemerintahan waktu itu diperkirakan masih akan tetap mempunyai posisi yang menentukan.

Ada lima tokoh penting di Portugal yang berhasil dijajagi oleh delegasi In-

donesia, yang diketuai oleh Letjen Ali Moertopo. Berturut-turut tokoh tersebut adalah Prof. Campignos, Wakil Menteri Luar Negeri; Menteri Luar Negeri Mario Soares; Presiden Da Costa Gomez; Perdana Menteri Vaseo Goncalves; dan Menteri Urusan Dekolonisasi. Pada dasarnya penjelasan Letjen Ali Moertopo kepada kelima pejabat teras Pemerintah Portugal tersebut adalah sama. Yaitu posisi Indonesia dalam politik dekolonisasi Portugal atas Timor Timur, sikap dasar Indonesia, dan akhirnya pandangan Pemerintah Indonesia terhadap masa depan Timor Timur. Letjen Ali Moertopo menjelaskan bahwa Indonesia melihat adanya tiga alternatif bagi masa depan Timor Timur sebagai hasil dekolonisasi, yakni *merdeka di bawah naungan Portugal; menggabungkan dengan Indonesia; atau merdeka penuh.*

Dari ketiga alternatif itu, menurut penilaian Indonesia, alternatif ketiga adalah kemungkinan yang "paling-kecil" karena dua faktor utama yakni, pertama rakyat Timor Timur belum mempunyai tenaga terdidik untuk membentuk suatu pemerintahan yang capable; dan kedua, "national resources" yang dipunyai tidak memadai bagi jaminan berdirinya suatu negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Dua faktor ini akan membuka peluang masuknya suatu kekuatan luar dengan maksud-maksud tertentu, baik atas permintaan Timor Timur sendiri maupun tidak. Jika itu terjadi, maka berarti terjadi suatu ketidakstabilan di Timor Timur khususnya dan Asia-Pasifik umumnya. Prospek inilah yang paling dikhawatirkan oleh Indonesia.

Sedangkan bila proses dekolonisasi, melalui referendum itu menghasilkan kenyataan keinginan rakyat Timor Timur untuk merdeka di bawah pengayoman Portugal, maka Indonesia tidak berkeberatan dan akan menghargainya. Tetapi kalau melalui referendum akan menghasilkan keinginan untuk menggabungkan diri dengan Indonesia, hal itu juga merupakan hal yang wajar. Sebab sesuai dengan kenyataan historis dan etnis, serta cocok pula dengan policy yang dianangkan oleh Portugal sendiri, bahkan merupakan suatu hal yang dapat membantu terciptanya kestabilan dan keamanan kawasan khususnya dan dunia internasional umumnya. Namun demikian penggabungan itu harus dilakukan atas kemauan rakyat Timor Timur sendiri serta tidak bertentangan dengan UUD Republik Indonesia, yaitu penggabungan sebagai suatu propinsi otonom yang berstatus khusus. Sama sekali tidak sebagai negara merdeka tersendiri hingga dapat dilakukan dengan cara merupakan negara bagian.

Dari pertemuan-pertemuan delegasi Indonesia dengan pejabat-pejabat Lisbon tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Portugal:

1. Memang benar-benar serius dalam rencana dekolonisasinya bagi Timor Timur, tetapi belum menemukan konsepsi yang mantap;

2. Bisa mengerti posisi dan sikap Indonesia, dalam proses dekolonisasi Timor Timur;
3. Melihat penggabungan Timor Timur kepada Indonesia sebagai masa depan yang paling baik bagi rakyat Timor Timur sendiri, dan bagi stabilitas kawasan sekitarnya;
4. Mengharapkan adanya kerjasama yang lebih baik antara Pemerintah Portugal dengan Pemerintah Indonesia, juga antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah di Timor Timur;
5. Bahkan sangat mengharapkan terjalinnya hubungan diplomatik secepat-cepatnya antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Portugal;
6. Sangat menghargai Pemerintah Indonesia yang merupakan pemerintah asing yang pertama mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pejabat-pejabat Pemerintah Portugal yang baru.

Selanjutnya, atas permintaan Portugal, pada bulan Maret 1975, Indonesia mengirimkan delegasinya ke London, yang diketuai oleh Letjen Ali Moertopo dengan anggota-anggota Duta Besar RI untuk Prancis dan Inggris, masing-masing Letjen A. Tahir, dan Laksamana Soebono; dan Dr. J. Halim, untuk mengadakan pertemuan membicarakan masalah Timor Timur dengan pihak Portugal yang diketuai oleh Menteri Negara Vitor Alves.

Hasil Pertemuan London tanggal 9 Maret 1975 itu, secara singkat dapat disebutkan bahwa sampai sekian jauh Portugal tetap beranggapan integrasi kepada Indonesia sebagai jalan yang paling rasional dan memadai dalam rangka proses dekolonisasi Timor Timur. Selain itu tampak pula kerepotan Pemerintah Timor Timur dalam menghadapi Partai Apodeti, hingga merasa perlu mengharapkan bantuan Indonesia untuk mendorong Apodeti agar bisa menerima konsepsi pembentukan "Consultative Body," dan agar bersedia pula duduk di dalamnya.

Satu hal yang sangat penting yang dapat disimpulkan dari "Pertemuan London" tersebut ialah adanya pengakuan *de facto*, bahwa di pihak Indonesia mempunyai kepentingan dalam proses dekolonisasi Timor Timur, sehingga dalam setiap perkembangan prosesnya, Indonesia harus selalu dipertimbangkan, diperhitungkan dan diikuti-setakan. Ini berarti dalam perkembangan proses dekolonisasi itu terdapat lima faktor penentu yang berkaitan, yakni Pemerintah Portugal dengan Pemerintah Timor Timurnya, Partai Fretilin, UDT, Apodeti, dan Indonesia.

Sebagai realisasi dari Pertemuan London itu, yaitu agar masing-masing saling mengadakan konsultasi, awal April 1975 Indonesia mengirimkan suatu

tim khusus ke Timor Timur (Dili).

Selama di Dili, tim tersebut berhasil mengadakan pertemuan dengan Gubernur Timor Timur, Kolonel Lemos Pires, maupun dengan pimpinan partai-partai Apodeti, UDT dan Fretilin. Hasil penjajagan itu dicatat adanya beberapa kenyataan yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Di bidang pemerintahan, Mayor De Mota, Chief Cabinet Urusan Politik (anggota PCP), memegang peranan penting dan sangat menentukan. Namun demikian, ia belum mempunyai konsepsi politik yang mantap, dan masih banyak terpengaruh oleh sekelilingnya. Selain itu ia juga tidak mempunyai pengaruh kuat di lingkungan Angkatan Bersenjata.
2. Partai Apodeti menunjukkan tekadnya yang sangat mantap dan makin kuat untuk berintegrasi kepada Indonesia, justru karena adanya tekanan-tekanan yang berat dari pihak penguasa dan partai-partai lainnya. Bahkan mereka menyatakan pula kesiapannya untuk berjuang dengan jalan kekerasan, jika jalan yang lebih baik tidak bisa ditempuh.
3. Fretilin adalah satu-satunya partai yang mempunyai kemampuan baik di bidang organisasi maupun taktik-taktik perjuangan, berkat pembinaan dari bekas aktivis mahasiswa beraliran kiri yang datang dari Portugal khusus untuk membinanya. Di antaranya yang saat itu masih berada di Timor Timur adalah Antonio Carvarino. Walaupun dalam pembicaraan dengan tim khusus, Fretilin selalu berusaha mengelak dan menutup-nutupi identitasnya, tetapi susunan dan sistem organisasinya serta taktik-taktik perjuangannya jelas menunjukkan bahwa Fretilin adalah komunis atau setidaknya tidaknya dibina oleh komunis. Rasa kebenciannya terhadap Indonesia sangat menyolok. Mungkin karena sikap Pemerintah Indonesia yang melarang kehidupan komunis di Indonesia.
4. Sebaliknya Partai UDT mulai menampakkan pengertian dan penghargaan terhadap sikap Indonesia yang sangat menginginkan tidak terganggunya keamanan nasional dan dapat terciptanya kestabilan kawasan. Selain itu dinyatakan penghargaan terhadap Indonesia mengenai sikapnya terhadap komunisme.
5. Masih besarnya keyakinan Fretilin dan UDT, bahwa dalam masa lima sampai delapan tahun, Portugal akan mampu membangun Timor Timur sesuai dengan konsepsi dekolonisasinya.

Sementara itu, ketika menghadiri Sidang PBB akhir 1974, Menlu Adam Malik telah sempat mengadakan pertemuan dengan Menlu Portugal Mario Soares, di New York tanggal 21 September 1974. Hasil pembicaraan itu antara lain: keduanya bersedia bekerjasama dalam masalah Timor Timur, terutama

mengenai usaha penentuan nasib sendiri. Untuk itu perlu saling berkonsultasi. Mereka juga mendesak agar hubungan diplomatik segera dipulihkan guna memudahkan kerjasama dan konsultasi.

Sebagai lanjutan dari pertemuan tersebut dan didorong oleh hasil pembicaraan Letjen Ali Moertopo dengan pejabat-pejabat teras di Lisabon, Pemerintah Portugal mengirim utusannya, Menteri Seberang Lautan, Dr. Antonio de Almeida Santos, ke Indonesia untuk mengadakan pembicaraan dengan Pemerintah Indonesia mengenai masalah dekolonisasi Timor Timur. Dalam pernyataan persnya ketika tiba di Jakarta tanggal 16 Oktober 1974, Dr. Santos mengemukakan kembali mengenai sikap Pemerintah Portugal terhadap masalah Timor Timur yang pada pokoknya sama, sebagaimana telah dikemukakan di bagian muka. Demikian juga sebaliknya, ketika ia bertemu dengan Presiden Soeharto maupun Menlu Adam Malik, pihak Indonesia tetap mengemukakan sikap Indonesia sebagaimana sebelumnya.

Menteri Almeida Santos yang melanjutkan perjalanannya ke Timor Timur, mengatakan di Dili tanggal 20 Oktober 1974 bahwa tidak akan segera diadakan referendum di Timor Timur. Rakyat Timor Timur lebih dahulu memilih wakil-wakilnya dalam Dewan Konstituante, dan dewan tersebut yang nantinya menentukan pemilihan umum. Dikatakannya juga bahwa kemerdekaan Timor Timur, pada waktu sekarang ini tidak realistis.

Selanjutnya, tanggal 27 Desember 1974, Menteri Almeida Santos mengirimkan memo kepada Sekjen PBB, Panitia 24, dan juga United Nation Emergency Operation, yang isi pokoknya:

1. Rakyat Timor Timur menghendaki tetap bergabung dengan Portugal.
2. Portugal setuju Timor Timur merdeka kalau memang dikehendaki oleh mayoritas penduduk.
3. PBB diminta memberikan bantuan sebesar US\$7,5 juta untuk mengatasi kelaparan di Timor Timur.
4. Indonesia dan Australia sangat sensitif kalau terjadi kegoncangan di Timor Timur.

Anehnya, dalam memo tersebut tidak disebutkan kemungkinan integrasi Timor Timur dengan Indonesia, yang sebelumnya telah disinggung juga dalam pembicaraan antara Indonesia dan Portugal, maupun dalam pernyataan sikap dasar masing-masing.

Dalam pada itu, atas dasar hasil-hasil misi Letjen Ali Moertopo ke Lisabon pertengahan Oktober 1974, dan hasil perundingan Menlu Adam Malik dengan Dr. Santos di Jakarta pada bulan yang sama, Indonesia mulai mempersiapkan pemulihan hubungan diplomatik dengan Portugal [hubungan ini terputus se-

jak 1964, ketika negara-negara non-aligned mengadakan aksi bersama mengisolir negara-negara kolonial (termasuk Portugal) yang tidak menunjukkan toleransi terhadap perjuangan kemerdekaan negara-negara terjajah]. Sebagai tindak lanjut, maka pada tanggal 10 Mei 1975, Pemerintah Indonesia memutuskan mengangkat seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Portugal yang berkedudukan di Lisabon. Sayangnya, hubungan ini terputus kembali tanggal 7 Desember 1975, ketika Dili jatuh ke tangan pasukan gabungan, yang dinilai oleh Portugal sebagai akibat invasi militer Indonesia.

PERGOLAKAN DI TIMOR TIMUR

Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa setelah pergantian gubernur pada bulan November 1974, terjadi perubahan situasi politik di Timor Timur. Persaingan di antara ketiga partai semakin runceing, terutama dengan adanya campur tangan penguasa yang tampaknya hanya memihak pada partai tertentu Fretilin. Gubernur Lemos Pires, yang adalah perwira Movimento yang termasuk moderat dan orientasi politiknya pada golongan sosialis, kebijaksanaanannya cenderung untuk menguntungkan UDT. Sementara sikap dan tindakan pembantu-pembantunya, yang sebagian adalah anggota Partai Komunis Portugal (PCP), cenderung untuk menguntungkan Fretilin. Sementara itu beberapa tokoh Apodeti mendapat dukungan penuh dari Mayor Arnao Matello, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Portugal di Timor Timur. Keadaan seperti ini menjadikan kedudukan Apodeti yang mempunyai aspirasi integrasi dengan RI bertambah sulit, apalagi berbagai kebijaksanaan dan tindakan penguasa lebih bersifat menekan kedudukan anggota-anggota Apodeti yang mempunyai aspirasi seperti itu.

Ketidakselarasan penguasa Timor Timur itu tercermin juga dari kebijaksanaan/konsepsi mereka mengenai dekolonisasi Timor Timur yang tidak sesuai dengan yang digariskan oleh Pemerintah Portugal di Lisabon. Keadaan yang mulai kacau ini bertambah meruneing lagi dengan berdirinya "Komisi Sersan Timor" pada tanggal 11 Januari 1975 (Sersan = tentara anak Timor). Komisi yang didominasi oleh sersan pendukung Fretilin ini merupakan hasil dari rencana baru sersan yang pro-Fretilin dan UDT, setelah sebelumnya gagal membentuk partai baru karena ditentang oleh sersan-sersan yang pro-Apodeti.

Bertolak dari berdirinya komisi tersebut, tanggal 20 Januari 1975 Fretilin dan UDT membentuk koalisi dan mengeluarkan komunike bersama yang ditandatangani Ketua Komite Sentral Fretilin, Franeiseo Xavier do Amaral, dan Ketua Sentral UDT, Franeisco Lopez da Cruz. Isi pokok komunike bersama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kemerdekaan penuh bagi rakyat Timor bagian Timur atau Timor Dili.
2. Menolak Apodeti karena mempertahankan ide-ide integrasi dengan neo-kolonialis yang bertentangan dengan kepentingan rakyat Timor Timur dan Piagam PBB.
3. Mengakui Portugal sebagai satu-satunya pelaksana yang sah dalam proses dekolonisasi, dan mengambil bahasa Portugis sebagai bahasa resmi Timor Dili atau Timor Timur.
4. Minta bantuan PBB agar menyertai Portugal dalam proses dekolonisasi menuju kemerdekaan nasional bagi Timor bagian Timur atau Timor Dili.
5. Koalisi mempunyai hak untuk memilih negara-negara mana yang akan ambil bagian dalam komisi supervisi, dan menolak partisipasi negara-negara besar, negara ASEAN dan negara-negara lain yang berada dalam pengaruh Indonesia dan Australia.
6. Pembentukan suatu pemerintah peralihan melalui perundingan di Lisbon antara Pemerintah Portugal, Fretilin dan UDT.
7. Membentuk suatu komisi "ad hoc" dengan jumlah anggota yang sama dari kedua partai koalisi yang ditugaskan mempelajari program radio, ceramah-ceramah untuk disiarkan melalui organ-organ penerangan.
8. Non-ideological-agression dan saling menghormati program serta bentuk ideologi.
9. Timor Portugis diganti namanya dengan Timor Timur dan penduduknya disebut "Timores."

Dengan terbentuknya Komisi Sersan Timor dan Koalisi Fretilin-UDT, maka untuk sementara ofensif terhadap potensi Apodeti dan unsur-unsur pro integrasi dengan Indonesia, tampak lebih efektif. Tetapi karena terbentuknya komisi dan koalisi tersebut sebenarnya dipaksakan, dan bukan sebagai hakikat perjuangan, maka kedua badan tersebut dalam waktu relatif singkat sudah mengarah ke perpecahan.

Sementara itu, melalui radio Dili, UDT dan Fretilin melancarkan isu-isu yang dialamatkan kepada Indonesia, baik yang bernada negatif, mendiskreditkan Indonesia, maupun yang bernada bermusuhan. Hal ini dilakukan ternyata sebagai persiapan rencana perebutan kekuasaan di Timor Timur, berhubungan dalam pertemuan di Lisbon akhir 1974 antara Indonesia dan Portugal yang dimantapkan lagi dalam Pertemuan London Maret 1975, hasil-hasilnya menunjukkan bahwa Portugal cenderung lebih memberi akomodasi pada aspirasi integrasi Timor Timur kepada Indonesia. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mematahkan semangat perjuangan Apodeti, dan sekaligus menjajaki

sampai sejauh mana Indonesia bisa menahan diri dan memegang teguh sikapnya.

Perpecahan Fretilin dan UDT akhirnya tak bisa dihindari. Hal ini bisa diduga sebelumnya, karena secara politis dua partai itu berbeda secara fundamental. UDT menganut pola politik yang berbau konservatif-moderat dengan orientasi politik dekolonisasi konsepsi De Spinola. Sedangkan Fretilin menganut pola politik kekiri-kirian yang ekstrem, karena digarap oleh kader-kader MRPP (Movimento Revolucionario do Proletariado Portugues) dan juga dari PCP.

UDT akhirnya sadar bahwa koalisinya dengan Fretilin adalah suatu perangkap baginya. Apalagi Fretilin tampak bergerak makin ke kiri. Dan pada tanggal 27 Mei 1975 UDT mengeluarkan komunike resmi pemisahan dirinya dari Fretilin. Alasannya antara lain, bahwa Fretilin makin lama makin dikuasai oleh kaum komunis dan cara-cara perjuangannya membahayakan kepentingan rakyat Timor Timur. Selanjutnya, dalam rangka perjuangannya menentang komunisme, UDT mengadakan pendekatan dengan Apodeti dan bahkan minta bantuan pada Indonesia berupa pendidikan kader-kader guna membendung komunis dan bantuan biaya agar mereka bisa mengadakan kontak dengan negara-negara ASEAN, Taiwan dan Australia.

Sementara suhu politik di Timor Timur semakin meningkat, terutama karena hubungan antara Apodeti (yang ingin integrasi kepada Indonesia) dengan Fretilin (yang menolak integrasi) semakin bermusuhan, suatu pertemuan antara Pemerintah Portugal dengan Partai Apodeti dan UDT dilangsungkan di Macao tanggal 26-28 Juni 1975. Sebagaimana dijelaskan dalam Pertemuan London, maksud Pertemuan Macao ini untuk membentuk "Consultative Body" di mana duduk wakil ketiga partai. Tetapi karena Fretilin tidak mau hadir, dengan alasan tidak mau duduk semeja dengan Apodeti yang dinilai sebagai "boneka" karena ingin integrasi dengan Indonesia, maka bentuk pertemuan berubah menjadi sekedar hearing antara kedua partai yang hadir dengan Pemerintah Portugal. Dalam hubungan ini, sesuai dengan yang diharapkan Pemerintah Portugal dalam Pertemuan London, Indonesia juga mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Hongkong agar dapat memonitor jalannya pertemuan dan dapat diminta pendapatnya oleh delegasi Pemerintah Portugal.

Hasil positif dari Pertemuan Macao yang dapat dianggap sebagai hal yang membuat proses dekolonisasi Timor Timur menjadi lebih jelas, ialah telah ditentukannya jadwal referendum pada bulan Oktober 1976; sebagai penentuan status Portugal untuk meninggalkan Timor Timur yaitu Oktober 1978. Selain itu, untuk melaksanakan referendum ditetapkan akan dibentuk suatu "Governing Body," semacam badan pengelola wilayah Timor Timur.

Hasil yang dicapai dalam pertemuan itu, walaupun ada perubahan bentuk pertemuan, dinilai oleh para peserta sebagai hal yang cukup memuaskan ketiga belah pihak. Baik Apodeti maupun UDT menganggap bahwa aspirasi-aspirasi partainya dapat dengan berhasil dimasukkan dan ditampung dalam draft proyek dekolonisasi wilayah Timor Timur yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Portugal.

Berdasarkan hasil Pertemuan Macao itu, suatu naskah undang-undang yang telah memperoleh pengukuhan dari Dewan Revolusioner Militer Portugal, dan diumumkan pada tanggal 12 Juli 1975, menyatakan antara lain bahwa Timor Timur akan tetap menjadi daerah Portugal sampai bulan Oktober 1978. Menetapkan pembentukan sebuah "Majelis Rakyat" yang dipilih dalam pemilihan umum tahun 1976. Tugasnya adalah menentukan suatu politik dan administrasi daerah tersebut. Seorang Komisaris Tinggi Portugal akan mengatur dan memimpin pemerintahan yang akan dibentuk dengan lima orang anggota sebagai sekretaris eksekutif yang ditunjuk oleh Portugal. Tiga portofolio akan diberikan kepada tiga parpol di Timor Timur, yaitu Apodeti, UDT dan Fretilin. Posisi-posisi penting, Kehakiman dan Dalam Negeri, serta Keuangan dan Ekonomi akan dipegang oleh Portugal. Sedangkan posisi-posisi tidak penting seperti Kebudayaan dan Pendidikan, Perburuhan dan Sosial, serta Urusan Lingkungan dan Infrastruktur, diserahkan kepada ketiga partai.

Sementara itu, perpecahan koalisi UDT-Fretilin yang semakin meluas tidak berarti tekanan yang mereka lakukan terhadap Apodeti menjadi berkurang. Sebaliknya malahan semakin diperberat dan meningkat dengan cara menahan beberapa anggota Apodeti. Bahkan Raja Atsabe, seorang tokoh Apodeti yang sangat besar pengaruhnya di daerah Atsabe dan sekitarnya di mana semua rakyatnya menjadi anggota Apodeti, hampir ditangkap oleh Fretilin. Tetapi dapat diselamatkan oleh kelompok UDT yang dikirim dari Maliana oleh Joao Tavares, Wakil UDT Maliana.

Tanggal 11 Agustus 1975, UDT melancarkan suatu gerakan semacam perebutan kekuasaan yang dinamakannya sebagai "Movimento Revolusioner 11 Agustus." Semua pos-pos penting dalam kota Dili berhasil diduduki dan dikuasai. Ofensif ini dilakukan oleh UDT secara serentak dengan bantuan dari beberapa tokoh pemerintah yang pro-UDT. Sejalan dengan itu, Partai UDT menuntut kepada Pemerintah Timor Timur antara lain, agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk mengeluarkan semua orang komunis dan lain-lainnya yang mempunyai sikap semacam itu dari Timor Timur; mempertahankan Lemos Pires sebagai Gubernur Timor Timur; melaksanakan dekolonisasi secara murni sesuai dengan Lei Constitucional No. 7/1979 yang rancangannya disetujui di Macao oleh UDT dan Apodeti.

Dan pada tanggal 13 Agustus 1975, UDT mengeluarkan komunike untuk menjelaskan maksud gerakannya kepada khalayak umum, yang menyatakan antara lain: bahwa gerakan 11 Agustus 1975 adalah suatu cetusan hati nurani rakyat Timor Timur yang sekian lama merindukan kemerdekaan dan pemerintahan sendiri oleh rakyat. Untuk itu semua rakyat Timor Timur agar maklum bahwa UDT-lah yang ingin memegang tampuk pimpinan pemerintahan; dan menyerukan perlunya persatuan untuk melawan kaum reaksioner. Sedangkan kepada Angkatan Bersenjata, UDT menyerukan agar bersatu dengan UDT.

Sampai seminggu pertama, UDT rupanya masih cukup kuat menduduki posisi-posisi penting dan menguasai beberapa daerah secara mutlak. Baik Fretilin, Apodeti, pihak pemerintah maupun militer sama sekali tidak berkutik. Fretilin, di samping mulai mengadakan perlawanan, masih berusaha mengkonsolidasikan kekuatannya. Beberapa orang dari oknum Apodeti bersama-sama dengan Fretilin melawan UDT di Dili dengan senjata.

Menghadapi situasi di Timor Timur yang semakin menggawat itu, pada tanggal 23 Agustus 1975 (yang kemudian diulangi lagi tanggal 25 Agustus) Portugal meminta Indonesia agar membantu pengungsian warga Portugal dan warga asing lainnya dengan mengirimkan kapal ke Timor Timur. Berdasarkan permintaan tersebut, Indonesia mengirimkan delegasi di bawah pimpinan Kolonel Soebiyakto dengan kapal KRI Mongonsidi merapat di Dili tanggal 27 Agustus 1975. Kolonel Soebiyakto mengadakan perundingan dengan tokoh-tokoh ketiga partai yang sedang bersengketa, dan suatu hasil luar biasa dicapai yakni ketiga partai itu menyetujui untuk mengadakan gencatan senjata selama empat hari guna memungkinkan pelaksanaan pengungsian. Setelah itu KRI Mongonsidi keluar dari perairan Dili dan mengambil posisi empat mil dari pantai.

Hasil perundingan tersebut sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Gubernur Lemos Pires untuk mengambil inisiatif gencatan senjata dan langsung menguasai seluruh keadaan. Namun hal itu tidak dilakukannya, bahkan mempersiapkan pengungsiannya ke Pulau Atauro. Dan suatu tindakan yang sangat keliru justru dilakukannya, yakni mengusir KRI Mongonsidi untuk meninggalkan Dili meskipun tindakan tersebut disayangkan oleh Pemerintah Australia yang menganggap bahwa yang dapat membuat perdamaian di Timor Timur adalah *Pemerintah Indonesia*.

Penguasaan UDT terhadap situasi Timor Timur ternyata tidak dapat berlangsung lama. Hanya seminggu sesudah Gerakan 11 Agustus 1975 itu keadaan mulai berbalik. Fretilin sudah mulai bergerak dan berusaha merebut kedudukan strategis di beberapa daerah. Hal itu karena pimpinan Fretilin bernama Rogenio Lobato diangkat oleh Lemos Pires sebagai Pang-

lima Angkatan Bersenjata di Timor Timur yang mempunyai senjata 27.000 pucuk. Dengan demikian Angkatan Bersenjata Portugal mendukung Fretilin. Selain itu Fretilin rupanya memanfaatkan kelemahan UDT yang hanya mengandalkan kekuatannya dengan "memegang" posisi para pejabat yang mempunyai kedudukan penting. Sedangkan penguasaan kekuatan militer sebagai salah satu faktor penting dan menentukan, kurang mendapat perhatiannya, walaupun sebagian militer berada di pihak UDT.

Boleh dikatakan bahwa gerakan ofensif UDT itu sebenarnya kurang didukung oleh suatu perencanaan yang matang, sehingga setelah berhasil, mereka tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Karena itu tidak mengherankan jika Fretilin dengan cepat bisa berofensif di semua daerah, bahkan berhasil merebutnya. Pengungsian Gubernur Lemos Pires dan dipindahkannya pemerintahan ke Atauro tanggal 27 Agustus 1975 merupakan pertanda akan habisnya harapan UDT untuk lebih unggul dari Fretilin, dan menandai pula mulai lenyapnya kekuasaan *de facto* Pemerintah Portugal di Timor Timur. Hal itu berarti pula Portugal cuci tangan dan melepaskan tanggung jawabnya sebagai penguasa Timor Timur. Dengan demikian Portugal tidak mempunyai kewenangan moral untuk mempertahankan Timor Timur lagi.

Sejak tanggal 26 Agustus 1975, secara berangsur-angsur Fretilin menguasai sebagian kota Dili, termasuk pelabuhan udara. Di Dili dan sekitarnya pasukan Apodeti tampak bekerjasama dengan Fretilin untuk melawan UDT yang merupakan counter coup yang telah dimulai sejak tanggal 20 Agustus 1975. Kemudian pendukung-pendukung Apodeti ditangkap oleh Fretilin. Menjelang bulan September 1975, kepercayaan rakyat dan parpol-parpol terhadap kekuasaan Portugis atas Timor Timur dapat dikatakan telah hilang sama sekali. Sementara itu tokoh-tokoh Apodeti dan Movimento 11 Agustus berusaha mendekati pos Indonesia untuk meminta bantuan senjata dari Indonesia guna menghadapi Fretilin yang gerakannya sudah makin meluas.

Ofensif Fretilin yang dimulai sejak akhir bulan Agustus itu, dalam waktu sebulan saja ternyata sudah bisa menguasai hampir seluruh wilayah Timor Timur, walaupun beberapa daerah basis UDT masih juga sanggup bertahan. Pada akhir September 1975 praktis seluruh wilayah Timor Timur sudah berada di bawah kekuasaan Fretilin. Namun di balik keberhasilannya itu, tanpa mengindahkan tata-krama hubungan internasional, Fretilin yang sudah merasa kuat itu sering melakukan pelanggaran wilayah dengan melakukan penembakan-penembakan ke wilayah Republik Indonesia, perampokan ternak dan bahan pangan di daerah RI. Bahkan pasukan patroli perbatasan RI beberapa kali mengalami kontak senjata dengan pasukan Fretilin di daerah Indonesia. Sementara rakyat diteror dan mengungsi ke wilayah RI. ICRC menaksir jumlah pengungsi tersebut sekitar 45.000 orang.

Dalam pada itu, sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan dan pembentukan negara yang akan mereka namakan "Negara Demokrasi Timor Timur," pada tanggal 7 Oktober 1975 dilangsungkan rapat gabungan antara Komite Sentral Fretilin dengan Falintil (Angkatan Perang Fretilin). Hasil rapat ini adalah tersusunnya struktur organisasi ketatanegaraan termasuk susunan aparat pemerintahan eksekutif. Namun agar tidak menyolok dan mengundang reaksi dari luar yang dapat melemahkan perjuangan diplomatik-nya, Fretilin menyatakan bahwa bentuk organisasi itu sebagai susunan organisasi Partai Fretilin.

Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 1975, pimpinan Fretilin, Xavier Do Amaral, meresmikan Administrator Pemerintahan Sementara Timor Timur dan Komisi Urusan Ekonomi. Sedangkan mengenai penguasaan wilayah, pada akhir September 1975, juga telah diumumkan struktur pembagian wilayah pertahanan bagi seluruh Timor Timur termasuk personalia dan pembagian tugasnya.

Sementara itu, Apodeti yang secara militer mempunyai kedudukan paling lemah, dan tidak pernah mendambakan kemenangannya melalui kekuatan senjata, sebenarnya mempunyai kedudukan paling tangguh untuk menghadapi pertarungan "rebut pengaruh" yang sangat penting guna memenangkan referendum. Sebab, sumber kekuatan Apodeti adalah motivasi perjuangannya yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan ethnologis, geografis dan sentimen historis justru mudah dimengerti dan dihayati oleh rakyat. Dan karena yakin akan menang dalam referendum, Apodeti mengarahkan gerakannya pada pemupukan pengertian dengan rakyat. Sedangkan penyusunan kekuatan fisik bersenjata sama sekali diabaikan. Sebaliknya UDT dan Fretilin, karena menyadari beratnya perjuangan untuk memenangkan referendum, lebih mengarahkan gerakan-gerakannya pada penyusunan kekuatan fisik.

Bagi Apodeti, terjadinya gerakan-gerakan militer mengejutkan dan juga merupakan pukulan berat baginya. Mau tidak mau ia harus ikut bermain di dalamnya. Dan hanya karena kelihaiannya memanfaatkan situasi, Apodeti bisa berperan dalam pergolakan di Timor Timur. Di Dili, misalnya, Apodeti bersikap netral, sedangkan di sekitar Dili, mereka bekerjasama dengan Fretilin mengepung UDT yang menguasai Dili. Sebaliknya di beberapa daerah, Apodeti justru bekerjasama dengan UDT menghadapi Fretilin. Dengan cara ini, Apodeti bisa mengumpulkan senjata, dan malahan bisa memecah-belah lawan-lawannya, serta berhasil menarik kelompok moderat dari kedua partai itu untuk berpihak pada Apodeti. Namun semua itu bukannya tanpa pengorbanan. Apalagi pemanfaatan situasi itu tidak disertai dengan tindak lanjut. Sehingga ketika Fretilin berhasil menguasai Dili, hampir semua pimpinannya disekap Fretilin, kecuali Raja Atsabe, Maria Guilherme Gon-

calves dan putranya beserta anak buahnya yang berhasil melarikan diri ke perbatasan.

Sementara itu, pada tanggal 1 September 1975, beberapa di antara pimpinan daerah UDT menyiapkan rencana naskah proklamasi untuk bergabung dengan Indonesia.

Karena desakan pimpinan daerah UDT itu, pada tanggal 1 September 1975 itu juga, Ketua UDT, Lopez da Cruz, menemui pejabat-pejabat Indonesia di pos perbatasan RI, di Motaain. Selain menerangkan tentang situasi umum di Timor Timur terutama gerakan Fretilin, Ketua UDT itu mengemukakan pula bahwa UDT telah menemukan dokumen Fretilin di Bukole yang mengungkapkan adanya kerjasama antara Fretilin dengan eks-PKI. Bahkan untuk mengoperasikan senjata berat, Fretilin dibantu oleh beberapa orang unsur luar. Lopez juga menerangkan keinginan sebagian pimpinan daerah UDT untuk segera memproklamasikan penggabungan dengan Indonesia. Namun hal itu perlu dikonsultasikan dahulu dengan daerah-daerah lain. Untuk itu ia minta bantuan pesawat kecil dan pilot dari Indonesia agar dapat menghubungi daerah-daerah tersebut. Selain itu ia juga minta bantuan obat-obatan, dokter, pangan dan senjata-senjata berat, mortir dan mitraliur dari Indonesia.

Tanggal 2 September 1975, Ketua UDT, Lopez da Cruz, untuk kedua kalinya datang ke Motaain menemui pejabat Indonesia dengan maksud yang hampir serupa, terutama mengenai keinginan rakyat agar segera memproklamasikan penggabungan dengan Indonesia. Selanjutnya, untuk lebih mengukuhkan usaha-usaha penggabungan itu, pada akhir September 1975, Lopez da Cruz mengeluarkan statement politik yang ditujukan kepada Kedutaan Besar RI di Canberra, Tokyo, Bangkok, Konsul Jenderal RI di Hongkong, Perwakilan KADIN RI di Taiwan, Menteri Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri Malaysia, dan Direktorat Urusan Eropa Departemen Luar Negeri Taiwan. Isi pokoknya adalah masalah penggabungan yang dilakukannya dengan Indonesia. Dinyatakan bahwa ketertiban dan keamanan Timor Timur telah dirusak oleh kegiatan peperangan yang dilakukan oleh Fretilin. Kekejaman dan pembunuhan massal terhadap penduduk banyak dilakukan oleh Fretilin hingga sangat menyengsarakan rakyat. UDT telah mengajukan pernyataan untuk berintegrasi dengan Indonesia. Hal ini berarti bahwa mulai saat itu UDT bukan hanya bersahabat atau bersaudara dengan rakyat Indonesia, tetapi malahan sebagai satu keluarga atau satu masyarakat yang sama-sama berada di bawah naungan satu bendera Sang Merah Putih. Untuk itu, UDT merasa perlu dan ingin meneruskan serta memupuk hubungan tersebut agar lebih mendalam lagi.

Sementara itu Ketua UDT Lopez da Cruz dalam wawancara dengan TV

Jerman menyatakan bahwa tujuannya saat itu adalah menggabung dengan Indonesia. Dan karena UDT adalah Partai Demokrasi maka ia harus mengikuti suara dan keinginan rakyat terbanyak.

Tanggal 24 September 1975, sekembalinya misi khusus Dr. Santos yang mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Indonesia di Jakarta tanggal 29 Agustus - 1 September dan 11-12 September 1975, Pemerintah Portugal mencoba mengajukan kebijaksanaan baru untuk menyelesaikan masalah Timor Timur dengan mengundang tokoh-tokoh tiga partai yang bertentangan di Timor Timur untuk menghadiri pertemuan. Namun hal itu kurang mendapat tanggapan dari partai-partai UDT dan Apodeti karena menganggap saatnya kurang tepat, apalagi di lapangan mereka sedang "di bawah angin." Sehingga kalau diadakan perundingan mereka akan mudah dipaksakan menelan konsep pihak yang berada "di atas angin." Selain itu kurangnya tanggapan dari mereka terutama karena Portugal kenyataannya sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menegakkan wibawanya di Timor Timur.

Sementara pergolakan terus berlangsung, timbul masalah lain yang cukup besar dan rumit penanganannya, yaitu masalah pengungsi. Sejak terjadinya gerakan 11 Agustus 1975 oleh UDT, arus pengungsian keluar Timor Timur semakin bertambah jumlahnya. Sebagian besar pengungsi itu memasuki wilayah Indonesia untuk mencari perlindungan bagi keselamatannya dari kekejaman perang saudara yang tidak terkendali, terutama dari ancaman kekejaman Fretilin yang bertindak semakin brutal. Peningkatan jumlah pengungsi ini sampai mencapai 45.000 orang. Untuk membantu para pengungsi itu, Indonesia harus menyediakan dana sebesar Rp 6 juta sehari.

Dalam pada itu, perkembangan pergolakan itu makin menunjukkan bahwa kekuatan bersenjata lebih bisa berbicara dalam perjuangan daripada kejujuran melaksanakan tata-krama perjuangan. Hal ini telah menggugah Apodeti untuk turut berbicara dengan kekuatan senjata di medan pertempuran. Konsolidasi anggota harus dipercepat dan usaha mendapatkan senjata harus diperhebat, guna meng-counter merajalelanya kekuasaan Fretilin. Untuk itu, beberapa tokoh Apodeti mengajak UDT guna melanjutkan perjuangan dengan berpihak pada Apodeti yang mengemban aspirasi rakyat Timor Timur untuk bergabung dengan Indonesia.

Pendekatan tersebut rupanya berhasil, hingga sejak awal September 1975 banyak pimpinan regional UDT yang berusaha memasuki wilayah Indonesia untuk menyatakan harapannya agar bisa bergabung dengan Indonesia. Bahkan panglima pasukan UDT, Joao Carrascalao (yang kemudian mengungsi ke Portugal), menyerukan agar Indonesia segera melancarkan ofensif militernya untuk menyelesaikan masalah Timor Timur. Namun, seperti sudah

diuraikan di muka, permintaan ini tidak bisa diterima karena Indonesia harus berpegang pada sikap dasar. Karena itu untuk mencapai tujuannya, mereka harus meneruskan perjuangannya dan harus bersatu dengan Apodeti dan unsur-unsur lainnya seperti Partai Kota dan Trabalista.

Mengenai Partai Kota, nama sebelumnya adalah Partai APMT (As-sociacao Popular Monarquica Timorensa) yang telah dibentuk tanggal 8 November 1974 tetapi belum mendapat pengakuan Pemerintah Timor Timur karena tidak dapat membuktikan jumlah pengikutnya. Selama itu APMT tidak dapat berkembang, tetapi setelah beralih menjadi Partai Kota (Klibur Oan Timor Aswain -- yang artinya Perhimpunan Masyarakat Pahlawan Timor) dan masuknya tokoh baru sebagai penggeraknya yaitu Jose Martins (yang kemudian berubah pikiran beralih ke Fretilin karena tidak puas dengan kedudukannya dalam PSTT), partai tersebut tampak lebih produktif dan berhasil menempatkan diri sebagai salah satu unsur yang cukup penting dalam konstelasi kekuatan anti-Fretilin.

Titik-tolak pendirian Partai Kota yaitu mencari dukungan kekuatan pada unsur-unsur pribumi dan berusaha memelihara identitas suku Timor. Menurut pimpinan Partai Kota, Jose Martins, Kota merupakan kawan perjuangan Apodeti untuk meng-counter Fretilin. Sedangkan Trabalista, sebelumnya hanya merupakan suatu gerakan buruh, yang berkembang menjadi sebuah partai.

Bertolak dari satu tekad itulah kemudian terbentuk suatu "pasukan gabungan" yang terdiri dari unsur-unsur partai UDT, Apodeti, Kota dan Trabalista. Ofensif mereka inilah yang kemudian memporakporandakan pasukan Fretilin. Untuk memperkuat pasukan gabungan ini, pemuda pengungsi yang berada di wilayah Indonesia mulai dimobilisasi. Mereka ditangani langsung oleh para panglima masing-masing partai.

Guna mendapatkan suatu wilayah basis ofensifnya, pada tanggal 6 Oktober 1975 pasukan gabungan itu merebut Batugede, yang digunakan sebagai tempat pemusatan pasukan Fretilin. Bersamaan dengan jatuhnya Batugede, di beberapa daerah lain, pasukan gabungan, yang sebelumnya sudah diselundupkan, mulai melakukan ofensif yang mengejutkan Fretilin. Tanggal 16 Oktober 1975, pasukan gabungan berhasil menguasai Balibo. Selanjutnya, satu per satu daerah yang diduduki Fretilin, mereka kuasai lagi, termasuk bekas basis Apodeti dan UDT.

Di lain pihak, Fretilin mulai kehilangan garis perjuangannya, terutama ketika Dili berada dalam kepungan lawan. Meskipun demikian, di Dili pada tanggal 28 November 1975, Komite Sentral Fretilin masih bisa memaksakan

diri untuk memproklamasikan berdirinya negara yang mereka namakan "Republik Demokrasi Timor Timur," dan mengangkat serta menetapkan Xavier do Amaral sebagai Presiden.

Reaksi Pemerintah Indonesia atas proklamasi sepihak Fretilin itu tercermin dari pernyataan yang dibacakan oleh Menteri Penerangan Mashuri, SH, tanggal 29 November 1975 yang menyatakan antara lain:

1. Menyesalkan tindakan sepihak Fretilin yang bertentangan dengan usaha yang terus-menerus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ke arah tercapainya penentuan nasib sendiri oleh rakyat Timor Portugis melalui perundingan sebagaimana telah disepakati oleh ketiga partai Timor Portugis, Pemerintah Portugal, dan juga Pemerintah Indonesia.
2. Menyesalkan pernyataan sikap Pemerintah Portugal seperti disampaikan oleh Menteri Kerjasama Portugal, Victor Crespo, kepada Dubes RI di Lisbon, pada tanggal 28 November 1975, yang maksudnya membenarkan tindakan Fretilin itu.
3. Indonesia tetap yakin bahwa masa depan Timor Portugis mesti ditetapkan oleh seluruh rakyat Timor Portugis sendiri. Dan Indonesia tetap tidak bisa mentolerir situasi di Timor Portugis yang dapat membahayakan stabilitas di kawasan ini.

Dalam hubungan itu, sikap Pemerintah Australia terhadap pernyataan sepihak Fretilin itu, tercermin dari pernyataan Menlu Andrew Peacock pada tanggal 29 November 1975, yakni antara lain bahwa Pemerintah Australia tidak mengakui pernyataan kemerdekaan sepihak Fretilin dan tetap mendukung penyelesaian secara damai. Australia bersedia dijadikan tempat untuk perundingan seperti itu.

Dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya, Australia memang mempunyai perhatian yang besar terhadap masalah Timor. Sejak munculnya masalah Timor Timur Australia telah mengambil sikap yang berpegang pada prinsip penentuan nasib sendiri rakyat Timor Timur, dan menyambut baik setiap keputusan yang diambil oleh rakyat Timor Timur. Meskipun demikian, ia juga melihat kepentingan stabilitas regional yang menjadi salah satu prinsip pula bagi Indonesia. Oleh karena itu, segala tindak tanduk Indonesia dalam menghadapi masalah Timor Timur selalu mendapat perhatian dan sorotan Pemerintah Australia.

Akan tetapi, sebagai negara yang menganut demokrasi liberal, sulit bagi Pemerintah Australia untuk membatasi adanya gerakan-gerakan semacam CIET (Campaign for Independent of East Timor -- yang didirikan pada awal November 1974 oleh tokoh-tokoh yang tergabung dalam organisasi AICD

-- Australian Congress for International Cooperation and Disarmament -- yang sejak berdirinya Pemerintah Orde Baru telah sering melakukan usaha-usaha perongrongan terhadap Pemerintah Indonesia) yang mendukung Fretilin, meskipun pada hakikatnya gerakan tersebut bisa mengakibatkan renggangnya hubungan Australia dengan Indonesia. Kondisi demikian ini dimanfaatkan benar-benar oleh CIET dan Fretilin, sehingga dalam perkembangannya, Australia merupakan "basis" gerakan Fretilin untuk memusuhi gerakan-gerakan lainnya di Timor Timur yang ingin berintegrasi dengan Indonesia.

Sementara itu, tanggal 2 Desember 1975, Fretilin mengumumkan susunan "kabinetnya" yang sebenarnya hanya merupakan proforma saja. Karena pada saat itu apa yang dinamakan negara Republik Demokrasi Timor Timur sudah hampir tidak mempunyai wilayah kekuasaan lagi. Bahkan rakyat pendukung yang harus diurusnya pun praktis sudah tidak ada lagi.

Di lain pihak, gerakan gabungan Apodeti, UDT, Kota dan Trabalista, menjawab tantangan proklamasi sepihak Fretilin itu dengan suatu proklamasi tandingan, yang antara lain menyatakan bahwa: Pada hari ini tanggal 30 November 1975, di kota Balibo, partai-partai Apodeti, UDT, Kota dan Trabalista di Timor Portugis memproklamasikan wilayah Timor Portugis itu sebagai bagian dari Indonesia dan tidak mengakui proklamasi sepihak kemerdekaan wilayah itu oleh Fretilin (Proklamasi ini sebenarnya sudah diumumkan tanggal 29 November 1975, namun baru ditandatangani tanggal 30 November 1975).

Tanggal 3 Desember 1975, Menlu Adam Malik menyerahkan pernyataan keempat partai tersebut kepada Presiden Soeharto. Selanjutnya, tanggal 4 Desember 1975, Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan sikapnya mengenai perkembangan terakhir di Timor Timur itu yang menyatakan antara lain:

- Tetap mendukung politik dekolonisasi Portugal yang harus berlangsung secara wajar, tertib dan damai;
- Sangat menyesalkan tindakan sepihak Fretilin yang menyatakan kemerdekaan Timor Timur tanpa menghiraukan partai-partai lainnya yang juga mewakili rakyat;
- Menghargai hak bersimpati dan memahami sedalam-dalamnya pernyataan partai-partai UDT, Apodeti, Kota dan Trabalista, yang atas nama rakyat Timor Portugis menyatakan menyatukan diri ke dalam negara Republik Indonesia;
- Semua pihak yang bersangkutan di Timor Portugis agar mengusahakan secara sungguh-sungguh tercapainya pelaksanaan dekolonisasi secara wajar, tertib dan damai;

- Akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin keamanan wilayah nasional, menjaga kedaulatan negara dan melindungi penduduk terhadap gangguan dari luar, serta berdasar atas asas antikolonialisme dan asas perikemanusiaan, pemerintah bersama rakyat Indonesia mempunyai kewajiban moral untuk melindungi rakyat di wilayah Timor agar proses dekolonisasi terwujud sesuai dengan cita-cita dan keinginan seluruh rakyat Timor Portugis;
- Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia umumnya dan rakyat yang berbatasan dengan wilayah Timor Portugis khususnya untuk meningkatkan kewaspadaan.

Perlu diketahui, bahwa sebelum perkembangan masalah Timor Timur itu mencapai keadaan seperti tersebut di atas, perundingan bagi penyelesaiannya masih terus dilakukan. Antara lain adalah Pertemuan Roma yang berlangsung pada tanggal 1-2 November 1975, antara delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menlu Adam Malik, dan delegasi Portugal yang dipimpin oleh Menlu Mayor Melo Antunes. Pertemuan ini diadakan atas permintaan Portugal, yang tampaknya menyadari ketidakmampuannya untuk sendiri saja menyelesaikan masalah Timor Timur. Pertemuan tersebut mencapai kata sepakat antara lain mengenai masalah-masalah:

- Tetap diakuinya kekuasaan Portugis atas wilayah tersebut;
- Perlunya segera diciptakan gencatan senjata antara pihak-pihak yang bersengketa;
- Segera dikembalikannya sejumlah 56.000 orang pengungsi Timor Timur yang ada di wilayah Indonesia;
- Masalah 23 orang Portugis tawanan UDT, yang oleh Portugal dimintakan jasa-jasa baik Indonesia untuk mengusahakan pengembaliannya.

Namun demikian, Pertemuan Roma ini sebenarnya hanya merupakan pen-jajagan dan penegasan sikap serta posisi masing-masing, yang ternyata bisa saling memakluminya. Di antaranya, seperti yang tercantum dalam Memorandum of Understanding yang ditandatangani tanggal 3 November 1975, yaitu:

- Pemerintah Indonesia menyetujui dan akan membantu terlaksananya rencana baru Pemerintah Portugal untuk mendekatkan pihak-pihak yang bersengketa guna mencari penyelesaian secara damai;
- Pemerintah Portugal tidak bersedia mengundang Indonesia untuk berpartisipasi secara militer dalam usaha pemulihan keamanan dan ketertiban, dengan alasan yang dikatakannya prinsipil;
- Pemerintah Portugal berpendirian bahwa Indonesia adalah pihak yang pa-

ling berkepentingan dalam masalah Timor Timur dan akan terus-menerus berkonsultasi dan bekerjasama dalam setiap usaha dan setiap tahap dalam proses dekolonisasi daerah tersebut;

- Pemerintah Portugal tidak ada niat untuk menginternasionalisasi masalah Timor Timur.

PEMERINTAH SEMENTARA TIMOR TIMUR (PSTT)

Semangat yang tinggi merupakan modal utama dari pasukan gabungan Partai Apodeti, UDT, Kota dan Trabalista, sejak mereka memulai ofensifnya yang tidak tertahankan oleh Fretilin. Kota demi kota, daerah demi daerah berhasil mereka kuasai, sehingga akhirnya pada tanggal 7 Desember 1975, pasukan gabungan yang dibantu oleh sukarelawan-sukarelawan Indonesia itu berhasil menduduki dan menguasai Dili. Jalan menuju Dili ini menjadi terbuka lebar karena terjadinya perpecahan dalam tubuh Fretilin sendiri sebagai akibat dari kekurangsetujuan golongan sipil terhadap Proklamasi 28 November 1975 oleh golongan militer. Hal ini menyebabkan banyak pasukan Fretilin yang meninggalkan kesatuannya dan bergabung dengan pasukan gabungan.

Jatuhnya Dili, menyebabkan Portugal memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Indonesia dianggapnya melakukan invasi ke Timor Timur.

Sehari setelah jatuhnya Dili, Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan sikapnya terhadap perkembangan baru tersebut, antara lain:

- a. Pemerintah Republik Indonesia tetap mendukung dekolonisasi Timor Portugis melalui proses yang wajar, tertib dan damai.
- b. Perkembangan di Timor Timur yang berlarut-larut telah mengganggu stabilitas di Indonesia khususnya dan Asia Tenggara umumnya.
- c. Oleh karenanya penyelesaian masalah Timor Portugis bukanlah sekali-kali masalah ambisi teritorial RI.
- d. Memahami sedalam-dalamnya kehendak rakyat Timor Portugis yang sudah 400 tahun dijajah kolonial Portugis untuk merdeka.
- e. Sangat menyesalkan sikap Pemerintah Portugal untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia.
- f. Perkembangan keadaan di Timor Portugis, mengakibatkan "Memorandum Roma" praktis tidak dapat dilaksanakan lagi. Dengan demikian juga proses dekolonisasi yang tertib, wajar dan damai semakin sulit untuk dilaksanakan.

- g. Pertempuran yang semakin menghebat, mengakibatkan meningkat jumlah korban tak berdosa. Dengan perkembangan itu, Pemerintah Indonesia dihadapkan pada satu-satunya pilihan untuk tidak menahan hasrat sukarelawan-sukarelawan Indonesia guna membantu saudara-saudaranya membebaskan diri dari penindasan kolonial dan teror Fretilin.
- h. Kehadiran sukarelawan Indonesia di wilayah Timor Portugis dilandasi pertimbangan, antara lain:
 - Desakan rakyat Indonesia melalui pernyataan DPR-RI tanggal 6 Desember 1975 yang mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas dan konkrit dalam menyelesaikan masalah Timor Portugis;
 - Permintaan keempat partai Timor Portugis yang termuat dalam Pernyataan Penggabungan diri rakyat Timor Portugis dalam negara RI tanggal 30 November 1975.

Penjelasan seperti tersebut di atas, terutama yang berkaitan dengan kehadiran sukarelawan Indonesia di Timor Portugis, juga dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 1975, untuk menerangkan duduk persoalannya kepada masyarakat internasional.

Sementara itu, tanggal 12 Desember 1975, dalam suatu upacara khidmat dan mengharukan di gedung DPRD Tingkat I NTT di Kupang, daerah Oekusi bekas jajahan Portugis telah menyatakan diri masuk menjadi daerah RI yang sekaligus semua penduduknya menjadi warga negara RI. Bertindak atas nama rakyat Oekusi adalah: Administrator Oekusi, Jaime dos Remedios de Oliveira; Komandan Militer Oekusi, Jose Valente; Sekretaris Parpol Apodeti setempat, Joao Martins Corbafo; Sekretaris Parpol UDT setempat, Joao Maniquin; Sekretaris Parpol Fretilin setempat, Sebastiao de Almeida. Pernyataan ini diterima dengan setulus hati oleh Gubernur NTT, El Tari, dan akan meneruskannya kepada pemerintah pusat di Jakarta untuk penyelesaian lebih lanjut.

Pada tanggal 17 Desember 1975, partai-partai Apodeti, UDT, Kota dan Trabalista, atas nama rakyat seluruh Timor Timur menyatakan berdirinya Pemerintah Sementara Daerah Timor Timur, untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan, tertib administrasi, tertib hukum dan keamanan sehingga kehidupan normal rakyat Timor Timur dapat dipulihkan. Pernyataan ini ditandatangani oleh pimpinan Partai Apodeti, Arnaldo dos Reis Araujo, dan pimpinan Partai UDT, Fransisco Xavier Lopez da Cruz.

Sementara itu, tokoh-tokoh tertentu di Portugal yang berpandangan lebih realistis pada masalah Timor Timur, seperti Jenderal Antonio Remalho Eanes (yang kemudian terpilih sebagai presiden), melalui Dubes Portugal di New

York, berhasil menghubungi delegasi PSTT yang sedang berada di sana dan mengusulkan untuk mengadakan perundingan mengenai masalah 23 orang Portugal tawanan PSTT. Setelah kontak-kontak berikutnya, perundingan diselenggarakan di Bangkok tanggal 16 Juni 1976.

Sebagai kelanjutan dari Pertemuan Bangkok tersebut, Portugal mengirimkan utusan khususnya yang terdiri dari suatu delegasi yang dipimpin oleh Jenderal Morais da Silva, untuk berkunjung ke Timor Timur dan mengadakan pembicaraan dengan pihak PSTT di Dili. Ia merasa puas dengan keadaan Timor Timur yang semakin mantab dan bahwa eksistensi PSTT adalah nyata dan benar-benar telah menguasai keadaan.

Selanjutnya, kedua belah pihak mengadakan perundingan lagi di Bangkok tanggal 6-10 Juli 1976. Perundingan ini antara lain berhasil merumuskan memorandum yang mencatat antara lain tentang kesanggupan Portugal untuk membayar gaji pegawainya yang belum sempat dibayar terhitung sejak Agustus 1975 sampai saat terjadinya integrasi secara yuridis Timor Timur dengan Republik Indonesia; dan melanjutkan pembiayaan proyek-proyek yang terlan-tar.

Karena belum mencapai sasarannya, Presiden baru Portugal Jenderal Antonio Remalho Eanes, mengirim lagi utusan khususnya Jenderal Morais da Silva untuk mengadakan perundingan dengan pihak PSTT di Bangkok tanggal 25 Juli 1976. Hasil perundingan ini antara lain menyebutkan bahwa PSTT menyetujui penyerahan 23 orang tawanan personal militer Portugal (yang dilaksanakan tanggal 27 Juli 1976 melalui PMI, bersamaan dengan pengungsi Portugis lainnya. Morais da Silva menerima integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Namun perkembangan terakhir di Portugal sendiri telah terjadi berbagai pandangan mengenai status Timor Timur.

TIMOR TIMUR PROPINSI KE-27

Proklamasi Balibo 30 November 1975 merupakan sumber dan landasan tata hukum baru yang ditegakkan oleh gerakan gabungan Apodeti, UDT, Kota dan Trabalista. Oleh karena itu adalah suatu konsekuensi logis kalau bertolak dari proklamasi itu gerakan gabungan lantas membentuk Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT) tanggal 17 Desember 1975 yang kemudian disusul dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah Timor Timur berdasarkan Act No. 1/AD, 1976.

Kedua lembaga tinggi itu sengaja dibentuk untuk melengkapi aparat penyelenggara dan penyediaan wadah bagi penampungan kehendak rakyat

secara obyektif. Dengan demikian, tuntutan Indonesia agar keinginan rakyat dilegalisasi terlebih dahulu, dapat dipenuhi, yang sekaligus berarti memenuhi tuntutan tata-krama politik internasional, yang menghendaki penentuan masa depan Timor Timur didasarkan atas kehendak rakyat di wilayah itu sendiri.

Pada tanggal 31 Mei 1976, DPR Wilayah Timor Timur yang dipilih dan terpilih sesuai dengan asas-asas demokrasi tradisional yang khas mengikuti adat kebiasaan Timor Timur, melangsungkan sidang paripurna terbuka untuk menentukan masa depan Timor Timur. Sidang yang dipimpin Ketua DPR Guilherme Maria Goncalves, dihadiri lengkap oleh 30 anggotanya (yang mewakili 13 kabupaten plus ibukotanya), para undangan yaitu Kepala Eksekutif, Arnaldo dos Reis Araujo, dan wakilnya, Lopez da Cruz, dan para perwakilan negara-negara sahabat, para wartawan luar negeri.

Sidang Paripurna Terbuka DPR tersebut, dengan acara tunggal membahas integrasi Timor Timur dengan Republik Indonesia, berhasil menelorkan keputusan yang diterima secara aklamasi yaitu petisi untuk mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk dilaksanakannya integrasi wilayah Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Untuk merealisasi keputusan sidang paripurna DPR tersebut, tanggal 5 Juni 1976, suatu delegasi besar rakyat Timor Timur yang terdiri dari 41 orang yang dipimpin oleh Ketua Eksekutif PSTT, Arnaldo dos Reis Araujo, tiba di Jakarta dengan tujuan menyampaikan Petisi Rakyat Timor Timur untuk berintegrasi dengan Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 7 Juni 1976, delegasi telah menghadap Presiden Soeharto di Istana Merdeka untuk menyerahkan petisi tersebut. Pada kesempatan itu, Presiden menyatakan akan mengirim suatu team yang terdiri dari wakil-wakil pemerintah, DPR dan berbagai kalangan organisasi masyarakat untuk sekali lagi menyaksikan kemauan dan hasrat rakyat Timor Timur sebelum daerah itu secara resmi bergabung dengan RI. Hal ini dilakukan bukan karena Pemerintah Indonesia tidak percaya dengan Proklamasi Balibo, atau petisi yang diterimanya, atau ragu-ragu terhadap para pemimpin rakyat Timor Timur, akan tetapi dimaksudkan agar rakyat Indonesia dapat menyaksikan sendiri dan berbicara sendiri dari hati ke hati dengan saudara-saudaranya di Timor Timur.

Dan pada tanggal 24 Juni 1976, delegasi Pemerintah RI yang berjumlah 36 orang (termasuk 9 dari DPR-RI, dan masing-masing 1 orang dari KNPI, HKTI, FBSI, HNSI dan PGRI) dan dipimpin oleh Mendagri Amirmachmud, tiba di Dili untuk menyaksikan serta memperoleh gambaran secara langsung tentang kenyataan-kenyataan yang sebenarnya yang berhubungan dengan kehendak rakyat Timor Timur untuk bergabung dengan rakyat Indonesia di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu juga delegasi, yang

juga disertai beberapa perwakilan asing dan para wartawan, telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan hasil yang memuaskan dan kembali ke Jakarta.

Selanjutnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 29 Juni 1976 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, setelah mendengar laporan Ketua Delegasi ke Timor Timur tersebut di atas, berkesimpulan bahwa Petisi PSTT/DPR Timor Timur yang diterimanya tanggal 7 Juni 1976 dari delegasi rakyat Timor Timur memang mencerminkan keinginan rakyat Timor Timur. Atas dasar kesimpulan tersebut Presiden memutuskan:

- a. Menanggapi positif dan menerima pernyataan integrasi rakyat Timor Timur;
- b. Pelaksanaan integrasi akan dilaksanakan melalui prosedur yang tidak bertentangan dengan proses konstitusional;
- c. Dalam waktu singkat, Pemerintah RI akan mengajukan RUU Khusus tentang penerimaan/penggabungan Timor Timur ke wilayah RI agar dapat disahkan oleh DPR;
- d. Sebagai konsekuensi dari integrasi tersebut, Presiden RI menginstruksikan supaya semua instansi di lingkungan RI membantu rakyat Timor Timur dalam melaksanakan pembangunan di Timor Timur.

Rancangan Undang-Undang tersebut di atas beserta penjelasannya diajukan kepada DPR-RI tanggal 1 Juli 1976. RUU yang digarap sejak tanggal 12 Juli dalam lobbying Komisi II tidak banyak mengalami perubahan prinsipil, dan hanya diadakan perubahan redaksional saja. RUU tersebut terdiri dari empat pasal. Pasal 1 berbunyi: "Mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;" Pasal 2: "Membentuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang wilayahnya bekas koloni Portugis di Timor;" Pasal 3 berbunyi: "Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kedua ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan tersendiri dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan di Timor Timur. Sedangkan pasal 4 menyatakan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada waktu diundangkan."

Pada tanggal 15 Juli 1976, melalui sidang plenonya, DPR secara aklamasi telah menyetujui disahkannya RUU tersebut menjadi Undang-Undang tentang Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976).

Selanjutnya, dengan ditandatanganinya Undang-Undang No. 7 Tahun 1976 tersebut oleh Presiden Soeharto di Bina Graha tanggal 17 Juli 1976,

maka bagi bangsa Indonesia umumnya dan rakyat Timor Timur khususnya berarti telah selesailah proses integrasi. Dan dengan statusnya sebagai propinsi RI yang ke-27 maka pada tanggal 3 Agustus 1976, dengan didahului lagu kebangsaan Indonesia Raya yang menggema di gedung DPRD Tingkat I Timor Timur, Dili, Mendagri Amirmarchmud melantik Gubernur pertama Timor Timur, Arnaldo dos Reis Araujo, dan wakilnya, Francisco Xavier Lopez da Cruz, serta Ketua DPR Tingkat I dan wakilnya serta 36 anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- The Age* (Melbourne), berbagai penerbitan.
- Asian Wall Street Journal*, berbagai penerbitan.
- The Australian*, berbagai penerbitan.
- Bandoro, Bantarto, "The East Timor Issue at the United Nations," *Indonesian Quarterly*, vol. XI, no. 1 (January 1983).
- Carrascalao, Mario viegas, Gubernur Timor Timur. Beberapa interview selama tahun 1985.
- Kliping berbagai surat kabar Indonesia, Koleksi CSIS.
- da Cruz, Lopez, Pemimpin Partai UDT. Beberapa interview selama tahun 1985.
- East Timor: A Decade of Development*. Dili: Provincial Government of East Timor, 1985.
- East Timor Develops*. Dili: Provincial Government of East Timor, 1985.
- Far Eastern Economic Review*, berbagai penerbitan.
- Hastings, Peter, "The Timor Problem-III: Some Australian Attitudes, 1941-1950," *Australian Outlook*, December 1975.
- Lapian, A.B. dan Abdurachman, Paramita, "Sejarah Timor Timur," *Berita Antropologi*, th. XI, no. 36 (Januari-Maret 1980).
- Nicol, Bill. *Timor: The Stillborn Nation*, Melbourne: Widescope International, 1978.
- Noor, Machmuddin et. al., *Lahirinya Propinsi Timor-Timur*, Jakarta: Alda, 1977.
- News Weekly* (Melbourne), berbagai penerbitan.
- Soekanto, *Integrasi: Kebulatan Tekad Rakyat Timor Timur*, Jakarta: Yayasan Parikesit, 1976.
- Sydney Morning Herald*, berbagai penerbitan.
- Weatherbee, Donald E. "The Indonesianization of East Timor," *Contemporary Southeast Asia*, vol. 3, no. 1 (June 1981).
- Viviani, Nancy, "Australians and the Timor Issue," *Australian Outlook*, vol. 30, no. 2 (August 1976).

Dimensi Internasional Masalah Timor Timur

Bantarto BANDORO*

Menyusul pergantian pemerintahan di Lisabon tanggal 25 April 1974 dan deklarasi Portugal untuk melepaskan wilayah-wilayah jajahannya, muncul suatu pemikiran tentang masa depan wilayah Timor Portugis. Dalam pengertian yang lebih luas pemikiran itu dipusatkan pada tiga pilihan yang eksklusif: *Pertama*, asosiasi Timor dengan Portugal; *kedua*, Timor yang merdeka; dan *ketiga*, integrasi Timor dengan negara tetangga, Indonesia. Realisasi pilihan-pilihan itu tidak mudah, karena adanya beberapa pihak yang secara politik mempunyai taruhan atau kepentingan langsung dalam status masa depan wilayah Timor. Pihak-pihak itu termasuk kelompok-kelompok politik di Timor sendiri, Pemerintah Portugal, Indonesia dan Australia.

Terdapat lima partai politik baru di Timor Timur yang terlibat langsung dalam perdebatan mengenai masa depan wilayah itu, yaitu UDT, Fretilin, Apodeti, Trabalista dan Kota. Tiga partai politik yang disebut pertama lahir beberapa minggu setelah pergantian pemerintahan di Lisabon. Pandangan-pandangan mereka mengenai masa depan wilayah Timor bertentangan satu dengan lainnya. Pertentangan pandangan ini kemudian meningkat menjadi konflik bersenjata di antara mereka, sementara Portugal sendiri kewalahan dan pelan-pelan menarik diri dari Timor.

Sikap umum pemerintah di Jakarta pada waktu itu adalah menentang kolonialisme dan imperialisme, mendukung hak menentukan nasib sendiri, dan menentang campur tangan asing. Tetapi pernyataan Adam Malik bulan Juni 1974 bahwa Indonesia akan mendukung Timor Portugis bila rakyatnya menginginkan kemerdekaan¹ kelihatannya lebih mencerminkan posisi Indonesia

*Staf CSIS.

¹J. Stephen Hoadley, *The Future of Portuguese Timor* (Singapore: The Institute of Southeast Asian Studies, 1975), hal 16. Lihat juga *Sinar Harapan*, 27 Juli 1974.

dalam masalah Timor. Meskipun demikian pernyataan seperti itu harus dilihat dalam konteks keinginan kuat Indonesia untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas daerah perbatasannya. Perkembangan yang tak terkendalikan di wilayah Timor oleh pemerintah di Jakarta dilihat sebagai sumber ketidakstabilan kawasan.

Kelompok Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Republik Demokrasi Timor Timur pada tanggal 28 November 1975. Proklamasi kemerdekaan ini tidak mendapat tanggapan positif dari lawan-lawan politiknya di Timor Timur. Partai-partai politik Apodeti, Kota, Trabalista dan UDT kemudian mengeluarkan suatu pernyataan tandingan, yaitu proklamasi integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Portugal menolak kedua deklarasi itu.²

Tanggal 31 Mei 1976 Dewan Perwakilan Rakyat Timor Timur mengeluarkan suatu resolusi integrasi dengan Indonesia. Resolusi itu disampaikan dalam bentuk petisi kepada pemerintah Indonesia yang menerima petisi itu sebagai ungkapan penyatuan persaudaraan.³ Proses ini dilanjutkan dengan pengiriman delegasi Indonesia ke wilayah Timor untuk memastikan keinginan rakyat Timor. Tanggal 17 Juli Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia men-sahkan rancangan Undang-Undang Penyatuan Timor Timur. Sejak itu wilayah itu resmi menjadi bagian integral negara Indonesia.

Di forum internasional Indonesia dituduh melakukan invasi ke wilayah Timor Timur. Keberatan-keberatan atas tindakan Indonesia itu oleh Portugal diajukan ke Dewan Keamanan PBB, yang kemudian mengeluarkan resolusi No. 385 (1975). Resolusi ini mengakui hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri dan menyerukan kepada Indonesia untuk menarik pasukannya dari wilayah Timor Timur. Resolusi ini juga menyesalkan sikap Portugal yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penguasa administratif wilayah Timor.⁴ Sejak itu sampai tahun 1982 masalah Timor Timur selalu dicantumkan dalam agenda sidang Majelis Umum PBB dan sering disinggung dalam fora internasional lainnya.⁵ Masalah Timor Timur juga memberi dampak yang negatif pada hubungan antara Indonesia dan Australia.

²E.G. Whitlam, "Indonesia and Australia: Political Aspect," in *Indonesia: the Making of Nation*, ed. J.A.C. Mackie (Canberra: Australian National University, 1980), hal. 763.

³Bantarto Bandoro, "Proses Dekolonisasi dalam Hukum Internasional Publik," Skripsi, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979, hal. 91.

⁴Untuk teks resolusi lihat *ibid.*, hal. 167-169.

⁵Yang dimaksud dengan fora internasional lainnya misalnya adalah: Konferensi Gerakan Non-Blok, Konferensi Antar-Parlemen, Konferensi Hak Asasi Manusia, dan sebagainya. Tulisan di sini akan lebih memfokuskan pada pembahasan persoalan Timor Timur di forum PBB daripada fora yang disebutkan tadi.

Tulisan di bawah ini akan menelaah dimensi internasional masalah Timor Timur.⁶ Inti masalah Timor Timur bukanlah integrasi wilayah itu dengan Indonesia melainkan pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri yang belum diterima oleh dunia internasional..

Pertama kita akan memaparkan posisi dan kebijakan awal Indonesia dalam persoalan itu. Bagian ini menjelaskan dilema yang dihadapi Indonesia dan pilihan-pilihan untuk mengatasinya. Bagian selanjutnya membahas perkembangan masalah Timor Timur dalam forum PBB. Pengaruhnya pada hubungan Australia-Indonesia akan dibahas dalam bagian akhir.

INDONESIA DAN MASALAH TIMOR TIMUR, 1974-1975

Pada tanggal 25 April 1974 rezim fasis yang sempat memerintah selama sepuluh tahun di Portugal digantikan oleh koalisi militer kiri moderat pimpinan Jenderal Antonius Spínola. Pemerintah Spínola kemudian mengumumkan politik dekolonisasi yang disambut baik oleh anggota PBB dan terutama oleh rakyat Timor Timur. Mereka mengartikan politik itu sebagai kebebasan untuk berorganisasi secara politik.⁷ Beberapa bulan setelah itu lahir di Timor Timur beberapa partai politik: UDT (11 Mei), ASDT (20 Mei), dan Apodeti (27 Mei). Tanggal 12 September ASDT membubarkan diri dan kemudian membentuk partai politik Fretilin. Dalam bulan September itu juga muncul partai politik Trabalista. Partai monarki juga terbentuk yang kemudian memakai nama Kota.⁸

Dengan munculnya partai-partai politik itu prospek Timor Timur yang merdeka menjadi cerah. Tetapi pandangan partai-partai politik di Timor Timur mengenai masa depan wilayah itu berbeda satu dengan lainnya. Apodeti, misalnya, menginginkan integrasi Timor Timur dengan Indonesia, sementara UDT yang pro-Portugal tetap mempertahankan asosiasi wilayah Timor dengan Portugal. ASDT lebih menginginkan kemerdekaan Timor Timur secara bertahap. Sikap awal pemerintah di Jakarta cukup realistis dan dapat menerima pilihan ini sebagai perkembangan normal dari rakyat Timor Timur.

Dalam usahanya untuk memperjuangkan kemerdekaan wilayah Timor Timur pemimpin ASDT, Ramos Horta, mengunjungi Jakarta dengan mem-

⁶Masalah pembangunan Timor Timur adalah di luar lingkup pembahasan tulisan ini.

⁷Bandoro, "Proses Dekolonisasi," hal. 81.

⁸Untuk diskusi lebih lanjut tentang latar belakang pembentukan partai-partai politik itu dan pandangan-pandangan mereka tentang masa depan wilayah itu lihat misalnya tulisan J. Kristiadi dalam edisi ini: "Dekolonisasi Timor Timur." Lihat juga Hoadley, *The Future*, hal. 3-8; Bill Nicol, *Timor the Stillborn Nation* (Victoria: Widescope International Publisher, 1978), hal. 51-69.

bawa manifesto politiknya yang menekankan kebijakan bertetangga baik dan kerjasama dalam segala sektor dengan negara-negara di sekitar Timor. Horta juga berusaha meyakinkan pemerintah di Jakarta bahwa Timor Timur yang merdeka akan menjalankan politik luar negeri yang beraliansi dengan Indonesia. Manifesto ASDT ini dan jaminan politik luar negerinya sekurangnya telah mengurangi kemungkinan kekuatiran di pihak Indonesia tentang politik ASDT dan Timor Timur yang merdeka.

Tanggal 17 Juni 1974 Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik mengirim surat kepada Horta dan menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik perubahan yang terjadi di Lisabon. Menurut Indonesia perkembangan ini membuka kesempatan bagi rakyat Timor Timur untuk mempercepat proses ke arah kemerdekaan. Malik menegaskan bahwa Indonesia mengakui hak seluruh bangsa atas kemerdekaan dan tidak mempunyai klaim atas wilayah Timor Timur. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia akan memelihara hubungan dekat dengan Timor Timur setelah wilayah itu merdeka.⁹ Hal ini berarti bahwa kemerdekaan adalah salah satu pilihan yang terbuka untuk rakyat Timor Timur.

Surat Malik itu mencerminkan sikap Pemerintah Indonesia mengenai persoalan Timor Timur sampai September 1974. Tetapi munculnya beberapa perkembangan penting memaksa Jakarta meninjau kembali kebijakannya. Perkembangan itu adalah pertemuan di Yogyakarta antara Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Australia Gough Whitlam, pembentukan Fretilin, dan jatuhnya pemerintahan Spínola di Portugal.

Dalam kunjungannya ke Indonesia awal September 1974, Whitlam mengatakan bahwa pilihan terbaik bagi Timor Timur adalah bergabung dengan Indonesia.¹⁰ Hubungan antara Indonesia dan Australia dalam kaitannya dengan masalah Timor Timur akan ditelaah kemudian.

Kepentingan Indonesia di Timor Timur adalah dihindarinya kemungkinan ancaman terhadap keamanannya yang mungkin timbul akibat perubahan politik yang tidak menentu di wilayah koloni yang berdampingan itu. Afiliasi eksternal gerakan radikal yang kemudian lahir di Timor Timur bisa menimbulkan tantangan terhadap kepentingan keamanan Indonesia. Gerakan politik ini adalah Fretilin, Front Revolusioner Kemerdekaan Timor Timur.

⁹Surat Malik ini antara lain menyebutkan bahwa "Siapa pun yang memerintah di Timor, Pemerintah Indonesia akan menjalin hubungan bersahabat," *Sinar Harapan*, 27 Juli 1974. Lihat juga Nicol, *Timor*, hal. 244, Peter Hastings, "Timor and West Irian: The Reason Why," in *Indonesia: The Making of Nation*, ed. Mackie, hal 715. Garis bawah oleh penulis.

¹⁰*Antara*, 11 September 1979.

Perkembangan penting lainnya adalah mundurnya Presiden Portugal Spínola yang moderat dan terbentuknya koalisi UDT-Fretilin.¹¹ Perkembangan yang pertama menguatirkan Indonesia karena hal itu menggeser orang yang dianggapnya bisa menjamin proses dekolonisasi Timor Timur. Enam minggu kemudian Lemos Pires datang ke Timor sebagai administrator Portugal baru untuk wilayah itu. Tujuan misi ini kelihatannya untuk melepaskan tanggung jawab Portugal atas wilayah Timor Timur secepat mungkin dan memajukan Fretilin sebagai pengganti Pemerintah Portugal.¹² Ini suatu indikasi bahwa Portugal tidak menginginkan referendum, tetapi merencanakan meneruskan penguasaan Timor kepada pemerintahan transisi yang didominasi oleh Fretilin. Satu minggu setelah Pires datang, Malik menyatakan bahwa Indonesia tidak mempunyai ambisi teritorial, tetapi memperingatkan bahwa Indonesia tidak bisa berpangku tangan atas perkembangan di wilayah Timor yang bisa mengancam stabilitas kawasan.¹³

Reaksi awal Indonesia ialah mendorong menumbuhkan apa yang disebut oleh seorang analis sebagai "partai klien" yang ingin berintegrasi dengan Indonesia.¹⁴ Dukungan Indonesia terhadap Apodeti ditentukan oleh kepentingan keamanan nasional dan regional. Indonesia mempunyai kepentingan bahwa pulau itu tidak digunakan oleh pihak lain untuk tujuan yang mengancam kepentingan itu. Perkembangan di Timor Timur memancing perhatian serius di Jakarta karena kerapuhan wilayah yang timbul dari fragmentasi geografis.¹⁵ Perubahan politik di Timor Timur setelah April 1974 membangkitkan berbagai kemungkinan kasus yang paling buruk, termasuk kemungkinan pembukaan jalan masuk bagi kekuatan-kekuatan luar yang karena pertentangan kepentingannya mengancam keamanan dan stabilitas nasional maupun regional.

Selama dua tahun setelah gerakan angkatan bersenjata mengambil-alih kekuasaan di Lisabon, usaha Indonesia untuk memajukan dengan cara terbuka atau tertutup kepentingan kelompok-kelompok yang ingin berintegrasi dengan Indonesia menimbulkan koalisi antara Fretilin dan UDT¹⁶ untuk me-

¹¹Mengenai latar belakang terbentuknya koalisi UDT-Fretilin lihat Hoadley, *The Future*, hal. 13-14. Lihat juga Justuf M. Van Der Kroef, "Patterns of Conflict in Eastern Indonesia," *Conflict Studies*, no. 79 (Januari 1979), hal. 7-9.

¹²Whitlam, "Indonesia and Australia," hal. 760.

¹³Peter Hasting, "The Timor Problem I," *Australian Outlook*, vol. 29, no. 2 (April 1975), hal. 31.

¹⁴Michael Leifer, *Indonesia's Foreign Policy* (London: George Allen & Unwin, 1983), hal. 155.

¹⁵Leifer, *ibid.*, hal. 155.

¹⁶Lihat catatan kaki no. 11.

lawanannya. Sikap UDT yang memihak pada Fretilin memancing Indonesia untuk mempertimbangkan aksi militer ke wilayah Timor Timur atas dasar: *pertama*, radikalisme yang semakin meningkat di pihak Fretilin; *kedua*, kekacauan yang besar yang timbul akibat antagonisme antara UDT dan Fretilin. Ini mendorong UDT untuk menarik diri dari koalisi itu. UDT sendiri kemudian mencoba mengambil-alih kekuasaan dengan menguasai pusat-pusat komunikasi dan pelabuhan udara. Fretilin, yang mendapat bantuan senjata dari Portugal, mengambil tindakan tangkisan. Fretilin malahan berhasil menguasai ibukota Dili dan mematahkan kekuatan lawan-lawannya. Keadaan ini menyebabkan sebagian penduduk Timor mengungsi ke wilayah Indonesia. Situasi yang demikian ini mengacaukan rencana dekolonisasi Portugal yang tidak mampu mengendalikan situasi itu. Penguasa administratif wilayah Timor bahkan mengungsikan diri ke pulau terdekat Atauro.

Dalam situasi seperti itu kekuatiran di pihak Indonesia dapat dimengerti. Kita juga harus menghargai sikap Indonesia yang moderat dan menahan diri dalam mengatasi persoalan sensitif yang menyangkut kepentingan keamanannya. Dilema Timor Timur bagi Jakarta adalah serius dan pilihan untuk keluar dari dilema itu lebih terbatas daripada yang diduga semula.

Karena Indonesia tidak mempunyai tuntutan hukum atas wilayah Timor Timur, baginya kehadiran Portugal di wilayah Timor Timur dapat dianggap sebagai kekuatan pendamai. Tetapi sebaliknya semakin lama Portugal berada di Timor Timur semakin kuat keinginannya untuk memelihara *status quo* dan semakin terbuka kesempatan munculnya gerakan kemerdekaan yang bisa menarik simpati kekuatan luar.

Tambahan pula suatu wilayah yang belum atau tidak mempunyai potensi yang memadai bagi kelangsungan hidupnya (*viability*) sebagai suatu negara tetapi dipaksakan untuk berdiri sebagai negara merdeka bisa menimbulkan ketidakstabilan yang mengandung potensi besar untuk mengundang intervensi kekuatan asing. Oleh karena arti strategis dan letak geografis Timor Timur, wilayah itu bisa menjadi unsur dalam perhitungan strategi global negara besar dan terkait dengan antagonisme antarnegara besar. Kemudian timbulnya konflik dalam rangka itu bisa terjadi dan hal itu merupakan ancaman terhadap keamanan dan perdamaian kawasan.¹⁷ Pada gilirannya hal ini akan mengganggu stabilitas perdamaian internasional. Kepentingan dunia internasional yang menuntut pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri didasarkan pula pada faktor *viability* itu. Dan kepentingan ini mengatasi kepentingan suatu wilayah atau kelompok.

Pilihan yang paling baik bagi Indonesia adalah penggabungan wilayah itu dengan Indonesia. Tetapi Indonesia tidak ingin dilihat melanggar kedaulatan

¹⁷J. Soedjati Djiwandono, "Timor Timur dan Hak Menentukan Nasib Sendiri," *Suara Karya*, 18 Mei 1983.

Portugal dengan melakukan intervensi militer sepanjang negara itu mempunyai komitmen yang kuat pada dekolonisasi yang tertib.¹⁸

Pemerintah di Jakarta tetap mengakui kedaulatan Portugal atas wilayah itu dan mendukung hak menentukan nasib sendiri. Walaupun tetap mempertahankan hak untuk melindungi kepentingannya seperti tercermin dalam pernyataan Menteri Pertahanan Indonesia (pada waktu itu Jenderal Panggabean) bahwa: "Indonesia akan bertindak apabila stabilitasnya terancam oleh kejadian-kejadian di koloni tetangga."¹⁹ Sementara itu Indonesia berusaha mengatasi masalah Timor Timur dengan mengajukan gagasan tentang tindakan polisi kolektif yang dapat menjamin kepentingan Indonesia.

Pada akhir bulan Agustus 1975, Ameilda Santos, utusan khusus Lisabon datang ke Jakarta dan membicarakan dengan Indonesia usul untuk membentuk pasukan pengawas internasional untuk memulihkan ketertiban di Timor Timur.²⁰ Tetapi Indonesia dan Portugal berbeda pendapat mengenai komposisi dan peranan pasukan itu. Portugal hanya bersedia menerima komposisi pasukan yang sebagian terdiri dari negara-negara di kawasan tidak termasuk Indonesia; sedangkan Indonesia menuntut partisipasinya dalam pasukan itu. Terlepas dari perbedaan pendapat itu rencana intervensi gabungan juga tidak terlaksana akibat keengganan Pemerintah Australia untuk melibatkan diri dalam usaha gabungan itu.²¹ Kegagalan prakarsa ini secara kebetulan terjadi bersamaan dengan konsolidasi kontrol yang nyata oleh Fretilin.

Pada awal September, Fretilin mengklaim bahwa kekuatan tidak dikenal telah menyebrang ke wilayah Timor.²² Dalam keadaan ini Fretilin melepaskan tuntutan awalnya atas kemerdekaan Timor Timur dan sebaliknya mendukung suatu rumusan yang disetujui dalam Konperensi Macao. Fretilin memboikot pertemuan itu dan menolak hasilnya. Tetapi oleh karena didesak oleh keadaan di Timor, mereka akhirnya menyetujui hasil pertemuan itu, yaitu persetujuan untuk mengadakan pemilihan di Timor sekitar Oktober 1976. Oktober 1978

¹⁸Indonesia berusaha untuk tidak menodai reputasi internasionalnya terutama di mata pemberi bantuan ekonomi yang tergabung dalam IGGI. Lihat Leifer, "Indonesia and the Incorporation of East Timor," *The World Today*, vol. 32, no. 9 (September 1976), hal. 351.

¹⁹Leifer, "Indonesia and the Incorporation," hal. 351. Harian *Angkatan Bersenjata* bulan Maret 1975 menyatakan bahwa "Timor Timur telah menjadi sumber ancaman potensial untuk Indonesia. Ancaman ini harus dihilangkan demi keamanan negara Indonesia." Dikutip oleh Kroef, *Patterns of Conflict*, hal. 19.

²⁰*Suara Karya*, 3 September 1975.

²¹Whitlam, "Indonesia and Australia," hal. 762. Lihat juga Kroef, *Patterns of Conflict*, hal. 11.

²²Leifer, *Indonesia's*, hal. 157.

juga telah ditetapkan sebagai saat alih kedaulatan.²³ Perubahan sikap Fretilin ini kelihatannya bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari Portugal atas penguasaan politiknya di Timor Timur dan mendapatkan perlindungan Portugal terhadap kemungkinan intervensi Indonesia.

Usaha Portugal untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Timor Timur mengalami kegagalan. Pertengahan Oktober Departemen Penerangan RI menyatakan bahwa Apodeti dan UDT menguasai bagian terbesar daerah sebelah timur Timor. Dalam tahap ini dilaporkan bahwa tentara Indonesia telah memasuki wilayah Timor Timur.²⁴ Mengalirnya pengungsi ke wilayah Indonesia juga bisa dilihat sebagai faktor penting tindakan Indonesia itu. Sasaran operasi militer secara tertutup ini diduga untuk melemahkan setiap pernyataan yang mungkin dikeluarkan oleh Fretilin kepada dunia luar guna mendapatkan pengakuan atas Timor Timur yang berdaulat.

Usaha penyelesaian persoalan Timor Timur terus dilakukan lewat meja perundingan. Ini terlihat ketika Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Portugal mengadakan pertemuan di Roma akhir November 1975. Kedua Menteri Luar Negeri itu mengeluarkan pernyataan bahwa dalam melaksanakan dekolonisasi di Timor Timur kepentingan sah negara-negara di kawasan, khususnya Indonesia sebagai negara tetangga terdekat perlu dijamin.²⁵

Pernyataan itu penting karena mengakui status Indonesia sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam konflik Timor Timur. Sebaliknya pernyataan itu semakin mempersempit ruang gerak Fretilin karena pengakuan atas status Indonesia itu berarti bahwa Indonesia setiap saat bisa mengambil tindakan tangkisan terhadap tindakan-tindakan sepihak yang mungkin diambil oleh Fretilin. Tetapi oleh karena Portugal tidak menanggapi secara serius himbuan Fretilin agar Portugal memberikan bantuan politik, Fretilin pada tanggal 28 November 1975 secara sepihak memproklamasikan kemerdekaan Republik Demokrasi Timor Timur. Lawan-lawan internalnya, aliansi UDT dan Apodeti, Trabalista dan Kota mengeluarkan deklarasi tandingan di Balibo, yaitu deklarasi integrasi dengan Indonesia. Indonesia tidak segera

²³Leifer, "Indonesia and the Incorporation," hal. 352. Lihat juga Kristiadi, "Dekolonisasi;" *Suara Karya*, 30 Mei 1975; *Kompas*, 26 Juni 1975; dan *Antara*, 14 Juli 1975.

²⁴Leifer, "Indonesia and the Incorporation," hal. 352.

²⁵Mengenai Pertemuan Roma ini lihat misalnya Kristiadi, "Dekolonisasi;" Bando, "Proses Dekolonisasi," hal. 84-85. Memorandum of Understanding yang ditandatangani tanggal 13 November 1975 oleh kedua Menteri Luar Negeri itu antara lain menetapkan Indonesia sebagai pihak yang berkepentingan dalam masalah Timor Timur.

menanggapi perkembangan di Timor Timur secara militer, tetapi pernyataan Menteri Penerangan Indonesia, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Desember, mengisyaratkan kemungkinan intervensi yang menentukan.²⁶

Puncak kemelut politik di Timor Timur berlangsung bersamaan dengan kunjungan Presiden dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Ford dan Kissinger, ke Jakarta awal Desember 1975. Presiden Soeharto dan Ford menolak bahwa persoalan Timor Timur disinggung dalam pembicaraan antara mereka; tetapi Malik dan Kissinger tidak menyangkal bahwa mereka membicarakan masalah itu.²⁷ Di samping itu dikatakan bahwa Amerika Serikat "memahami posisi Indonesia dalam masalah Timor Timur."²⁸ Sementara itu satuan-satuan udara dan laut Indonesia digelar di sekitar Dili²⁹ beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan Timor Timur. Pemerintah di Jakarta kelihatannya tidak ingin menghadapi risiko yang lebih besar yang mungkin timbul karena orientasi ideologis pemerintah Fretilin di Timor Timur.

Keberatan-keberatan atas tindakan Indonesia diajukan oleh Portugal ke Dewan Keamanan PBB yang kemudian mengeluarkan resolusi yang bukan saja menyerukan agar Indonesia menarik pasukannya dari wilayah Timor Timur tetapi juga menyesalkan sikap Portugal yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penguasa administratif wilayah Timor. Sejak masalah Timor Timur diperdebatkan oleh PBB tahun 1975, Indonesia dipaksa mengambil posisi defensif dalam setiap persidangan PBB yang menyinggung persoalan itu.

TIMOR TIMUR DI FORUM PBB

Masalah Timor Timur pertama kali dibicarakan dalam forum PBB, yaitu komite dekolonisasi, atas usul Cina, Tanzania, Guinea Bissau dan Mozambique.³⁰ Dalam sidangnya tanggal 11 Desember 1975, komite ini mengeluarkan suatu resolusi yang mengecam intervensi militer Indonesia di wilayah Timor Timur. Tetapi resolusi itu ditentang oleh wakil Selandia Baru karena tidak

²⁶Leifer, "Indonesia and the Incorporation," hal. 353.

²⁷Whitlam, "Indonesia and Australia," hal. 763.

²⁸Richard W. Franke, *East Timor: The Hidden War* (n.p,nd), hal. 48.

²⁹Whitlam, "Indonesia and Australia," hal. 763.

³⁰Resolusi ini diterima dengan perbandingan suara 69 setuju (di antaranya Uni Soviet, negara-negara sosialis dan negara Afrika kulit hitam serta Australia), 11 menentang (di antaranya Birma, India, Indonesia, Iran, Malaysia, Mauritania, Maroko, Filipina, Arab Saudi dan Muangthai), dan 38 abstain (di antaranya Amerika Serikat, Singapura dan Selandia Baru). *Merdeka*, 15 Desember 1975.

mencerminkan usaha mengatasi masalah Timor Timur. Resolusi itu juga dianggap berat sebelah karena terlalu menitikberatkan aspek militer yang terlalu dibesar-besarkan dan tidak memusatkan pada cara dekolonisasi di wilayah itu.³¹

Karena desakan Portugal, persoalan Timor Timur dibahas kembali oleh Majelis Umum PBB, yang dalam sidangnya tanggal 12 Desember 1975 mengeluarkan Resolusi No. 3485. Resolusi ini menyesalkan intervensi bersenjata Indonesia di wilayah Timor Timur, dan menyerukan agar Indonesia menghentikan pelanggaran terhadap wilayah itu. Resolusi ini diterima dengan perbandingan suara 72 menentang, 10 mendukung Indonesia, 43 abstein dan 18 absen. Kekompakan ASEAN juga sempat diuji ketika Singapura bersikap abstein, sedang semua mitra kawasan lainnya mendukung posisi Indonesia.

Resolusi Majelis Umum PBB itu kemudian diperkuat oleh resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 22 Desember 1975, yang juga menyesalkan intervensi bersenjata Indonesia di Timor Timur. Pada tahun berikutnya (1976) Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Resolusi Timor Timur No. 31/53, yang antara lain menentukan bahwa masalah Timor Timur akan dibicarakan dalam sidang-sidang umum yang akan datang sebagai mata acara tersendiri, yaitu "masalah Timor Timur." Dengan demikian persoalan itu sejak tahun 1975 (sampai 1982) telah delapan kali dibahas oleh Majelis Umum PBB dengan pola pemungutan suara seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.³²

Tabel

Tahun	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Menentang Indo- nesia	72	65	67	59	62	58	54	50
Mendukung Indo- nesia	10	20	26	31	31	35	42	46
Abstain	43	53	48	45	45	46	46	50
Absen	18	7	7	14	13	15	15	11

Integrasi Timor Timur dengan Indonesia tahun 1976 memancing reaksi keras dari banyak negara dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1976, yang menganggap integrasi itu sebagai *fait accompli* Indonesia. Mereka menuduh bahwa hak menentukan nasib sendiri tidak dilaksanakan sesuai dengan

³¹Kompas, 15 Desember 1975.

³²Bagian terbesar pembahasan persoalan Timor Timur di PBB, 1975-1981 diambil dari Bantarto Bandoro, "Perubahan Sikap Beberapa Negara mengenai Masalah Timor Timur dalam Sidang-sidang Umum PBB," *Suara Karya*, 29 Desember 1981.

Piagam PBB dan Resolusi Majelis Umum PBB No. 1514 (1960), khususnya karena pada saat itu pasukan Indonesia berada di Timor. Sesuai dengan ini dan atas permintaan beberapa negara Afrika kulit hitam, Majelis Umum PBB membicarakan masalah Timor dan mengeluarkan Resolusi No. 31/53 (1976), dengan perbandingan suara 65 menentang Indonesia, 20 mendukung, 53 abstain dan 7 absen.³³

Walaupun negara-negara yang mendukung Indonesia bertambah menjadi 20, pada dasarnya resolusi tahun itu tetap keras, mengecam Indonesia dan merupakan ulangan resolusi tahun 1975. Dalam resolusi tahun 1976 itu terlihat perubahan sikap beberapa negara. Misalnya, Australia yang pada tahun 1975 menentang Indonesia pada tahun 1976 bersikap abstain. Perubahan sikap mungkin ini didasarkan pada kenyataan di Timor Timur maupun pada faktor hubungan bilateral dengan Indonesia. Australia tampaknya tidak ingin mengorbankan hubungannya dengan Indonesia semata-mata karena persoalan Timor Timur. Perubahan sikap Australia ini sedikit banyak memperbaiki posisi Indonesia. Demikianpun sikap Amerika Serikat yang mendukung Indonesia (tahun 1975 ia abstain) dan mungkin mempengaruhi negara-negara Amerika Latin, Nikaragua dan Uruguay, sehingga mendukung Indonesia.

Secara keseluruhan hasil pemungutan suara tahun 1976 itu menunjukkan bahwa negara-negara Afrika kulit hitam dan sosialis tetap menentang Indonesia. Sikap itu terutama diambil karena solidaritas mereka dengan garis politik yang dianut oleh negara-negara bekas jajahan Portugal dan dengan Fretilin. Sebaliknya negara-negara Barat dan beberapa negara Amerika Latin bersikap abstain, sedangkan kelompok negara-negara Arab pecah. Sebagian mendukung Indonesia, sebagian abstain, dan sebagian lagi menentang (Aljazair).

Atas desakan Mozambique dan Guinea Bissau, masalah Timor Timur dicantumkan kembali dalam agenda persidangan Majelis Umum PBB tahun 1977 dan 1978. Sidang-sidang Majelis Umum ini juga mengeluarkan resolusi Timor Timur masing-masing dengan perbandingan suara sebagai berikut. Tahun 1977: 67 menentang Indonesia, 26 mendukung, 48 abstain dan 7 absen (1977); tahun 1978: 59 menentang Indonesia, 31 mendukung, 45 abstain dan 14 absen (1978). Walaupun jumlah negara yang mendukung Indonesia meningkat, dilihat secara keseluruhan jumlah suara yang mendukung posisi Indonesia belum banyak.

³³Negara-negara yang mendukung Indonesia antara lain adalah Bangladesh, Amerika Serikat, Nikaragua, Uruguay, Maroko dan Mauritania, sedangkan yang menentang dan abstain antara lain adalah Benin dan Pakistan. Sikap Maroko dan Mauritania pada tahun 1976 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya (abstain), karena Indonesia ikut mensponsori resolusi Sahara Barat dalam KTT Non Blok di Kolombo yang menguntungkan Maroko. Sebaliknya Pakistan mengubah sikapnya dari menentang menjadi abstain.

Karena kuatnya dukungan terhadap negara sponsor resolusi, sidang Majelis Umum PBB tahun 1979 kembali membahas masalah Timor Timur dan mengadakan pemungutan suara dengan hasil 62 menentang, 31 mendukung Indonesia, 45 abstein dan 13 absen.³⁴ Perubahan sikap beberapa negara itu belum cukup membantu usaha Indonesia mencabut masalah Timor Timur dari agenda persidangan umum PBB. Sebaliknya negara-negara bekas jajahan Portugal yang mendapat dukungan dari beberapa negara komunis berhasil mencantumkan kembali dan mempertahankan masalah itu dalam agenda sidang umum PBB tahun 1980 dan 1981. Hasil pemungutan suara tahun 1980 adalah sebagai berikut: 58 menentang Indonesia, 35 mendukung, 46 abstein dan 15 absen. Jumlah negara yang menentang Indonesia pada tahun 1980 berkurang menjadi 58, sedangkan yang mendukungnya meningkat menjadi 35 negara.³⁵ Hasil pemungutan suara tahun 1981 adalah: 54 menentang Indonesia, 42 mendukung, 46 abstein dan 15 absen.³⁶

Tahun 1982 Indonesia kembali harus mempertahankan posisinya di PBB terhadap tuduhan beberapa negara anggota bahwa Indonesia telah menganeksasi Timor Timur tanpa memberikan kesempatan kepada rakyat di wilayah itu untuk menentukan masa depannya secara bebas. Usaha-usaha Indonesia untuk menghapuskan masalah itu dari agenda sidang umum PBB sejauh itu tidak berhasil. Masalah ini bahkan dicantumkan lagi dalam agenda Sidang Umum PBB ke-37 tahun 1982. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sponsorsnya adalah negara-negara bekas jajahan Portugal seperti Mozambique, Angola dan Cape Verde. Negara-negara ini juga termasuk sembilan negara yang men-

³⁴Negara-negara yang mendukung antara lain adalah Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Uruguay, Paraguay, Honduras, Chili, Columbia dan Turki, sedangkan sembilan negara anggota MEE dan tiga negara komunis, yaitu Cekoslovakia, Hongaria dan Rumania abstein. Perubahan sikap negara-negara Eropa Timur dari menentang tahun 1978 menjadi abstein tahun 1979 sekurang-kurangnya menguntungkan Indonesia.

³⁵Negara-negara yang mendukung Indonesia pada tahun 1980 adalah Argentina, Australia, Kanada, Columbia, Honduras dan Turki. Sikap baru Turki ini sesuai dengan komitmen yang disampaikan oleh delegasi Senat Turki sewaktu berkunjung ke Indonesia tahun 1978 dan merupakan tanggapan atas sikap Indonesia yang mendukung Turki dalam masalah Cyprus. Sebaliknya Cyprus menentang Indonesia. Dukungan sebagian besar negara Amerika Latin untuk Indonesia didasarkan pada garis politik mereka yang lebih moderat. Tetapi Guyana, Trinidad dan Tobago menentang Indonesia karena hubungannya yang lebih dekat dengan Afrika dan garis politik mereka yang radikal.

³⁶Dalam Sidang Umum PBB tahun 1981 Indonesia mendapat dukungan tambahan suara dari Bahrain, Komoros, Dominika, Kuwait, Paraguay dan Persatuan Emirat Arab. Di antara negara-negara yang menentang Indonesia adalah Angola, Brazil, Meksiko, Kuba, Ethiopia, Guinea, Madagaskar, Malawi, Mali dan Tanzania. Sikap negara yang disebut terakhir ini tidak diduga. Sewaktu berkunjung ke Indonesia tahun 1981, Presiden Tanzania telah menjanjikan dukungan bagi Indonesia dalam persoalan Timor Timur.

dukung dicantumkanannya masalah Timor Timur dalam agenda sidang Biro Koordinasi Non-Blok di Havana tahun 1982.³⁷

Sementara itu dalam usahanya mengurangi jumlah suara yang mendukung Indonesia atau sebaliknya memperbanyak jumlah suara yang menyetujui resolusi, Portugal pada tahun 1982 berusaha mempola suatu resolusi sedemikian rupa sehingga bisa diterima dan disetujui oleh semua negara. Terdapat petunjuk bahwa Portugal tidak menuntut penarikan mundur pasukan Indonesia dari Timor Timur dan referendum di wilayah itu. Sebaliknya ia berusaha merancang suatu resolusi baru yang mendesak agar masalah Timor Timur diselesaikan melalui Mahkamah Internasional. Kehadiran delegasi partai-partai politik Portugal di New York awal September 1982 guna mempengaruhi negara-negara sponsor dan mencari dukungan internasional memperkuat dugaan seperti itu.³⁸

Langkah Portugal di PBB ditentang oleh Indonesia dan anggota ASEAN lainnya, Jepang, beberapa negara Timur Tengah dan Amerika Serikat. Posisi Amerika Serikat dalam masalah Timor Timur adalah menerima penggabungan Timor Timur dengan Indonesia. Posisinya ini dikemukakan oleh John Holdridge, kepala Biro Asia Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, di muka Kongres pertengahan September 1982.³⁹

Pemungutan suara tahun 1982 itu menghasilkan perbedaan suara menentang yang paling kecil sejak persoalan Timor Timur diperdebatkan di PBB tahun 1975. Hasil pemungutan suara itu adalah: 50 menentang Indonesia, 46 mendukung,⁴⁰ 50 abstein⁴¹ dan 11 absen. Indonesia hanya memperoleh tambahan empat suara, dan ini lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 1981 ketika Indonesia memperoleh tambahan tujuh suara. Faktor utamanya diduga

³⁷Bantarto Bandoro, "Perkiraan Pemungutan Suara atas Masalah Timor Timur dalam Sidang Majelis Umum PBB 1982," *Suara Karya*, 12 Oktober 1982.

³⁸*The Asian Wall Street Journal*, 23 September 1982.

³⁹Bantarto Bandoro, "The East Timor Issue at the United Nations," *Indonesian Quarterly*, vol. XI, no. 1 (Januari 1983), hal. 11.

⁴⁰Negara-negara yang mendukung Indonesia antara lain adalah Fiji dan Kepulauan Solomon yang pada tahun 1981 bersikap abstein. Pakistan dan Maroko adalah di antara negara anggota organisasi Konperensi Islam yang mendukung Indonesia. Sikap baru Pakistan dari abstein tahun 1981 menjadi mendukung Indonesia tahun 1982 ini sesuai dengan janji yang dikemukakan oleh Presiden Zia Uhaq sewaktu berkunjung ke Indonesia awal November 1982.

⁴¹Maroko yang pada tahun 1981 mendukung Indonesia berubah sikap menjadi abstein, karena sikap Indonesia yang juga abstein dalam persoalan Sahara Barat. Negara-negara lain yang mengambil sikap abstein adalah negara-negara Eropa Barat, seperti Inggris, Prancis, Italia, Denmark, Jerman Barat dan Norwegia. Negara-negara ini bersimpati kepada Portugal, sebagai sesama anggota NATO, tetapi menahan diri dari sikap bermusuhan dengan Indonesia dalam persoalan Timor Timur.

adalah kampanye Portugal dengan mengirim delegasi pemerintah dan parlemen ke sekitar lima puluh negara.

Karena perkembangan masalah Timor Timur di PBB yang cenderung menguntungkan negara-negara pendukung Portugal, Indonesia melakukan ofensif diplomatik untuk menjamin agar pemungutan suara dalam sidang umum PBB ke-38 (1983) sekurang-kurangnya bisa menyingkirkan masalah Timor Timur dari agenda PBB. Untuk mencapai tujuan itu Menteri Luar Negeri Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja, mengunjungi Solomon, Fiji, Samoa Barat, Selandia Baru dan Papua New Guinea serta Norwegia dan Denmark untuk menjelaskan posisi Indonesia dalam persoalan Timor Timur.⁴² Misi-misi Indonesia lainnya juga dikirim dari Jakarta ke delapan negara Afrika: Burundi, Kenya, Uganda, Rwandi, Guiena, Ivory Coast, Liberia dan Togo. Lima di antara negara-negara itu pada tahun 1981 menentang Indonesia.⁴³ Misi Indonesia juga dikirim ke beberapa negara Amerika Latin dan Haiti serta Jamaica di kawasan Caribia.

Karena "perkembangan terakhir"⁴⁴ Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 19 Agustus secara tidak diduga mengumumkan bahwa ia tidak akan mengajukan laporan kepada Sidang Umum ke-38 tentang konsultasi yang dilaksanakan sesuai dengan resolusi tahun 1982.⁴⁵ Selanjutnya komite umum Sidang Umum PBB pada tanggal 23 September memutuskan tanpa perdebatan untuk menunda perdebatan masalah Timor Timur sampai Sidang Umum ke-39 tahun 1984. Keputusan yang sama diambil oleh komite umum pada tahun 1985 dan 1986. Jadi sejak tahun 1983 perdebatan masalah Timor Timur sudah empat kali ditunda. Wakil Norwegia di PBB adalah pihak pertama yang mengusulkan penundaan itu dengan pertimbangan bahwa "konfrontasi di Majelis Umum PBB tidak akan membantu dan kemungkinan akan memberikan dampak yang negatif pada kontak-kontak yang sedang berlangsung."⁴⁶ Keputusan PBB seperti itu oleh beberapa kalangan di Jakarta dan mitranya di kawasan dianggap sebagai kemenangan diplomasi Indonesia. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa masalah itu sama sekali hapus dari agenda PBB.

⁴²*The Jakarta Post*, 12 September 1983.

⁴³Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, *The War Against East Timor* (London: The Pitman Press Bath, 1984), hal. 149.

⁴⁴Yang dimaksud dengan "perkembangan terakhir" adalah negosiasi langsung antara Indonesia dan Portugal untuk menyelesaikan persoalan Timor Timur. *Harian Kompas*, 25 September 1983 mencatat pertemuan rahasia Indonesia-Portugal di Paris bulan Desember 1981.

⁴⁵Resolusi tahun 1982 yang diterima dengan perbandingan suara 50 setuju, 46 menentang dan 50 abstain ini menyerukan Sekretaris Jenderal PBB untuk "memprakarsai suatu pertemuan antara semua pihak yang bersangkutan guna penyelesaian secara komprehensif persoalan Timor Timur." Budiardjo dan Soei Liong, *The War*, hal. 148.

⁴⁶*Far Eastern Economic Review*, 6 Oktober 1983.

Indonesia tidak menolak maupun mendukung prakarsa Norwegia itu.⁴⁷ Banyak pengamat di PBB memperkirakan bahwa Indonesia, karena penundaan itu, akan kehilangan momentum untuk memperoleh dukungan. Pandangan ini bisa dibenarkan bila dilihat posisi Indonesia dalam pemungutan suara terutama pada tahun 1982. Seandainya Indonesia menanggapi prakarsa Norwegia itu, masalah Timor Timur mungkin akan dicantumkan lagi dalam agenda PBB. Bila hal ini terjadi, dan karena posisi Indonesia yang dirasakan cukup kuat oleh pemerintah di Jakarta, biarpun jumlah suara tambahan setiap tahunnya tidak lebih dari sepuluh, Indonesia mungkin bisa mengalahkan Portugal. Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja pernah mengatakan bahwa: "Ada untungnya kalau persoalan Timor Timur dimasukkan dalam agenda Sidang Umum PBB (tahun 1983), karena Indonesia akan memperoleh kemenangan dalam pemungutan suara."⁴⁸

Tidak ditanggapinya prakarsa Norwegia itu memperlihatkan kesan bahwa Indonesia seolah-olah sangat menggantungkan penyelesaian Timor Timur pada usaha Sekretaris Jenderal PBB maupun kontak langsung antara Indonesia dan Portugal dengan harapan masalah Timor Timur bisa diselesaikan tanpa harus melalui pemungutan suara. Persoalannya sekarang apakah prakarsa Sekretaris Jenderal PBB dan kontak langsung antara Indonesia dan Portugal ini bisa lebih menjamin bahwa kedua negara itu akan mencapai kata sepakat tentang Timor Timur. Karena ketentuan dalam konstitusinya,⁴⁹ Portugal mempunyai komitmen untuk memajukan hak menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan wilayah jajahannya. Siapa pun yang memerintah di Lisbon dan selama mereka tetap berpegang pada ketentuan dalam konstitusi itu, sulit diharapkan Portugal mau bersikap lunak terhadap penyelesaian wilayah jajahannya termasuk Timor Timur. Kegagalan pertemuan langsung Indonesia-Portugal berarti bahwa masalah Timor Timur akan dibahas lagi oleh PBB dalam sidang umumnya di tahun-tahun mendatang.

Jika di tahun-tahun mendatang pemungutan suara tentang masalah Timor Timur jadi diadakan, pola pemungutan suara yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya kemungkinan akan terulang. Bahwa Portugal akan memperoleh dukungan suara yang lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya adalah kemungkinan yang tidak bisa diabaikan.

Oleh karena masalah Timor Timur masih mungkin diperdebatkan dalam sidang umum PBB di tahun-tahun mendatang, diplomasi Indonesia juga di-

⁴⁷*Kompas*, 25 September 1983.

⁴⁸*Suara Karya*, 23 September 1983.

⁴⁹Konstitusi Portugal yang diumumkan pada tahun 1976 dan diubah tahun 1982 menetapkan bahwa: "Portugal terikat pada kewajibannya untuk memajukan dan melindungi hak kemerdekaan Timor." *The Europa Yearbook 1984. A World Survey* (London: Europa Publication Limited, 1984), hal. 743.

arahkan pada usaha mencabut persoalan itu dari agenda PBB. Yang mungkin sulit adalah mencabut nama Timor Timur dari daftar "wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri" yang disusun pada tahun 1962. Dalam hal ini yang diperlukan bukan hanya suara mayoritas, tetapi juga dukungan dari kelima negara anggota tetap Dewan Keamanan. Sampai tahun 1983 di antara kelima anggota tetap itu baru Amerika Serikat yang mendukung Indonesia. Prancis dan Inggris bersikap abstein, sedangkan Cina dan Uni Soviet selalu memberikan suara menentang.

Selama beberapa tahun terakhir ini resolusi PBB telah mempersoalkan pula pelanggaran hak asasi dan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Timor Timur. Tetapi hak menentukan nasib sendiri tetap merupakan kunci persoalan yang selalu mendasari pemungutan-pemungutan suara. Konsep hak menentukan nasib sendiri diakui dalam Piagam PBB sebagai norma internasional yang pokok. Sejak bulan Desember 1975 persoalan hak menentukan nasib sendiri selalu diperdebatkan dalam forum PBB, dua kali di Dewan Keamanan (1975 dan 1976) dan dalam setiap sidang umum PBB, 1975-1982. Bagi Indonesia hak menentukan nasib sendiri itu telah dilaksanakan oleh rakyat Timor Timur dengan keputusan integrasi dengan Indonesia. Tetapi masyarakat internasional (PBB) belum sepenuhnya menerima keadaan itu. Mereka menuntut dilaksanakan hak itu di bawah pengawasan internasional.

TIMOR TIMUR DALAM HUBUNGAN AUSTRALIA-INDONESIA⁵⁰

Masalah Timor Timur telah memberikan dampak yang negatif pada hubungan antara Australia dan Indonesia. Hubungan antara kedua negara itu mengalami pasang-surut sejak timbulnya persoalan Timor Timur tahun 1974.

Posisi awal Australia dalam persoalan Timor Timur dikemukakan oleh Perdana Menteri Gough Whitlam pada waktu ia mengunjungi Indonesia pada tahun 1974. Secara tidak diduga ia telah mengeluarkan pernyataan yang mendukung posisi Indonesia. Sikapnya ini diungkapkan secara lebih jelas dalam suatu laporan tidak rahasia Departemen Luar Negeri Australia tanggal

⁵⁰Persoalan Timor Timur dalam hubungan Australia-Indonesia banyak disinggung dalam tulisan-tulisan misalnya: H.D. Anderson, "Australia-Indonesia Relations," in *Regional Dimension of Indonesia-Australia Relations* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1984); Hasting, "Timor and West Irian," hal. 715-716; Alan Renouf, *The Freighted Country* (Melbourne: The Macmillan Company of Australia Ltd., 1979), hal. 439-449; Sue Nichterlein, "Australia: Courtier or Courtesan? The Timor Issue Revisited," *Australian Outlook*, vol. 36, no. 1 (April 1982), hal. 47-50; Alfian Muthalib, "Indonesia dan Pasifik Barat Daya: Australia, Selandia baru dan Papua New Guinea," *Analisa*, no. 8 (Agustus 1985), hal. 3-6. Lihat juga beberapa Tajuk Rencana antara lain dalam harian *The Jakarta Post*, 2 Juli, 13 Juli 1984, 30 Mei, 22 Agustus 1985; *Kompas*, 21 Juni, 5 Juli 1984, 24 Agustus 1985.

11 September 1974.⁵¹ Laporan ini antara lain menyebutkan bahwa Australia ragu Timor Timur bisa mencapai kemerdekaan yang sejati karena kelemahan ekonomi dan keterbatasan kemampuan pertahanannya, dan oleh sebab itu ia memahami kekuatiran Indonesia mengenai masa depan wilayah Timor.

Prinsip ideologi yang dianut oleh Partai Buruh Australia adalah bahwa kemerdekaan, kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri dianggap sebagai perkembangan yang alamiah. Tetapi Australia menganut pandangan yang sama dalam persoalan Irian Barat tahun 1962,⁵² walaupun Irian Barat secara geografis dan infrastruktur berbeda dari Timor Timur. Pandangan itu telah ditanggapi di Jakarta sebagai dukungan Australia terhadap kebijakan Timor Indonesia.⁵³

Dalam masa pemerintahan Whitlam itu hubungan antara Canberra dan Jakarta sangat baik. Tetapi dalam masa pemerintahan Fraser hubungan itu sempat mengalami ketegangan akibat hilangnya lima wartawan Australia di Timor, dan pernyataan Menteri Luar Negeri Andrew Peacock yang menyesalkan kejadian-kejadian di wilayah itu. Lebih dari itu kontak pribadi yang dikembangkan antara Presiden Soeharto dan Whitlam tidak lagi dikembangkan dalam Pemerintah Fraser.⁵⁴ Fraser cenderung membelokkan kembali orientasi politik luar negeri Australia ke Eropa dan Amerika Serikat dan memandang Asia Tenggara sebagai kawasan yang kurang penting.⁵⁵

Dalam perdebatan mengenai masalah Timor Timur di komite dekolonisasi bulan September 1976, delegasi Australia di PBB mengambil sikap diam. Menteri Luar Negeri Peacock bahkan tidak menyinggung soal Timor Timur dalam pidatonya di muka Sidang Umum PBB tanggal 29 September 1976.⁵⁶ Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Fraser memang mengadakan pembicaraan pada bulan Oktober 1976. Tetapi, seperti yang ditulis oleh Whitlam,

⁵¹Hasting, "The Timor Problem I," hal. 19.

⁵²Untuk diskusi lebih lanjut tentang persoalan Irian Barat dalam hubungan Australia-Indonesia lihat misalnya Hasting, "Timor and West Irian," hal 710-718; Whitlam, "Indonesia and Australia," hal. 756-758; Renouf, *The Feighthened*, hal. 400-431; Muthalib, "Indonesia dan Pasifik Barat Daya," hal. 3-6.

⁵³Hasting, "The Timor Problem I," hal. 19.

⁵⁴Bulan September 1976 Adam Malik mengatakan bahwa "... keakraban pribadi lebih bermanfaat daripada keakraban yang dijalin lewat jalur formal. Indonesia memiliki hubungan semacam ini dengan Whitlam." Malik menyebut hubungan itu sebagai "diplomasi batik." Nichterlein, "Australia: Courtier," hal. 48. Lihat juga Muthalib, "Indonesia dan Pasifik Barat Daya," hal. 693.

⁵⁵Muthalib, "Indonesia dan Pasifik Barat Daya," hal. 693.

⁵⁶Nichterlein, "Australia: Courtier," hal. 49.

Australia tidak mencatat pembicaraan itu,⁵⁷ sehingga pemerintah Australia memendam persoalan Timor Timur, sekalipun Pemerintah Fraser pada akhirnya mengakui secara *de facto* integrasi Timor Timur dengan Indonesia.

Masalah Timor Timur dipersoalkan lagi sejak berkuasanya Buruh di Australia di bawah Perdana Menteri Hawke, tahun 1983. Kemenangan Buruh menimbulkan tanda tanya mengenai masa depan hubungan Australia-Indonesia oleh karena sikapnya yang kurang bersahabat dengan Indonesia seperti terlihat dalam usahanya untuk mementahkan persoalan Timor Timur. Dalam programnya yang diterima pada kongres Juli 1982, Partai Buruh menentang dan menolak pengakuan atas integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Hawke malahan pernah mengatakan: "Kita sama sekali tidak bisa melenyapkan atau menghapuskan apa yang terjadi di masa lalu."⁵⁸ Oleh sebab itu kunjungan Menteri Luar Negeri Hayden ke Jakarta bulan Juni 1983 diduga untuk menjelaskan sikap Australia mengenai Timor Timur. Tetapi sampai saat itu Australia belum menunjukkan sikap resmi ataupun memperlakukan program Partai Buruh sebagai sikap resmi Pemerintah Australia.

Kecenderungan itu terlihat lagi dalam salah satu pernyataan Hayden di Jakarta. Atas nama Pemerintah Australia ia mencatat bahwa Indonesia telah memasukkan Timor Timur dalam Indonesia tetapi menyatakan keprihatinan yang mendalam bahwa suatu tindakan penentuan nasib sendiri yang diawasi secara internasional belum terjadi di Timor Timur. Ini merupakan istilah diplomatik yang tidak menolak atau mengakui kebijakan pengakuan pemerintah sebelumnya. Secara terus terang Hayden juga mengakui perbedaan yang ada antara kedua negara.⁵⁹

Dalam kunjungannya ke Jakarta awal Juni 1983, Hawke mengeluarkan pernyataan yang lebih realistis tentang Timor Timur. Ia menyatakan bahwa Australia memahami apa yang terjadi di Timor Timur dan berusaha meningkatkan pengertian rakyatnya, khususnya kalangan Partai Buruh, mengenai keadaan di Timor Timur. Pernyataan Hawke ini menimbulkan reaksi tajam dari kalangan kiri dalam Partai Buruh yang menuduh Hawke telah menyimpang dari kebijakan luar negerinya yang ditetapkan oleh Partai Buruh dalam kongres tahun 1982.

Usaha Australia untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia terus dilakukan. Hal ini terutama terlihat pada konperensi nasional Partai Buruh

⁵⁷Whitlam, "Indonesia and Australia," hal. 763.

⁵⁸Ronald Nangoi, "Menerobos Kesulitan Hubungan Australia-Indonesia," *Suara Karya*, 3 Juni 1983.

⁵⁹*Kompas*, 8 April 1983.

Australia ke-36 tahun 1984. Dalam perdebatan mengenai program politik baru Partai Buruh kelompok Hayden-Hawke berhasil memenangkan suatu resolusi yang nadanya lebih lunak daripada program politik sebelumnya (1982). Dalam resolusi baru itu, yang diterima melalui pemungutan suara 55 berbanding 43, tuntutan untuk melaksanakan hak menentukan nasib sendiri di Timor Timur dan penyesalan atas integrasi wilayah itu dengan Indonesia berhasil dihapuskan.

Pemerintah Hawke, mungkin didesak oleh keinginannya untuk mencegah kemungkinan timbulnya ketegangan di masa depan dalam hubungan Australia-Indonesia, akhirnya pada tahun 1985 mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur.⁶⁰ Hawke telah melangkah lebih jauh dari kebijakan resmi Partai Buruh tentang Timor Timur.

⁶⁰*The Jakarta Post*, 20, 22, 23 Agustus 1985; *Kompas*, 24 Agustus 1985.

''Timor Gap'' dalam Penetapan Batas-batas Landas Kontinen Indonesia-Australia

Asnani USMAN*

Sampai saat ini Indonesia dan Australia telah menghasilkan beberapa persetujuan dan ''memorandum of understanding'' mengenai penetapan batas-batas landas kontinen dan perairan kedua negara. Tetapi beberapa masalah penetapan batas landas kontinen dan perairan lainnya masih dibahas dalam perundingan-perundingan kedua negara yang dimulai kembali pada tahun 1979. Perundingan ke-7 yang berlangsung pada tanggal 25-26 Oktober 1985 di Canberra yang lalu berakhir tanpa menghasilkan suatu persetujuan.

Perbedaan prinsip mengenai penetapan batas maritim yang timbul di antara kedua negara belum berhasil diatasi untuk mencapai suatu kompromi yang dapat diterima kedua pihak. Timbulnya perbedaan prinsip yang disebabkan ''keadaan-keadaan khusus'' dalam masalah penetapan batas-batas tersebut telah menjadi rintangan bagi tercapainya persetujuan bersama.

Selain faktor teknis, faktor lain yang menjadi hambatan adalah faktor ekonomis dan politis. Dari segi ekonomi, potensi kekayaan alam yang sangat besar di wilayah perbatasan dasar laut tersebut dapat menjadi hambatan tercapainya persetujuan kedua negara. Di lain pihak hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong kedua negara untuk terus mengadakan perundingan-perundingan. Dari segi politik latar belakang hubungan kedua negara turut mempengaruhi perundingan dan tercapainya persetujuan, khususnya yang menyangkut masalah Timor Timur.

PERSETUJUAN-PERSETUJUAN 1971 DAN 1972

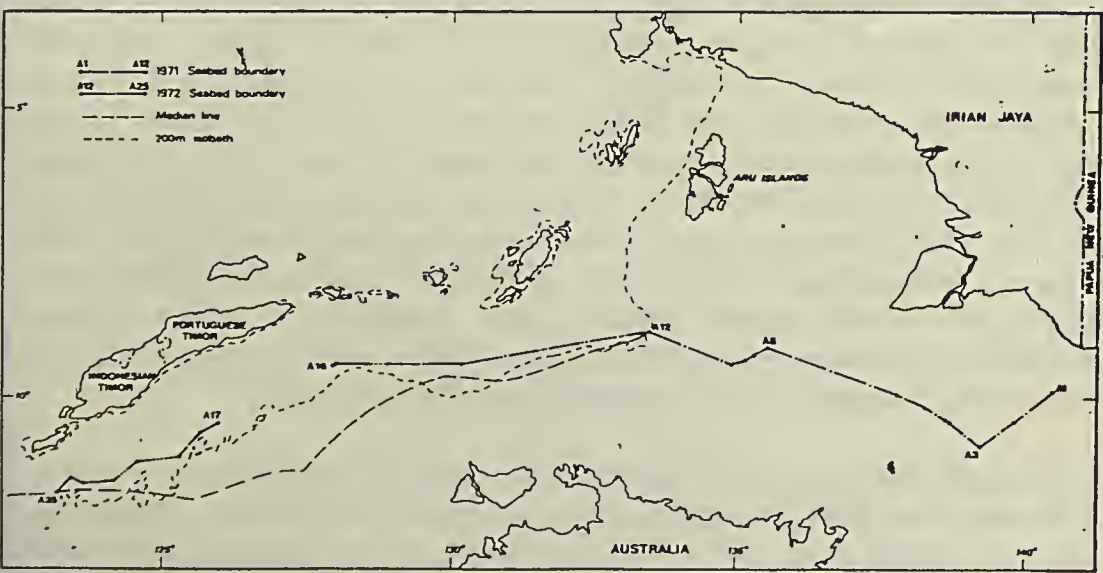
Batas-batas wilayah baik air maupun dasar laut Indonesia dan Australia memanjang dari sebelah selatan Pulau Irian sampai ke sebelah selatan Pulau

*Staf CSIS.

Roti (Pulau Christmas jauh terpisah di bagian selatan Pulau Jawa). Persetujuan-persetujuan yang telah dicapai pada tahun 1971 dan 1972 baru meliputi sebagian dari batas-batas kedua negara.

Dalam persetujuan pertama antara Indonesia dan Australia yang ditandatangani pada tanggal 18 Mei 1971 di Canberra telah ditetapkan batas-batas dasar laut tertentu di depan pantai selatan Pulau Irian/Papua Nugini di Laut Arafura, yaitu garis-garis yang menghubungkan titik-titik A₁ - A₁₂ (lihat Gambar 1). Tidak ada masalah yang timbul dalam usaha mencapai persetujuan ini, karena garis batas yang ditarik dari titik A₃ - A₁₂ melintasi landas kontinen yang berlanjut, dangkal, dan sama (a continuous, shallow, uniform continental shelf). Kedua negara mempunyai pandangan yang sama mengenai hal ini dan menyetujui prinsip garis tengah diterapkan dalam penetapan batas landas kontinen kedua negara.¹

Gambar 1



Sumber: J.R.V. Prescott, *Australia's Maritime Boundaries*, Canberra Studies in World Affairs no. 16 (Canberra, Departement of International Relations, ANU, 1985).

Pada tanggal 9 Oktober 1972 di Jakarta ditandatangani persetujuan kedua oleh Indonesia dan Australia sebagai persetujuan tambahan pada persetujuan pertama di atas. Dalam persetujuan ini ditetapkan batas-batas dasar laut tertentu yang merupakan garis-garis batas yang terpisah. Di bagian barat Laut

¹Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri Deplu, *Wawasan Nusantara*, Jilid II (Jakarta: Deplu, 1977), hal. 50-51; J.R.V. Prescott, *Australia's Maritime Boundaries*, Canberra Studies in World Affairs no. 16 (Canberra: Department of International Relations, the Australia National University, 1985), hal. 104.

Arafura, yaitu di sebelah selatan Kepulauan Tanimbar, ditetapkan garis batas yang dimulai dari titik A_{12} yang menghubungkan titik-titik A_{13} - A_{16} , sedangkan di bagian barat Laut Timor, yaitu di sebelah selatan Pulau Timor Barat dan Roti ditetapkan garis batas yang menghubungkan titik-titik A_{17} - A_{25} (lihat Gambar 1).

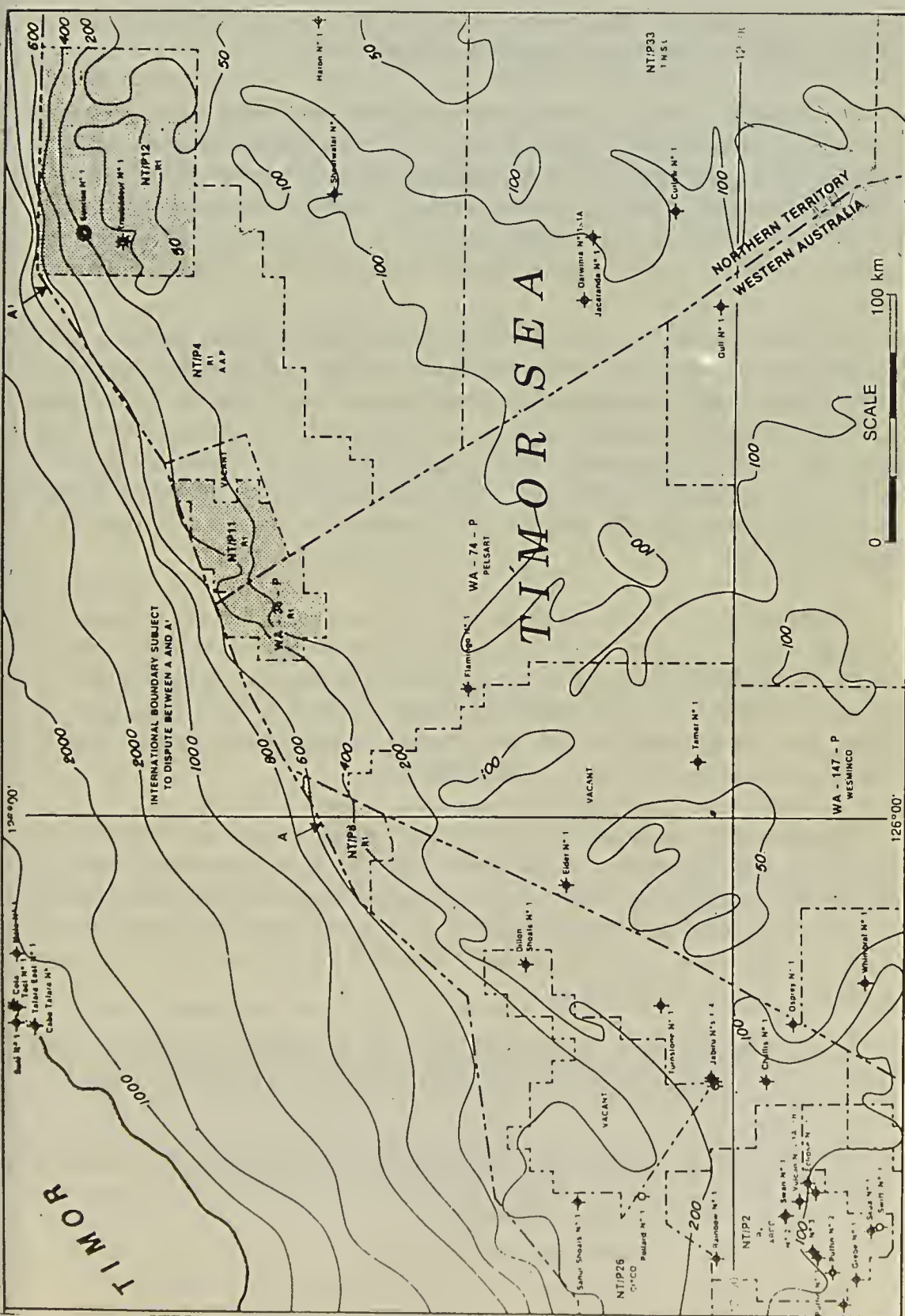
Landas kontinen yang dilintasi oleh garis batas dalam persetujuan kedua ini sangat berbeda bentuknya dari dasar laut yang berada di sebelah timur titik A_{12} (persetujuan pertama). Perbedaan landas kontinen tampak dengan adanya landas kontinen yang dangkal dan luas yang berbatasan dengan pantai Australia, sedangkan landas kontinen yang sempit dan dalam berbatasan dengan Pulau Timor (Indonesia). Di antaranya terdapat "Timor Trough" (Parit Timor) yang mempunyai kedalaman maksimal sekitar 3.000 m. Parit ini berada 300 mil di sebelah utara Darwin dan 60 mil di sebelah selatan Pulau Timor.²

Hal inilah yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat antara Indonesia dan Australia mengenai penetapan batas landas kontinen di wilayah dasar laut ini. Australia menyatakan bahwa ada dua landas kontinen di antara Indonesia dan Australia yang dipisahkan oleh Parit Timor. Bagian selatan yang lebih luas adalah landas kontinen Australia dan bagian utara yang sempit adalah landas kontinen Indonesia. Australia menganggap bahwa sumbu (axis) dari Parit Timor merupakan garis batas landas kontinen kedua negara. Tetapi Indonesia menyatakan hanya ada satu landas kontinen dan Parit Timor seharusnya tidak diperhitungkan karena hanya merupakan cekungan (depresi) pada landas kontinen tersebut. Oleh karena itu garis batas harus ditetapkan dengan garis tengah di antara landas kontinen kedua negara.³

Australia sebelumnya sudah memberikan konsesi-konsesi kepada perusahaan-perusahaan minyak asing untuk beroperasi di daerah yang terletak lebih jauh dari kedalaman air 200 m. Hal ini didasarkan pada tuntutan landas kontinen Australia yang sesuai dengan Konvensi Jenewa 1958 mengenai landas kontinen. Dalam Pasal 1 Konvensi ini dinyatakan bahwa landas kontinen adalah dasar dan lapisan tanah bagian bawah di bawah laut yang berbatasan dengan pantai tetapi berada di luar daerah laut teritorial sampai sedalam 200 m

²Prescott, *Australia's Maritime*, hal. 104; lihat juga Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut* (Jakarta: Penerbit Binacipta, 1979), hal. 168; Michael Richardson, "Drawing the Seabed Line," *FEER*, 10 Maret 1978, hal. 81.

³Mark J. Valencia and St. Munadjat Danusaputro, "Indonesia: Law of the Sea and Foreign Policy Issues," *Indonesian Quarterly*, vol. XII, no. 4 (October 1984): hal. 466; P.G. Bassett, "Australia's Maritime Boundaries," *Australian Foreign Affairs Record*, vol. 55, no. 3 (March 1984): hal. 186.



Sumner: Woodside Petroleum Ltd. (Melbourne).

atau daerah yang lebih dalam lagi di mana dalam lautnya memungkinkan eksplorasi sumber-sumber alam daerah-daerah tersebut.⁴

Oleh karena itu Australia menentang prinsip garis tengah yang ditetapkan Indonesia, karena garis tengah tersebut ada yang melintasi daerah-daerah dangkal yang kedalaman airnya kurang dari 200 m di sebelah pantai Australia dan akan mengambil bagian-bagian tertentu landas kontinennya (lihat Gambar 2). Australia tidak ingin daerah konsesi yang telah diberikannya pada perusahaan minyak asing di wilayah ini akan menjadi bagian wilayah Indonesia.

Akhirnya kompromi yang diterima menetapkan bahwa Australia mendapat landas kontinennya sampai kedalaman air 200 m diukur dari pantainya, sedangkan Indonesia mendapatkan hampir seluruh parit tersebut dan sebagian dasar laut dangkal yang terletak di luar kedalaman air 200 m dari pantai Australia.⁵ Persetujuan ini telah mengakibatkan 3/4 landas kontinen di wilayah perbatasan ini berada di bawah Australia. Hal ini menyebabkan Australia memperoleh 20.800 mil laut², sedangkan Indonesia kurang lebih mendapat 3.000 mil laut² dari wilayah dasar laut kedua negara.⁶

Selain itu dalam persetujuan ini dimuat pasal-pasal mengenai ketentuan wilayah-wilayah konsesi asing yang diizinkan Australia sebelumnya. Pemerintah Indonesia bersedia menawarkan dan merundingkan izin eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas alam bagi wilayah-wilayah konsesi yang jatuh ke dalam wilayah Indonesia karena persetujuan di atas, sesuai dengan kontrak pembagian produksi menurut hukum Indonesia.⁷

Dicapainya persetujuan garis-garis batas di sektor barat dan timur di atas dirasakan perlu oleh kedua negara pada waktu itu karena kehadiran Portugis di Timor Timur.⁸ Batas-batas yang jelas perlu ditetapkan oleh kedua negara untuk menghindarkan konflik, terutama dengan adanya wilayah-wilayah konsesi asing yang telah diberi izin oleh salah satu pihak, dan kehadiran negara ketiga, yaitu Portugis.

Berbeda dengan Indonesia, antara Australia dan Portugis belum tercapai persetujuan mengenai penetapan batas landas kontinen di wilayah yang ber-

⁴Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Wawasan Nusantara dan Hukum Laut Indonesia*, Jilid II (Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Masalah Luar Negeri, 1976), hal. 75.

⁵Djalal, *Perjuangan Indonesia*, hal. 169-170.

⁶Preseott, *Australia's Maritime*, hal. 105.

⁷Litbang Deplu, *Wawasan*, hal. 57.

⁸Preseott, *Australia's Maritime*, hal. 105.

ada antara garis-garis batas bagian timur dan barat di atas, yang kemudian dikenal dengan "Timor Gap." Karena landas kontinen di Timor Gap ini sama dengan landas kontinen di sebelah timur dan baratnya, maka perbedaan prinsip yang timbul dalam penetapan batas antara Australia dan Portugal adalah sama dengan masalah yang timbul dalam penetapan batas landas kontinen Indonesia dan Australia dalam persetujuan bulan Oktober 1972. Bahkan Portugal pada tahun 1974 bertindak lebih jauh dengan memberi izin konsesi kepada perusahaan minyak AS, Oceanic Exploration Company of Dencer, sampai pada garis tengah yang dituntutnya.⁹

Australia memprotes tindakan ini karena izin tersebut memotong wilayah konsesi berbagai perusahaan minyak yang diberi izin oleh Australia sampai pada garis batas yang dituntutnya, yaitu Parit Timor. Masalah penetapan batas landas kontinen Timor Gap ini belum dapat diselesaikan antara Portugal dan Australia sampai Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1976. Dengan demikian penetapan batas landas kontinen di Timor Gap tersebut telah menjadi masalah antara Indonesia dan Australia.

PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN INDONESIA DAN AUSTRALIA

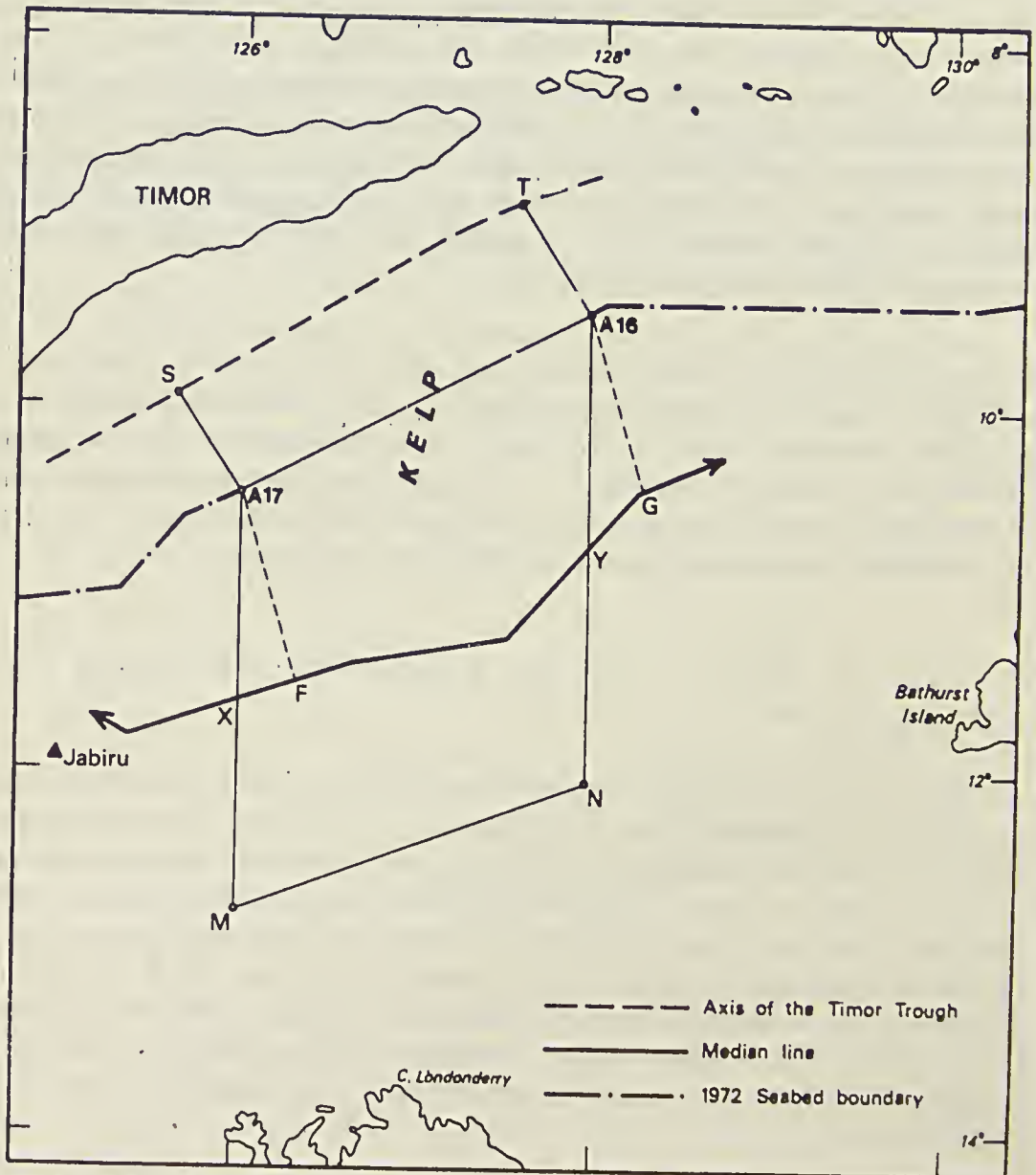
Perundingan mengenai penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia mengenai Timor Gap dimulai sejak tahun 1979. Di samping masalah ini, dibahas masalah-masalah batas maritim lainnya yang merupakan satu paket, yaitu di sektor barat (sebelah barat Pulau Timor); di antara Pulau Christmas dan Pulau Jawa, dan garis batas yurisdiksi perikanan, khususnya di Laut Timor dan sektor barat. Sejauh ini telah diadakan tujuh kali perundingan, yaitu perundingan pertama tanggal 14 Februari 1979; ke-2 tanggal 22-26 Mei 1979; ke-3 bulan November 1980; ke-4 bulan Oktober 1981; ke-5 bulan Februari 1984; ke-6 bulan November 1984; ke-7 tanggal 25-26 Oktober 1985.

Dalam penetapan batas landas kontinen di Timor Gap telah timbul perbedaan prinsip antara Indonesia dan Australia yang sama seperti yang timbul dalam persetujuan 1972 atau sama dengan perbedaan prinsip antara Australia dan Portugal. Australia menginginkan agar garis batas yang "menjembatani" Timor Gap merupakan garis yang kurang lebih lurus yang menghubungkan garis-garis batas yang telah disetujui dalam tahun 1972. Sebaliknya Indonesia menginginkan garis tengah sebagai batas landas kontinen kedua negara (lihat Gambar 3).¹⁰

⁹Richardson, "Drawing," hal. 81.

¹⁰*Ibid.*

Gambar 3



Sumber: J.R.V. Prescott, *Ibid.*

Indonesia tidak menerima posisi Australia tersebut, karena dalam pandangannya hasil persetujuan yang lalu lebih memuaskan Australia. Dengan luas landas kontinen 20.800 mil laut² yang diperoleh Australia dan hanya 3.000 mil laut² yang dimiliki Indonesia, wajar Indonesia tidak puas dengan persetujuan yang lalu. Hal ini tercermin dari apa yang dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa Indonesia telah dirugikan (was taken to the cleaners) pada waktu yang lalu dan Indonesia mengharapkan suatu persetujuan yang lebih baik pada waktu sekarang ini.¹¹

¹¹Prescott, *Australia's Maritime*, hal. 116.

Dalam pandangan Indonesia, seperti yang dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja, garis tengah adalah penyelesaian yang adil karena ketentuan baru yang dimuat dalam Konvensi Hukum Laut Baru 1982, yang telah ditandatangani oleh Australia dan Indonesia, telah melepaskan ketentuan lama landas kontinen Konvensi Jevewa 1958 yang menjadi dasar persetujuan sebelumnya. Posisi Indonesia didasarkan kepada hukum yang ada pada saat ini, yaitu Konvensi Hukum Laut Baru.¹²

Dalam ketentuan mengenai landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut Baru (Bab VII, Pasal 76) antara lain dinyatakan bahwa landas kontinen adalah dasar laut dan tanah lapisan bawah di bawah laut yang memanjang (meluas) di luar laut teritorial sepanjang kepanjangan alamiah dasar laut sampai kepada batas luar landas kontinen (the outer edge of the continental margin), atau suatu jarak 200 mil laut dari garis dasar di mana lebar laut teritorial diukur, jika batas luar landas kontinen tidak sampai kepada jarak tersebut.¹³ Dengan berpegang kepada ketentuan ini, landas kontinen Indonesia adalah sejauh 200 mil laut dan karena luas landas kontinen kedua negara kurang dari 400 mil laut, maka adalah "adil" jika dalam penetapan batas itu ditentukan garis tengah.

Australia tidak menerima pandangan ini dan berpendapat bahwa konsep kepanjangan alamiah landas kontinen itu ditetapkan secara jelas dalam Pasal 76 dan sesungguhnya diberi prioritas utama (diutamakan). Dari kedua pandangan ini ternyata antara Indonesia dan Australia terdapat perbedaan dalam menginterpretasi ketentuan landas kontinen tersebut.

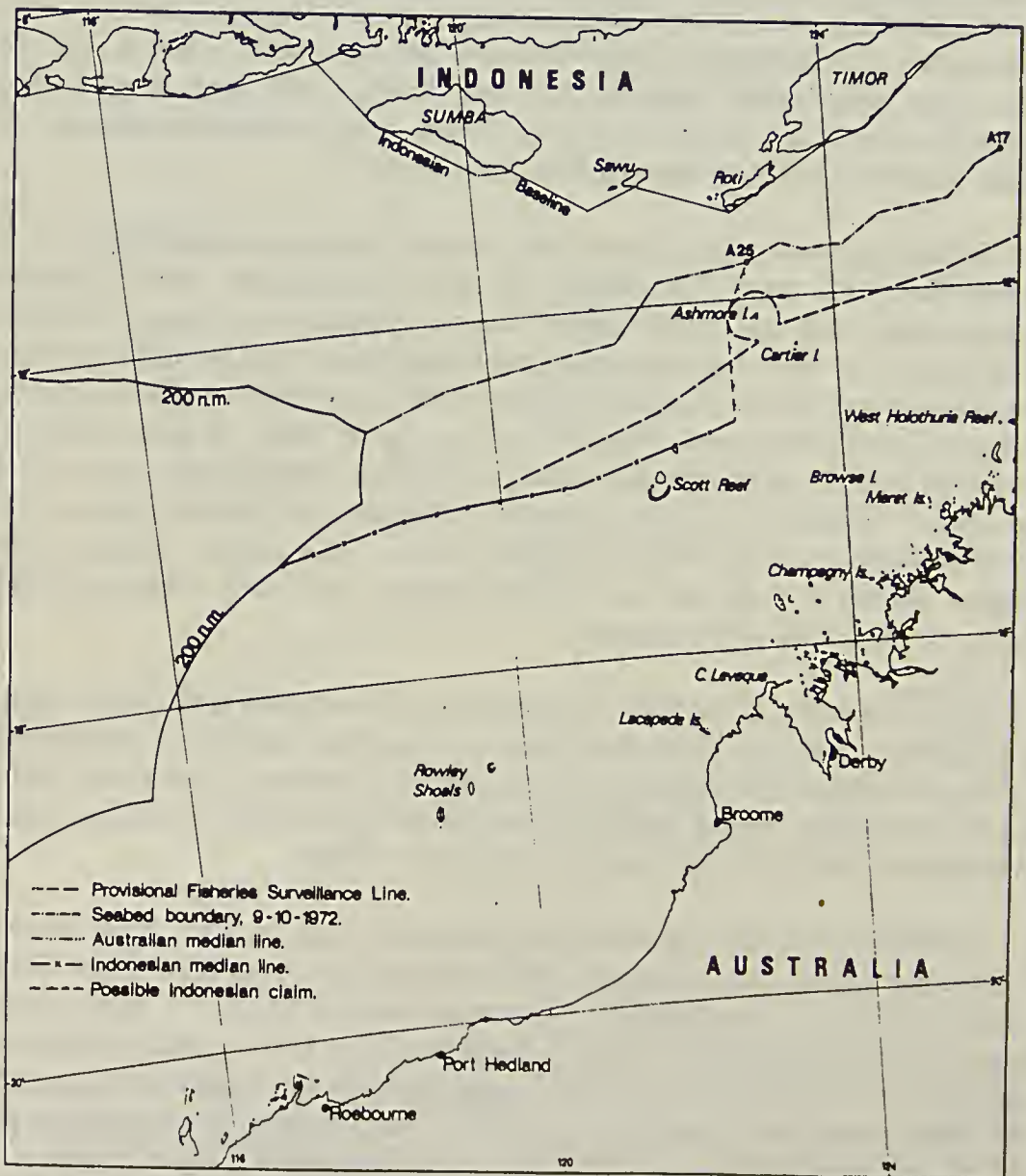
Perbedaan pendapat antara kedua negara ini juga muncul dalam masalah penetapan batas landas kontinen di sektor barat (sebelah barat Laut Timor) yang disebabkan oleh adanya "keadaan-keadaan khusus," yaitu adanya pulau-pulau Ashmore Reef, Cartier, Scott Reef, dan Browse yang terletak jauh dari pantai Australia, tetapi dekat dengan pulau-pulau Indonesia. Dalam hal ini kedua pihak setuju untuk menggunakan garis tengah, tetapi berbeda pendapat mengenai dari mana dimulainya penarikan garis tengah tersebut. Indonesia menginginkan bahwa garis tengah merupakan garis jarak sama jauh antara garis-garis dasar titik-titik terluar pulau-pulau Indonesia (archipelagic baselines) dan pantai-pantai Australia. Sebaliknya Australia menyatakan bahwa garis tengah harus ditarik atau ditetapkan antara titik-titik terluar pulau-pulau Indonesia dan pantai-pantai keempat pulaunya (Ashmore Reef, Cartier, Scott Reef, Browse)¹⁴ (lihat Gambar 4).

¹²Richardson, "Timor Gap Riff Remains," *FEER*, vol. 124, 19 April 1984, hal. 41.

¹³A/CONF.62/122, 7 Oktober 1982, hal. 116.

¹⁴J. Valencia and Danusaputro, "Law of the Sea ...," hal. 466.

Gambar 4



Sumber: *Ibid.*

Mengenai penetapan batas landas kontinen antara Pulau Christmas dan Pulau Jawa, Australia mungkin bersedia menyetujui suatu garis yang mengikuti batas-batas pulau (insular margin). Tetapi yang dipersoalkan oleh Indonesia adalah apakah Pulau Christmas mempunyai hak atas sumber-sumber kekayaan alam landas kontinen, karena pulau ini terletak dalam wilayah 200 mil laut Indonesia dan jauh terpencil dari benua Australia.¹⁵

¹⁵*Ibid.*, hal. 469; *Kompas*, 8 Februari 1984.

Selain masalah penetapan batas landas kontinen, Indonesia dan Australia harus mengadakan penetapan batas yurisdiksi perikanan kedua negara sehubungan dengan diumumkannya Wilayah Perikanan Australia seluas 200 mil laut pada tanggal 1 November 1979 di satu pihak, dan Pengumuman Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil laut Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 di lain pihak. Sebelum mengeluarkan Pengumuman Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil lautnya, Indonesia sudah khawatir dengan Pengumuman Wilayah Perikanan Australia tersebut, karena dalam menentukan Wilayah Perikannya di daerah sektor barat, Australia menetapkan garis dasarnya dari keempat pulau di atas. Akibat penarikan garis dasar seperti ini, garis tengah yang ditarik dari garis batas tersebut akan terletak jauh dari pantai Australia, dan dekat dengan pantai Indonesia. Ternyata posisi Australia dalam penetapan batas yurisdiksi perikanan ini sama halnya dengan penetapan batas landas kontinen kedua negara.

Gambar 5



Sumber: *Ibid.*

Tetapi masalah ini untuk sementara dapat diatasi dengan ditandatangani "memorandum of understanding" mengenai yurisdiksi perikanan kedua negara dalam perundingan ke-4 tanggal 27-29 Oktober 1981. Dalam memorandum ini ditetapkan garis batas wilayah perikanan sementara di antara kedua negara yang menghubungkan titik-titik 1-44 (lihat Gambar 5). Selanjutnya disebutkan bahwa kedua pihak menyetujui suatu pengaturan sementara

mengenai pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan pada garis batas perikanan sementara kedua negara di Laut Timor dan sektor barat. Berdasarkan pengaturan sementara itu masing-masing pihak tidak akan melakukan tindakan-tindakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kapal-kapal ikan yang telah memperoleh izin untuk beroperasi di luar garis sementara tersebut. Dikemukakan juga bahwa garis batas sementara ini tidak akan merugikan garis batas sebenarnya yang akan disetujui oleh kedua negara di masa mendatang. Terakhir disebutkan bahwa memorandum ini tidak akan mempengaruhi penangkapan ikan secara tradisional (*traditional fishing*) yang dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia yang telah ditetapkan batasan-batasannya dalam "memorandum of understanding" kedua negara pada tanggal 6-7 November 1974 di Jakarta.¹⁶

Berbeda dengan perundingan mengenai masalah penetapan batas wilayah perikanan yang tampaknya lebih mudah menghasilkan persetujuan sementara yang memungkinkan kedua pihak dapat melaksanakan yurisdiksi perikanan di wilayah perbatasan kedua negara, masalah penetapan batas landas kontinen kedua negara lebih sulit. Hal ini disebabkan selain oleh ciri landas kontinen yang rumit, juga oleh faktor ekonomis berupa potensi kekayaan minyak dan gas alam yang sangat potensial di landas kontinen tersebut, terutama wilayah Timor Gap. Aspek politik yang menyangkut hubungan kedua negara turut mempengaruhinya.

ASPEK EKONOMI DAN POLITIK

Karena potensi kekayaan alam itu, Timor Gap merupakan prioritas utama dalam paket perundingan penetapan batas-batas maritim antara Indonesia dan Australia. Wilayah dasar laut Timor Gap yang meliputi Timor Basin dan Bonaparte Gulf Basin (lihat Gambar 6) merupakan salah satu dari dua lusin ladang minyak terbesar di dunia.¹⁷

Timor Gap telah menarik perhatian ahli geologi dan minyak, karena merupakan suatu struktur karang yang berbentuk kubah luas, yang disebut Kelp (Kelp Structure). Perkiraan yang paling berhati-hati mengenai cadangan minyak di kelp ini sekitar 500 juta barel, bahkan menurut perkiraan yang lebih optimis, cadangan tersebut dapat mencapai 5 milyar barel. Sedangkan cadangan gas alam diperkirakan mencapai 50.000 milyar kaki kubik. Walaupun penilaian ini hanya berdasarkan analisa seismis, Kelp merupakan ladang minyak terbesar yang kedua dan salah satu dari 25 ladang minyak terbesar di

¹⁶Richardson, "Timor Gap," hal. 41.

¹⁷*Ibid.*

dunia. Perkiraan ini akan membuat cadangan minyak Australia menjadi tiga kali lipat lebih besar dari cadangan minyaknya yang tinggal sekitar 1,85 milyar.¹⁸

Di samping itu menurut penelitian Konsortium The Broke Hill Proprietary Company (BHP), di wilayah Jabiru (Jabiru Field) terdapat 250 juta barel minyak yang dapat diperoleh lagi. Wilayah Jabiru ini terletak sekitar 200 km dari Timor Gap dan merupakan bagian dari ladang minyak baru besar yang meluas sampai ke bagian Laut Timor, termasuk wilayah sengketa Indonesia dan Australia. Sehubungan dengan ini Menteri Federal Sumber-sumber Alam dan Energi, Sen Peter Walsh menyatakan bahwa Biro Sumber-sumber Mineral mengharapkan lebih jauh penemuan minyak tidak saja diperoleh di Jabiru (di Bonaparte Basin), tetapi juga wilayah-wilayah yang berdekatan dengan wilayah yang geologinya sama. Dikemukakan juga bahwa hal ini berarti Australia hampir dapat mencukupi kebutuhan sendiri minyaknya menjelang awal tahun 1990.¹⁹

Dengan demikian apa yang dipertaruhkan dalam perundingan-perundingan antara Indonesia dan Australia mempunyai potensi besar. Oleh karena itu tidak mengherankan jika potensi kekayaan minyak dan gas alam yang terdapat di wilayah Timor Gap ini dapat menjadi hambatan tercapainya persetujuan, karena suatu persetujuan penetapan batas berarti penentuan besar-kecilnya porsi kekayaan minyak dan gas alam kedua negara.

Penerapan garis tengah akan memotong pusat Bonaparte Gulf Basin menjadi 2/3 dari dasar laut Bonaparte ini jatuh ke wilayah Australia, dan 1/3 menjadi wilayah Indonesia, sedangkan Timor Basin seluruhnya jatuh ke dalam wilayah Indonesia. Di lain pihak, penarikan garis "kurang lebih lurus" yang menjembatani garis-garis batas yang ada akan menempatkan keseluruhan Bonaparte Gulf Basin menjadi wilayah Australia, dan sebagian Timor Basin termasuk di dalamnya. Beberapa pemegang kontrak Australia berada di luar garis tengah, seperti Tricentrol (1980), WP 2 (Woodside 2), dan MES (Mesa Australia)/WAP (West Australia). Sedangkan WP 2 dan The Aquitaine meluas sampai kepada "garis yang menjembatani" Timor Gap (lihat Gambar 3 dan 6).²⁰ Dengan demikian perusahaan-perusahaan minyak yang berada dalam wilayah yang masih dipersengketakan ini harus menunda segala kegiatan eksplorasi sementara menunggu hasil perundingan landas kontinen kedua negara selesai.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

Oleh karena itu tidak mengherankan jika potensi kekayaan alam yang terkandung di Timor Gap dapat menghambat tercapainya persetujuan bersama. Tetapi di lain pihak faktor ini dapat mendorong diadakannya perundingan-perundingan kedua negara untuk mencapai persetujuan landas kontinen tersebut. Hal ini terlihat dari dimulainya kembali perundingan antara Indonesia dan Australia pada tahun 1984 yang bisa jadi disebabkan oleh tekanan-tekanan dari perusahaan-perusahaan minyak dan dari negara bagian Australia Barat dan Utara terhadap Pemerintahan Partai Buruh di bawah Perdana Menteri Bob Hawke untuk mencari penyelesaian atas persengketaan dasar laut kedua negara yang berlarut-larut sejak tahun 1979 dan terhenti tahun 1981. Kebutuhan Pemerintah Bob Hawke untuk menyelesaikan penetapan batas landas kontinen tersebut makin mendesak ketika ditemukannya minyak di Jabiru Field oleh Konsorsium BHP di atas pada akhir tahun 1983.²¹

Di samping itu, faktor lain yang tidak kurang pentingnya ikut mempengaruhi masalah penetapan batas-batas landas kontinen kedua negara, terutama di Timor Gap adalah faktor politik yang menyangkut hubungan kedua negara. Sikap Australia terhadap integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia telah menimbulkan "ketegangan-ketegangan" dalam hubungan kedua negara dan merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan perundingan tercapainya persetujuan. Sejak integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia tahun 1976, baru pada tahun 1979 dimulai perundingan penetapan batas-batas landas kontinen kedua negara, yaitu setelah Pemerintah Partai Liberal di bawah Perdana Menteri Fraser mengakui integrasi Timor Timur dengan Indonesia pada tanggal 21 Januari 1978.²² Sejak tahun 1979 sampai 1981 telah diadakan empat kali perundingan.

Ketika Partai Buruh berhasil memenangkan pemilihan umum dalam tahun 1983, masalah Timor Timur dipersoalkan kembali yang dinyatakan dalam programnya antara lain menuntut Pemerintah Hawke mendesak Indonesia untuk melakukan suatu penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur, mengurangi bantuan militer sampai pasukan Indonesia ditarik dari Timor Timur dan mengubah sikap Australia terhadap masalah Timor Timur di PBB.²³ Program partai inilah yang menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam hubungan Indonesia dan Australia. Oleh karena itu tidak mengherankan jika perundingan penetapan batas-batas landas kontinen kedua negara menjadi tertunda pada saat itu, dan baru dilanjutkan kembali pada tahun 1984.

²¹*Ibid.*

²²Lihat Alfian Muthalib, "Indonesia dan Pasifik Barat Daya; Selandia Baru dan Papua Nugini," *Analisa* (8 Agustus 1985): hal. 694.

²³"Hawkish Over Timor But Dovish on Cambodia," *FEER*, 17 Maret 1983, hal. 12.

Sebenarnya dilanjutkannya kembali perundingan tahun 1984 tidak saja disebabkan oleh tekanan perusahaan-perusahaan minyak di atas, tetapi juga tidak terlepas dari perkembangan sikap dalam Pemerintahan Buruh di Australia mengenai masalah Timor Timur. Perubahan penting terjadi dalam Konferensi Nasional Partai Buruh dalam bulan Juli 1984 dengan munculnya kelompok kiri tengah, yaitu kelompok yang bersikap lunak mengenai masalah Timor Timur. Keberhasilan Hawke membangun kekuatan kelompok ini dengan kelompok sayap kanan untuk melawan suara kelompok sayap kiri yang bersikap keras terhadap masalah integrasi Timor Timur, telah menghasilkan suatu resolusi yang mengakui penggabungan Timor Timur dengan Indonesia melalui pemungutan suara 55 berbanding 43.²⁴ Pada bulan Agustus 1985 sikap ini dipertegas dengan pernyataan Perdana Menteri Robert Hawke dalam wawancara televisi Indonesia yang mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur.

Seiring dengan perkembangan di atas, tampak pula ada pergeseran sikap dalam perundingan penetapan batas landas kontinen kedua negara. Australia telah mengusulkan gagasan "a joint exploitation zone" (zona eksploitasi bersama) dalam perundingan ke-6 bulan November 1984. Gagasan ini menyebutkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di dasar laut wilayah perbatasan kedua negara dilakukan secara bersama melalui pembentukan suatu "joint authority" (badan otorita bersama) antara perusahaan-perusahaan tambang minyak dan gas bumi kedua negara. Diusulkan juga oleh Australia bahwa pemanfaatan dan pengelolaan bersama ini hanya meliputi wilayah dasar laut yang dipersengketakan yang mempunyai potensi kekayaan minyak yang besar, dan tidak meliputi seluruh wilayah sengketa.²⁵

Dalam perundingan ke-7 tanggal 25-26 Oktober 1985 yang lalu gagasan tersebut dibicarakan kembali mengenai bagaimana zona eksploitasi bersama itu seharusnya diatur, sifat kedaulatannya, dan bagaimana pendapatan dari pengelolaan minyak itu dibagi, serta apakah diperlukan badan otoritas bersama. Hasil pembicaraan kedua negara ini berakhir dengan dikeluarkannya suatu komunike yang antara lain menegaskan bahwa kedua pihak menyetujui rencana kerjasama kedua negara dalam mengelola wilayah dasar laut yang dipersengketakan jika garis batas sudah disepakati kedua negara.²⁶

Dengan demikian walaupun persetujuan garis batas kedua negara belum disepakati, persetujuan mengenai pengelolaan bersama merupakan kemajuan yang penting dari perundingan-perundingan selama ini. Masalah ini telah

²⁴Jacqueline Rees, "Saving Hawke's Bacon," *FEER*, 26 Juli 1984, hal. 34.

²⁵Richardson, "Bridging the Gap," *FEER*, 13 Desember 1984.

²⁶*Kompas*, 26 Oktober 1985.

menjadi salah satu pokok pembicaraan baik dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Mochtar dan Menteri Luar Negeri Bill Hayden pada pertengahan Desember 1985 di Australia, maupun dalam pertemuan kedua Menteri Luar Negeri pada awal Maret 1986 di Jakarta.²⁷ Selain itu penjelasan Bill Hayden mengenai persiapan ke arah usaha meratifikasi Konvensi Hukum Laut Baru pada waktu kunjungan Menteri Luar Negeri Mochtar ke Australia, diharapkan akan membawa titik-titik terang bagi penyelesaian masalah batas-batas maritim kedua negara, terutama Timor Gap.²⁸ Direncanakan perundingan selanjutnya akan diadakan pada bulan Mei 1986.²⁹

Tampaknya rencana ini tertunda pelaksanaannya. Indonesia tidak segera memberi jawaban ketika Australia mengemukakan tentang rencana perundingan tersebut pada tanggal 16 April 1986.³⁰ Hal ini bisa jadi disebabkan perkembangan hubungan Indonesia dan Australia yang mulai membaik itu "terganggu" oleh tulisan David Jenkins mengenai Indonesia pada harian "The Sydney Morning Herald" pada tanggal 10 April 1986.³¹ Tetapi dengan adanya penegasan Menteri Luar Negeri Mochtar bahwa tidak akan ada peninjauan kembali atas beberapa persetujuan dan kerjasama yang telah disepakati atau sedang berjalan antara Pemerintah Australia dan beberapa departemen Indonesia akibat tulisan itu, diharapkan rencana perundingan selanjutnya antara kedua negara akan tetap berlangsung di masa mendatang ini.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa perundingan mengenai penetapan batas-batas maritim antara Indonesia dan Australia belum berhasil mencapai persetujuan bersama, walaupun telah diadakan tujuh kali perundingan. Perkembangan yang menunjukkan membaiknya hubungan Indonesia dan Australia dengan dipertegasnya pengakuan kedaulatan atas Timor Timur ternyata belum dapat mendorong tercapainya persetujuan bersama. Walaupun demikian dengan adanya perkembangan ini diharapkan faktor politik yang dianggap menjadi salah satu rintangan telah dapat ditembus dan dapat melicinkan jalan ke arah tercapainya persetujuan tersebut. Tampaknya faktor ekonomi dan teknis masih menjadi hambatan.

²⁷*Kompas*, 18 Desember 1985 dan 5 Maret 1986.

²⁸*Sinar Harapan*, 20 Desember 1985.

²⁹*Sinar Harapan*, 21 Februari 1986.

³⁰*Jakarta Post*, 4 April 1986.

³¹Lihat *Tempo*, 19 April 1986.

Potensi kekayaan minyak yang demikian besar menyebabkan kedua negara tetap bertahan pada posisinya masing-masing dengan mendasarkan tuntutananya kepada ketentuan hukum yang mendukung kepentingannya. Dalam hal ini, Indonesia tampak tidak tergesa-gesa atau tidak berada dalam keadaan terdesak oleh kebutuhan tercapainya persetujuan mengenai penetapan batas-batas landas kontinen tersebut. Tetapi ini tidak berarti persetujuan tidak penting, karena bagi Indonesia suatu persetujuan yang menetapkan batas-batas yang jelas adalah penting, tidak saja demi integritas wilayah, tetapi juga untuk menghindarkan sumber-sumber konflik di masa mendatang. Selain itu Indonesia perlu menyadari bahwa posisi Australia yang menghadapi desakan-desakan perusahaan-perusahaan minyak dan Pemerintah Australia Barat dan Utara, akan memperkuat posisinya.

Di lain pihak, Australia tidak ingin melepaskan kekayaan minyak yang dianggapnya berada di wilayahnya dan telah memberi izin eksplorasi dan eksploitasi kepada perusahaan-perusahaan minyak asing. Gagasan "zona eksploitasi bersama" yang diusulkan Australia merupakan cara agar potensi kekayaan minyak yang terdapat di landas kontinen yang sedang dipersengketakan dapat dinikmati bersama.

Dari komunike yang dihasilkan dalam perundingan ketujuh, Indonesia cenderung bersedia menerima gagasan ini asal garis batas disepakati kedua negara, sebagai suatu konsesi kepada Australia. Dengan disepakatinya gagasan ini oleh kedua pihak dapat dikatakan faktor ekonomi, berupa masalah "pembagian porsi kekayaan minyak dan gas alam," sebagian dapat diatasi.

Faktor yang masih menjadi rintangan adalah faktor teknis dan yuridis yang pada hakikatnya saling berkaitan. Tidak tercapainya persetujuan karena terpaksa kepada faktor-faktor ini hanyalah merintangai tujuan-tujuan yang lebih luas yaitu untuk kepentingan ekonomi dan hubungan baik kedua negara. Sebaliknya tercapainya persetujuan tidak saja meningkatkan hubungan kedua negara, tetapi juga akan melenyapkan sumber konflik karena ketidakjelasan batas yang ada. Hal ini makin terasa penting mengingat rawannya hubungan kedua negara karena perbedaan pandangan dan filsafat yang dapat mempengaruhi hubungan tersebut.

Posisi kedua negara yang begitu jauh dalam mencapai persetujuan bersama, tampaknya membutuhkan suatu keputusan politik yang harus segera dibuat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini sangat tergantung dari keinginan politik kedua negara untuk mengatasi perbedaan prinsip yang ada, sehingga tercapainya persetujuan bersama.

Sepuluh Tahun Pembangunan Timor-Timur

J. KRISTIADI*

PENDAHULUAN

Pada tanggal 25 April 1974, terjadi suatu coup d'etat di Portugal yang dikenal dengan nama Revolusi Bunga, karena revolusi itu tidak dilakukan dengan pertumpahan darah. Pimpinan Revolusi Bunga tersebut memberikan kesempatan kepada rakyat-rakyat di semua daerah jajahannya untuk menentukan nasib sendiri melalui pola-pola yang bermacam-macam. Untuk Timor Timur, rakyat diberi kesempatan membentuk partai-partai guna menyalurkan aspirasinya. Perlu diketahui bahwa, satu-satunya Gerakan Rakyat yang ada sebelum coup d'etat yang bernama Movimento Revolucionario Para a Libertacao De Timor/Morelt atau Gerakan Revolusioner untuk Pembebasan Timor, tidak sempat muncul. Oleh karena itu untuk mengisi kekosongan, rakyat Timor Timur secara mendadak membentuk partai-partai politik, yaitu: UDT, Apodeti, Fretilin, Kota dan Trabalista. Karena partai-partai itu dibentuk secara mendadak dan rakyat memang kurang dipersiapkan untuk suatu kehidupan demokratis, maka partai-partai tersebut sebenarnya tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga sering terjadi bentrokan fisik antara anggota-anggotanya hanya karena hal-hal yang tidak berarti. Bentrokan-bentrokan ini menjadi lebih intensif dengan diketahuinya bahwa Pemerintah Portugis secara jelas memihak kepada Fretilin yang menyatakan diri sebagai satu-satunya wakil sah rakyat Timor Timur. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Dekolonisasi Timor Timur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Portugis berdasarkan hasil-hasil beberapa pertemuan antara delegasi-delegasi Pemerintah Portugis dengan delegasi-delegasi dari Pemerintah Indonesia dan dengan delegasi-delegasi dari UDT dan Apodeti di Macao. Oleh karena itu maka pada tanggal 11 Agustus 1975 UDT membuat coup d'etat yang kemudi-

*Staf CSIS.

an disusul dengan counter-coup dari Fretilin pada tanggal 19 Agustus 1975, yang dilakukan dengan membunuh ribuan orang pendukung partai-partai lainnya. Dalam keadaan Perang Saudara tersebut, rakyat Timor Timur bersatu kembali dengan bergabungnya UDT, Apodeti, Kota dan Trabalista dalam satu tujuan mengalahkan Fretilin dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk menerima rakyat Timor Timur dan wilayah Timor Timur sebagai bagian integral dari bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Balibo tanggal 30 November 1975 yang kemudian disusul dengan Petisi Integrasi tanggal 31 Mei 1976. Dengan demikian maka pada tanggal 17 Juli 1976, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Penyatuan Timor Timur ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan sekaligus Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Untuk mempersiapkan pembangunan Propinsi Timor Timur, dilakukan crash program sebagai berikut:

- Tahap Pertama/Tahap Rehabilitasi pada tahun 1976/1977.
- Tahap Kedua/Tahap Konsolidasi pada tahun 1977/1978.
- Tahap Ketiga/Tahap Stabilisasi pada tahun 1978/1979.

Tiga tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan Timor Timur memasuki Pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan secara nasional melalui Repelita. Namun kenyataannya anggaran yang semula disediakan melalui tiga tahap itu terpaksa harus digunakan juga untuk menangani kebutuhan-kebutuhan lain, yang disebabkan oleh turunnya ratusan ribu rakyat dari gunung yang ingin bergabung dengan saudara-saudaranya yang telah mendahuluinya menjadi warga negara Republik Indonesia setelah pengejaran Fretilin. Dengan demikian masalah perumahan, makanan, pakaian dan obat-obatan bagi mereka tersebut harus pula mendapat perhatian utama dari Pemerintah Daerah dalam periode ini. Akibatnya rehabilitasi belum seluruhnya dapat dilaksanakan, demikian pula konsolidasi dan stabilisasi. Namun demikian hasil yang telah dicapai selama ini dapat dijadikan landasan untuk melaksanakan Pelita III yang merupakan Pelita Pertama bagi Propinsi Timor Timur.

BEBERAPA PRIORITAS

Pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan martabat dan harkat rakyat Timor Timur sebagai manusia yang semestinya merupakan masalah yang urgen. Hal ini disebabkan oleh penjajahan Portugal selama lebih kurang empat setengah abad lamanya, rakyat Timor Timur tidak memperoleh kesem-

patan sedikit pun untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia yang wajar. Keterbelakangan dan kemiskinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan rakyat Timor Timur, penyakit rakyat seperti TBC, malaria, penyakit kulit, infeksi saluran pernafasan dan kaki gajah merupakan ciri kebanyakan masyarakat di Timor Timur. Selain itu terdapat pula tingkat buta huruf yang sangat tinggi. Berdasarkan sensus yang dilakukan pada tahun 1980 masih terdapat 75% penduduk usia sekolah yang buta huruf. Gambaran kemiskinan dan keterbelakangan menjadi lengkap dengan cara hidup masyarakat Timor Timur yang dibuat eksklusif oleh Pemerintah Portugal. Rakyat dilarang untuk masuk ke kota-kota sehingga mereka tidak mengenal perkembangan yang terjadi di luar lingkungannya.

Mengingat keadaan rakyat Timor Timur yang masih cukup terbelakang, maka masalah paling urgen adalah melakukan upaya-upaya secara mendasar agar keterbelakangan tersebut dapat segera diatasi. Oleh karena itu pembangunan Propinsi Timor Timur dilakukan dengan prioritas sebagai berikut:

- Pertama : meningkatkan produksi pertanian, peternakan dan kehutanan;
- Kedua : melakukan perbaikan dan pemeliharaan prasarana perhubungan secara merata dan meluas guna membuka daerah-daerah terisolasi;
- Ketiga : meningkatkan pelayanan dan penyuluhan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- Keempat : meningkatkan pendidikan di dalam dan di luar sekolah untuk memberantas "tiga buta," yaitu buta aksara, buta bahasa dan buta pengetahuan dasar;
- Kelima : meningkatkan sarana dan prasarana fisik pemerintahan serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Sebelum merinci setiap prioritas yang dilakukan oleh pemerintah di dalam membangun masyarakat Timor Timur kiranya perlu lebih dahulu dikemukakan volume anggaran belanja daerah Propinsi Timor Timur selama satu dasawarsa. Mulai tahun anggaran 1976/1977 sampai dengan tahun anggaran 1986/1987 Timor Timur menerima anggaran sebesar Rp. 340.009.232.380,00 dengan perincian sebagai berikut:

- (a) anggaran proyek Inpres Rp. 122.648.685.160,00;
- (b) proyek sektoral Rp. 139.444.823.270,00; dan
- (c) anggaran rutin Rp. 77.776.723.950,00.

Secara lebih terinci anggaran belanja Timor Timur setiap tahun selama satu dasawarsa adalah seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel I

ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH TIMOR TIMUR
SELAMA SATU DASAWARSA (1876/77 - 1986/87)
(dalam Rupiah)

No.	Tahun Anggaran	Anggaran Sektoral	Anggaran Inpres	Anggaran Rutin	J u m l a h
1.	1976/1977	232.750.000	551.991.000	1.475.600.000	2.260.341.000
2.	1977/1978	3.500.000.000	3.359.600.000	3.261.642.000	10.121.510.000
3.	1978/1979	4.333.456.000	3.997.000.000	3.134.590.000	11.464.026.000
4.	1979/1980	7.517.176.000	5.152.250.000	3.150.000.000	15.820.026.000
5.	1980/1981	12.415.687.000	9.087.521.000	6.954.372.000	28.457.580.000
6.	1981/1982	11.213.208.250	14.884.621.000	8.435.500.000	34.532.330.250
7.	1982/1983	28.220.943.760	19.113.880.000	8.846.752.000	56.181.581.760
8.	1983/1984	22.871.356.500	20.825.937.000	9.432.046.300	53.156.364.800
9.	1984/1985	23.694.654.500	22.940.774.000	20.015.061.350	66.650.485.850
10.	1985/1986	35.181.239.316	24.192.273.760	13.038.561.222,95	72.412.074.298,85
11.	1986/1987	25.555.591.260	22.735.215.160	13.071.260.300	61.362.066.720

Sumber: Pemda Timor Timur.

Kiranya perlu dikemukakan bahwa anggaran belanja Pemda Timor Timur mempunyai rasio cukup tinggi dibandingkan dengan propinsi di Indonesia lainnya. Besarnya anggaran belanja negara dari tahun ke tahun menunjukkan adanya tekad untuk membangun dengan sungguh-sungguh.

Hasil pembangunan Timor Timur selama satu dasawarsa dapat dirinci dalam uraian berikut ini.

PEMBANGUNAN BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Pertanian Rakyat

Sebagaimana di wilayah Indonesia lainnya, pertanian merupakan bidang usaha sebagian besar masyarakat. Berdasarkan sensus tahun 1980 hampir 90% rakyat Timor Timur hidup dari pertanian. Hal ini diperkuat lagi dengan sensus pertanian tahun 1983 yang menyebutkan bahwa lebih kurang 113.112 rumah tangga memiliki usaha tani tanaman pangan yang merupakan sumber pendapatan. Oleh karena itu prioritas pembangunan di Timor Timur menempatkan pertanian sebagai prioritas utama kiranya suatu hal yang tepat. Dewasa ini usaha pembangunan yang utama dipusatkan pada kebutuhan pangan dan kebutuhan industri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha. Dengan demikian selama Pelita IV (lima tahun pembangunan Pelita IV 1984-1989) pembangunan pertanian ditujukan untuk meningkatkan produksi padi, jagung dan tanaman lainnya, seperti tanaman hortikultura melalui cara-cara rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi. Diharapkan pada tahun 1990 Propinsi Timor Timur tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan sendiri melainkan mampu pula menjual hasil pertaniannya ke luar propinsi. Karena seperti di daerah-daerah tertentu seperti di Kabupaten Ainaro, Bobonaro, Kovalima, Manatuto, Baucau dan Liquisa telah mencapai kelebihan produksi.

Keberhasilan ini tidak dapat dilepaskan dari usaha pemerintah daerah dalam merehabilitasi prasarana dan menyediakan fasilitas, melatih para petani untuk bercocok tanam secara modern dan memberikan bantuan benih maupun pupuk, alat-alat pertanian seperti cangkul, traktor, alat pemben-tasan hama, dan lain-lain. Sementara itu di Kabupaten Bobonaro telah selesai dibangun sistem irigasi persawahan yang diperkirakan mampu mengairi sawah sekitar 4.000 ha. Pembangunan irigasi telah dilaksanakan pula di lima kabupaten lainnya, yaitu (1) irigasi Seisal, Kabupaten Baucau; (2) irigasi Karlo, Kabupaten Manatuto; (3) irigasi Om Sare Slevo, Kabupaten Ermera; (4) irigasi

Touro, Kabupaten Ambeno; (5) irigasi Beco, Kabupaten Kovalima. Dengan demikian sistem irigasi telah mampu mengairi sawah seluas 10.000 ha. Perlu diketahui bahwa cara bercocok tanam penduduk Timor Timur sejak berabad-abad adalah berpindah-pindah dengan membakar rumput (hutan) dan kemudian menanam daerah tersebut dengan jagung. Setelah panen mereka mencari tempat yang baru dengan mengolah tanah dengan cara yang sama. Perluasan areal pertanian telah dilakukan sejak awal pembangunan. Dalam rangka itu pula para petani diberikan kredit dengan persyaratan lunak oleh BRI melalui program Bimas.

Program intensifikasi pertanian dilaksanakan sejak tahun 1981, dengan luas areal sekitar 4.000 ha. Lokasi areal intensifikasi pertanian ini tersebar di beberapa kabupaten seperti di Bobonaro, Baucau dan Manatuto. Program ini berhasil meningkatkan areal intensifikasi rata-rata 44,5 ton per ha, suatu kenaikan yang cukup menggembirakan bila dibanding dengan produksi sebelumnya, yang rata-rata hanya mencapai 1 ton padi per ha. Apabila program intensifikasi pertanian tersebut dapat terus ditingkatkan, diperkirakan akhir Pelita IV (1989), Timor Timur akan mampu berswasembada pangan. Sasaran produksi pangan akhir Pelita IV di Timor Timur, seluruhnya berjumlah 155.201 ton, meliputi 44.092 ton padi, 55.668 ton jagung, 47-891 ton ubi-ubian dan 7.550 ton kacang-kacangan, sayur-sayuran serta buah-buahan.

Di beberapa lokasi seperti di Manatuto, Manufahi, Aileu, Maliana dan Baucau, dibangun demonstrasi plot (demplot) tanaman pangan. Dengan harapan agar para petani dapat terangsang untuk meningkatkan produksi pertaniannya. Sejak Desember 1982, di Maliana telah ditempatkan 100 kepala keluarga petani teladan asal Propinsi Bali yang dimaksudkan untuk dapat memberikan contoh kepada para petani setempat dalam menerapkan sistem pertanian yang efektif. Di samping itu sejumlah petani asal Timor Timur dikirim ke Yogyakarta untuk menambah pengetahuan di bidang yang sama.

Produksi pertanian tanaman pangan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Produksi padi yang dalam tahun 1976 12.432 ton pada tahun 1985 meningkat menjadi 37.882,58 ton. Peningkatan produksi padi ini sejalan dengan perluasan areal persawahan. Apabila dalam tahun 1976 areal tanaman padi hanya seluas 15.736,71 ha, pada tahun 1985 telah mencapai 21.163,45 ha.

Produksi jagung juga mengalami peningkatan. Pada tahun 1976 hanya mencapai 12.568 ton meningkat menjadi 46.848,25 ton pada tahun 1985. Demikian pula produksi kacang tanah yang pada tahun 1976 hanya 230 ton telah meningkat menjadi 1.409,49 ton pada tahun 1985.

Luas areal perkebunan rakyat di Timor Timur, pada tahun 1985 meliputi

areal perkebunan kopi seluas 48.698 ha dengan produksi rata-rata 169,84 kg/ha; areal perkebunan kelapa 48.151,60 ha; perkebunan kayu manis 2.604,47 ha; perkebunan kapuk 9.578,21 ha; perkebunan pisang 35.507 ha dan areal perkebunan cengkeh 1.042,5 ha. Dalam waktu dekat cengkeh termasuk tanaman perkebunan yang cukup berperan di Timor Timur.

Selama Pelita IV (1984/85 - 1988/89), luas areal perkebunan akan dikembangkan sehingga mencapai 156.637 ha, dengan target peningkatan 2,7% per tahun. Dalam tahun 1985 luas areal perkebunan telah mencapai 149.420 ha, sehingga sampai akhir Pelita IV (1989) akan terjadi peningkatan seluas 7.217 ha.

Sejak tahun 1978, di Lospalos dan Maliana dibangun tempat pembibitan tanaman perkebunan dan sampai sekarang telah disemai 1.000.000 pohon kopi dan 1.000.000 pohon cengkeh, serta 59.200 pohon kelapa. Hasil persemaian tersebut disebarluaskan kepada para petani. Selain itu di Kabupaten Lautem dan Viqueque, telah dilakukan percobaan pembibitan tebu. Menurut rencana di kedua kabupaten tersebut akan dibuka areal perkebunan tebu seluas 10.000 ha yang hasilnya disalurkan ke pabrik gula di Lospalos yang dewasa ini sedang dalam proses pembangunan.

Produksi tanaman perkebunan, terutama kopi, pada awal integrasi merosot tajam, karena cukup banyak areal perkebunan kopi rakyat yang tidak terurus. Selain itu pada awal integrasi situasi keamanan belum sepenuhnya dikuasai disebabkan oleh belum adanya peremajaan tanaman. Untuk mengatasi masalah tersebut, diambil beberapa langkah antara lain merehabilitasi perkebunan kopi rakyat, dengan merawat kembali perkebunan-perkebunan yang sudah ada yang diikuti peremajaan pohon. Bersamaan dengan rehabilitasi areal perkebunan kopi tersebut dilakukan juga penanaman pohon cengkeh dan kelapa. Dengan program diversifikasi tanaman perkebunan rakyat ini diharapkan dapat memberi sumbangan yang cukup berarti bagi peningkatan pendapatan rakyat pedesaan. Daerah penghasil utama kopi adalah Kabupaten Ermera dan Liquisa. Pada tahun 1983 diperkirakan terdapat 33.488 kepala keluarga petani kopi di daerah tersebut. Usaha rehabilitasi dan pembangunan di sektor pertanian juga dilakukan oleh badan internasional, seperti Catholic Relief Service (CRS).

Karya CRS dilakukan melalui *East Timor Agriculture Development Programme (ETADEP)*, yaitu dengan membuka kembali areal pertanian penduduk yang terlantar akibat perang saudara. Selain itu dilakukan pula pembukaan areal persawahan baru dan sekaligus menyediakan alat-alat produksi pertanian modern, seperti traktor yang dilengkapi dengan mesin penebas, mesin pembalik tanah, mesin perontok padi dan sebagainya. Pusat kegiatan CRS di Timor Timur terdapat di Raimate (perbatasan antara Bobonaro

dengan Liquisa), di sekitar lembah Sungai Loes. Di pusat kegiatan CRS ini, tersedia lengkap sarana-sarana penunjang program mekanisme pertanian seperti perbengkelan, sarana latihan dan ketrampilan, balai benih dan sebagainya. Kepada penduduk sekitarnya, CRS juga melakukan program-program latihan ketrampilan di bidang pertanian, seperti pengetahuan untuk meningkatkan produksi, disertai dengan sistem pemasaran hasil-hasilnya. *East Timor Agriculture Development Programme* ini berjalan selama 5 tahun dengan biaya US\$5 juta.

Perkembangan produksi, luas area panen dan rata-rata produktivitas per hektar komoditi tanaman pangan di Timor Timur dapat diikuti pada Tabel 2.

Tabel 2

PERKEMBANGAN PRODUKSI, LUAS AREAL PANEN DAN PRODUKTIVITAS RATA-RATA PER HEKTAR KOMODITI TANAMAN PANGAN DI TIMOR TIMUR

No. Komoditi	1984			1985		
	Produksi (ton)	Areal Panen	Produk- tivitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Areal Panen	Produk- tivitas (ton/ha)
1. Padi	35.249	20.981	1,68	37.872	21.116	1,79
2. Jagung	33.018	32.691	1,01	47.952	46.409	1,03
3. Kacang hijau	1.539	1.690	0,91	1.156	2.284	0,52
4. Kacang tanah	1.409	2.272	0,62	419	28	0,35
5. Kacang kedele	1.128	2.923	0,43	16	311	0,57
6. Ubi kayu	30.474	11.721	2,60	35.351	8.444	4,18
7. Ketela rambat	12.384	7.692	1,61	8.528	2.430	3,51

Sumber: Pemda Timor Timur.

Data produksi luas panen dan produktivitas komoditi Tanaman Pangan dari tiap-tiap kabupaten selama tahun 1985 dapat dilihat pada Tabel 3.

Lokasi Bimas baru menjangkau di 8 kabupaten di Timor Timur, yaitu Kabupaten Baucau, Manatuto, Manufahi, Aileu, Ermera, Bobonaro, Kovalima dan Ambeno.

Dalam tahun 1985 pelaksanaan kegiatan intensifikasi mulai menjangkau semua komoditi tanaman pangan, dengan realisasi perkembangannya seperti tercantum pada Tabel 4.

Tabel 3

DATA PRODUKSI, LUAS PANEN DAN PRODUKTIVITAS RATA-RATA
KOMODITI TANAMAN PANGAN DI TIMOR TIMUR TAHUN 1985

No. Kabupaten	Padi			Jagung		
	Produksi (ton)	Areal Panen	Produk- tivitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Areal Panen	Produk- tivitas (ton/ha)
1. Lautem	817,20	639	1,3	1.885	2.982	0,63
2. Viqueque	3.976,70	2.895	1,4	126,6	149	0,80
3. Baucau	7.032,20	5.092,5	1,6	5.312	4.939	1,07
4. Manatuto	3.896,84	2.340	1,7	272	407	0,66
5. Dili	560,50	415	1,14	356		0,82
6. Aileu	420,30	311,5	1,14	1.072	1.191	0,90
7. Ainaro	914,10	720,5	1,3	7.595	5.122	1,50
8. Manufahi	1.907,50	945	2,1	965	1.215	0,80
9. Liquisa	711,75	366,5	1,9	403	350	1,15
10. Ermera	648,85	407	1,7	219	902	0,24
11. Bobonaro	14.971,17	6.165	2,4	18.889	6.270	1,11
12. Kovalima	616,80	514	1,2	6.143	4.323	1,42
13. Ambeno	462	346	1,4	4.715	8.125	0,58
Jumlah	37.871,91	21.157	1,8	47.952	46.409	1,03

Sumber: Pemda Timor Timur.

Catatan: Untuk komoditi padi, prestasi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bobonaro, menyusul berturut-turut Kabupaten Baucau, Viqueque, Manatuto, Aileu dan Manufahi. Sedangkan jagung dicapai oleh Kabupaten Bobonaro (18.889,4 ton) dan seterusnya adalah Kabupaten Ainaro, Kovalima, Baucau, Ambeno, Aileu dan Lautem.

Ternyata rata-rata produktivitas untuk semua komoditi meningkat setelah dilakukan intensifikasi.

Dari jumlah produksi keseluruhan tanaman pangan dalam tahun 1985, dapat diketahui sumbangan produksi akibat intensifikasi cukup tinggi walaupun areal panen yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Jumlah produksi padi intensifikasi sebesar 13.945,06 ton atau 36,82% dari total produksi keseluruhan, ketela pohon 224 ton atau 0,63%, ketela rambat 150 ton atau 1,76%, kacang

Tabel 4

**REALISASI PERKEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PANGAN
DI TIMOR TIMUR DALAM TAHUN 1985**

	Areal (ha)		Produksi	Produktivitas (ton/ha)
	Target	Realisasi		
1. Padi	6.220	5.501,50	13.945,06	2,53
2. Jagung	18.495	7.542,25	10.183,90	1,35
3. Ketela pohon		28	224	8
4. Ketela rambat		35	150	6
5. Kacang tanah	110	39,65	59,475	1,50
6. Kacang kedele	105	9	6,750	0,75
7. Kacang hijau	263	190,30	133,210	0,70

Sumber: Pemda Timor Timur.

tanah 59,475 ton atau 14,19% kacang kedele 6,75 ton, atau 42,19% dan kacang hijau 133,21 ton atau 11,14% dari total keseluruhan produksinya.

Kebutuhan akan pangan per kapita untuk masyarakat Timor Timur sampai dengan tahun 1985 sebesar 146 kg/orang/kapita/tahun, terdiri dari beras sekitar 36% (52,56 kg), jagung 40% (58,4kg), ubi-ubian 13% (18,98 kg) dan lain-lain (sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan) 11% (15,62 kg).

Berdasarkan standar tersebut dapat dilihat jumlah penyediaan pangan di Timor Timur dan kebutuhan minimal yang perlu dipenuhi, seperti tercantum dalam Tabel 5.

Ternyata penyediaan beras di dalam daerah Timor Timur sendiri berdasarkan data produksi selama tahun 1984 dan 1985, selalu belum mencukupi. Tahun 1984 terdapat kekurangan sebesar 11.503,3 ton dan tahun 1985 sebesar 10.640,07 ton. Demikian pula dengan jagung dalam tahun 1984, namun pada tahun 1985 penyediaannya telah melampaui kebutuhan. Jumlah penyediaan ubi-ubian selalu melebihi kebutuhan daerah namun penyediaan sayur-sayuran, kacang-kacangan dan buah-buahan belum dapat menutup kebutuhan.

Tabel 5

KEBUTUHAN MINIMAL PANGAN DAN PENYEDIAANNYA DI TIMOR TIMUR
DALAM TAHUN 1984 DAN 1985 (dalam ton)

No. Komoditi	1984		1985	
	Kebutuhan	Penyediaan	Kebutuhan	Penyediaan
1. Beras	31.595,23	20.091,93	32.227,11	21.587,04
2. Jagung	35.105,82	30.706,74	35.807,90	44.595,00
3. Ubi-ubian	11.409,39	42.858,00	11.837,56	43.879,00
4. Sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan	9.389,60	4.076,00	9.577,39	1.631,00

Sumber: Pemda Timor Timur.

Tabel 6

PERKEMBANGAN PRODUKSI KOMODITI TANAMAN PANGAN SELAMA PELITA III
DAN TAHUN I PELITA IV DI TIMOR TIMUR (dalam ton)

No. Komoditi	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
1. Padi	16.521	23.874	28.183	29.771	29.863	35.249	37.872
2. Jagung	31.360	34.888	49.241	56.445	31.649	33.018	47.018
3. Kacang hijau	1.380	442	296	163	1.374	1.539	1.196
4. Kacang tanah	346	685	898	942	1.279	1.409	419
5. Kacang kedele	44	27	68	51	1.279	1.128	16
6. Ubi kayu	76.000	41.387	40.782	17.396	13.231	30.474	35.351
7. Ketela rambat	1.248	4.260	4.158	2.233	5.498	12.384	8.528

Sumber: Pemda Timor Timur.

Tabel 7

PERKEMBANGAN LUAS AREAL PANEN KOMODITI TANAMAN PANGAN
SELAMA PELITA III DAN TAHUN I PELITA IV DI TIMOR TIMUR
(dalam hektar)

No. Komoditi	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
1. Padi	17.957	14.646	18.914	17.827	17.882	20.981	21.116
2. Jagung	52.267	51.305	67.453	71.449	29.305	32.691	46.409
3. Kacang hijau	3.209	982	705	313	1.616	1.690	2.284
4. Kacang kedele	769	1.370	1.694	1.847	2.558	2.272	28
5. Kacang tanah	209	123	166	182	5.560	2.623	311
6. Ubl kayu	26.950	11.758	12.665	11.597	9.948	11.721	8.444
7. Ubl jalar	960	3.043	4.200	4.060	5.849	7.692	2.430

Sumber: Pemda Timor Timur.

Peningkatan produksi padi, jagung, dan ubi kayu disebabkan oleh meningkatnya produktivitas persatuan luas lahan dan adanya program intensifikasi serta sedikit perluasan areal tanaman. Sedangkan beberapa jenis tanaman palawija menurun akibat kurangnya benih yang memadai untuk tanaman tersebut, musim yang kurang mendukung serta menurunnya luas areal tanaman.

Tabel 8

PERKEMBANGAN PRODUKTIVITAS RATA-RATA PER HEKTAR
KOMODITI TANAMAN PANGAN DI TIMOR TIMUR
(dalam ton/ha)

No. Komoditi	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
1. Padi	0,92	1,63	1,49	1,67	1,67	1,68	1,79
2. Jagung	0,60	0,68	0,73	0,79	1,08	1,01	1,03
3. Kacang hijau	0,43	0,45	0,42	0,52	0,85	0,91	0,52
4. Kacang tanah	0,45	0,50	0,53	0,51	0,50	0,62	0,35
5. Kacang kedele	0,21	0,22	0,41	0,28	0,23	0,43	0,57
6. Ubi kayu	2,82	3,52	3,22	1,50	1,33	2,60	4,18
7. Ketela rambat	1,30	1,40	0,99	0,55	0,94	1,61	3,51

Sumber: Rumusan Rapat Teknis Kanwil Departemen Pertanian Propinsi Timor Timur Tahun 1985.

Tabel 9

PERKEMBANGAN PRODUKSI KOMODITI PERKEBUNAN SELAMA PELITA III DAN
TAHUN PELITA IV DI TIMOR TIMUR
(dalam ton)

No. Komoditi	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
1. Kelapa	8.895,50	8.877,60	8.895,60	8.903,60	8.934,00	8.623,80	8.507,90
2. Kopi	4.452,00	6.238,00	6.238,00	6.245,00	6.358,00	8.623,00	8.604,50
3. Kapas	8.395,50	8.395,50	8.400,50	8.395,50	8.398,50	16,76	930,81
4. Pinang	8.395,50	1.472,00	1.472,00	8.773,00	8.773,00	169,68	2.795,60
5. Kemiri	916,50	945,90	961,00	945,90	9,48	863,199	619,51
6. Kayu manis	254,50	265,50	254,50	262,50	262,50	-	258,25
7. Cengkeh	-	-	-	-	0,05	0,034	0,32

Sumber: Rumusan Rapat Teknis Kanwil Departemen Pertanian Propinsi Timor Timur Tahun 1985.

Catatan: Data Produksi Komoditi Perkebunan tersebut merupakan data perkiraan yang dihitung berdasarkan luas areal masing-masing jenis Komoditi Perkebunan dikalikan dengan produktivitas per hektar.

Peternakan

Propinsi Timor Timur sangat potensial untuk dikembangkan sebagai areal peternakan. Diperkirakan luas padang penggembalaan meliputi 394.503 ha sehingga menjadikan propinsi ini sangat ideal sebagai areal penggembalaan ternak. Beberapa daerah potensial untuk dapat dikembangkan sebagai areal peternakan adalah Lautem, Covalima dan Bobonaro.

Untuk mengembalikan peranan daerah ini sebagai gudang ternak, telah dilakukan langkah-langkah pengembangan seperti pengadaan bibit ternak unggul, penyiapan lapangan rumput dan peningkatan ketrampilan para peternak. Peningkatan ketrampilan para peternak ini dilaksanakan dengan program latihan yang secara merata diadakan di Timor Timur. Pengadaan bibit ternak dilakukan dengan mendatangkannya dari propinsi-propinsi lain, seperti dari Propinsi Bali. Pemerintah telah mendatangkan berbagai jenis ternak, antara lain 4.512 sapi Bali, 1.500 sapi *drought master Australia* dan 2.800 kerbau. Di samping itu CRS juga telah mendatangkan 300 sapi asal Bali yang dibagikan kepada para peternak, khususnya di Raimate.

Untuk mengembangkan peternakan, Kabupaten Bobonaro dijadikan proyek percontohan subsektor peternakan. Proyek percontohan ini berhasil mengembangkan sapi Bantuan Presiden yang diserahkan pada tahun 1978/1979 sebanyak 1.500 ekor berkembang menjadi 3.833 ekor pada tahun 1982/1983.

Perkembangan populasi ternak menunjukkan prospek yang cukup cerah. Pada tahun 1985 mencapai 839.389 ekor; di antaranya terdiri dari 49.761 sapi (400 ekor merupakan sapi perah), 35.185 kerbau, 23.360 kuda, 182.383 babi, 73.921 kambing dan 27.536 domba.

Tabel 10

PERKEMBANGAN POPULASI TERNAK DI PROPINSI TIMOR TIMUR TAHUN 1979 - 1985

No. Ternak	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
1. Sapi	34.931	30.682	35.442	39.705	43.468	46.945	49.761
2. Kerbau	39.506	24.597	24.597	25.713	29.044	33.832	35.185
3. Kuda	19.512	15.476	16.534	18.873	22.224	23.015	23.360
4. Kambing	28.055	26.359	30.064	35.614	31.612	68.130	73.921
5. Babi	65.928	64.013	85.173	113.387	140.757	165.803	182.383
6. Domba	13.984	11.152	12.028	17.615	23.067	25.577	27.536
7. Unggas	418.010	236.840	284.409	336.084	404.212	435.470	446.243

Sumber: Dinas Peternakan Propinsi Timor Timur.

Di samping terdapat peningkatan jumlah populasi ternak dari tahun ke tahun, terdapat pula kenaikan dalam jumlah pemotongan ternak.

Bila diambil perbandingan dari 2 tahun terakhir yaitu 1984 dan 1985, ternak sapi tahun 1985 meningkat sebagai berikut: sapi meningkat dengan 5,99% (2.816 ekor); kerbau 3,99% (1.353 ekor); kuda 1,49% (345 ekor); kambing 8,50% (579 ekor); domba 6,00% (1.559 ekor); ayam buras 2,47% (9.864 ekor); ayam ras 19,67% (1.475 ekor); itik 1,49% (434 ekor); dan babi 9,99% (16.578 ekor). (Lihat Tabel 11.)

Tabel 11

**PERKEMBANGAN POPULASI TERNAK DAN TINGKAT PEMOTONGAN TERNAK
DI TIMOR TIMUR DALAM TAHUN 1984 DAN 1985**

No. Ternak	1984		1985	
	Populasi	Pemotongan	Populasi	Pemotongan
1. Sapi	46.946	2.254	49.761	2.372
2. Kerbau	33.832	1.089	35.185	1.121
3. Kuda	23.015	-	23.360	-
4. Kambing	68.130	6.697	73.921	8.316
5. Domba	25.977	2.000	27.536	2.116
6. Babi	165.803	9.157	182.383	10.327
7. Ayam buras	399.036	69.463	408.900	72.511
8. Ayam ras	7.500	-	8.975	-
9. Itik	28.934	617	29.368	723

Catatan: Populasi ternak sapi, kerbau dan kuda terbanyak di Kabupaten Ambeno, masing-masing 16.793 ekor, 6.209 ekor dan 4.273 ekor; kambing di Kabupaten Dili (13.565 ekor); babi di Kabupaten Dili (19.821 ekor); ayam buras dan ayam ras di Kabupaten Dili masing-masing 57.129 ekor dan 8.975 ekor dan itik di Kabupaten Ambeno (3.859 ekor).

Peningkatan ini terjadi terutama disebabkan oleh adanya pemasukan bibit ternak dari luar Timor Timur, dan dilakukannya usaha-usaha seperti peneakan angka kematian ternak yang disebabkan oleh karena penyakit melalui operasional vaksinasi ternak dan peningkatan ketrampilan petani peternak melalui operasional penyuluhan peternakan.

Tingkat pemotongan sapi terjadi kenaikan dalam tahun 1985 sebesar 5,23% (kenaikan 118 ekor); kerbau 2,93% (32 ekor); kambing 24,17% (1.619 ekor); domba 5,8% (116 ekor); babi 12,77% (1.170 ekor); ayam buras 4,78% (3.048 ekor) dan itik 17,18% (106 ekor).

Daerah kabupaten potensial ternak adalah Ambeno, Kovalima, Bobonaro, Ermera, Lautem, Manatuto, Baucau dan Viqueque. Data populasi ternak tiap kabupaten selama tahun 1985 dapat diikuti dalam Tabel 12.

Tabel 12

POPULASI TERNAK PER KABUPATEN TAHUN 1985

Kabupaten	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi	Ayam Buras	Ayam ras	Itik
1. Dili	375	325	108	13.565	.105	19.821	57.129	8.975	2.573
2. Baucau	913	4.967	2.371	5.527	9.552	14.583	36.087	-	1.982
3. Manatuto	582	2.562	742	4.177	7.096	13.755	27.281	-	2.012
4. Viqueque	1.388	3.591	2.129	3.155	979	10.675	26.976	-	1.989
5. Lautem	1.863	5.281	2.959	4.863	2.477	9.134	28.431	-	2.039
6. Manufahi	744	888	698	2.360	74	10.731	37.125	-	1.856
7. Ainaro	1.889	2.609	1.145	4.027	315	14.673	27.322	-	1.579
8. Aileu	587	199	231	4.969	275	9.938	23.934	-	1.633
9. Ermera	1.498	866	821	4.789	714	11.841	27.770	-	1.822
10. Liquisa	576	499	354	5.476	700	11.513	25.946	-	1.825
11. Bobonaro	14.876	5.208	4.055	6.133	2.619	19.769	35.848	-	3.797
12. Kovalima	7.677	1.981	3.474	5.141	115	18.474	26.246	-	2.402
13. Ambeno	16.793	6.209	4.273	9.739	2.515	17.476	28.805	-	3.859
Jumlah	49.761	35.185	23.360	73.921	27.536	182.383	408.900	8.975	29.368

Sumber: Pemda Timor Timur.

Konsumsi daging meningkat dalam tahun 1985 sebesar 5% (0,07 kg/kapita/tahun) dibandingkan dengan tahun 1984, sedangkan konsumsi telur mengalami kenaikan sebesar 168,42% (0,32 kg/kapita/tahun). (Tabel 13.)

Tabel 13

KONSUMSI DAGING DAN TELUR PER KAPITA PER TAHUN DI TIMOR TIMUR
DALAM TAHUN 1984 DAN 1985
(dalam kg)

No.	Komoditi	1984	1985	Rata-rata Kenaikan (%)
1.	Daging	1,40	1,47	5,00
2.	Telur	0,19	0,51	168,42

Sumber: Pemda Timor Timur.

Konsumsi daging dan telur yang dicapai dalam tahun 1985 sebesar masing-masing 1,47 kg/kapita/tahun dan 0,51 kg/kapita/tahun, menunjukkan bahwa pemenuhan konsumsi daging dan telur baru mencapai 18,15% untuk konsumsi daging (standard nasional 8,1 kg/kapita/tahun) dan 23,18% untuk konsumsi telur (standard nasional 2,2 kg/kapita/tahun).

Perikanan

Kawasan Timor Timur mengandung berbagai jenis ikan dan apabila dikelola secara profesional diperkirakan dapat menghasilkan devisa bagi negara. Berbagai jenis ikan yang hidup berkembang di daerah ini, antara lain ikan tongkol, cakalang, bandeng, bawal, kakap, belanak, tenggiri, kembung, teri, saung, cumi-cumi, udang serta berbagai jenis teripang.

Melihat potensi perairan Timor Timur ini, pemerintah telah mulai melakukan kebijaksanaan agar potensi sumber hayati perikanan tersebut dapat dimanfaatkan penduduk dalam rangka meningkatkan pendapatan mereka. Pada masa lalu, potensi perairan Timor Timur kurang mendapat perhatian, sehingga tidak memberi manfaat kepada penduduk. Untuk memanfaatkan sumber daya perikanan ini, pemerintah telah memberikan sejumlah kredit dan bimbingan teknis kepada para nelayan dan untuk memasarkan hasil mereka, untuk keperluan ini telah dibangun beberapa pasar ikan.

Pada tahun 1985 tercatat 5.535 penduduk Timor Timur hidup dari usaha perikanan, 4.664 di antaranya sebagai nelayan dan sisanya sebagai penangkap ikan. Sarana penangkapan ikan yang tersedia meliputi 1 kapal, 139 motor

tempel dan 1.030 jakung yang dilengkapi dengan sekitar 8.000 jenis alat penangkapan ikan seperti pukat, jala, jaring, dan sebagainya. Produksi ikan pada tahun 1985 mencapai 493,90 ton atau baru sekitar 2,3% dari potensi perairan Timor Timur. (Tabel 15.)

Tabel 14

PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN DI PROPINSI TIMOR TIMUR TAHUN 1979 - 1985							
No. Komoditi	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
1. Perikanan Laut	236,3	259,2	380,2	397,3	405,3	476,802	493,90
2. Perikanan Darat	-	-	-	-	-	8,9	9,15
	236,3	259,2	380,2	397,3	405,3	483,702	503,05

Sumber: Dinas Perikanan Propinsi Timor Timur.

Tabel 15

PERKEMBANGAN ARMADA PERIKANAN DAN JUMLAH NELAYAN DI TIMOR TIMUR

No.	Uraian	1984	1985
1.	Armada Perikanan (buah)		
	1. Jukung	953	1.030
	2. Perahu kecil	-	34
	3. Motor tempel	89	137
	4. Kapal motor	1	1
II.	Nelayan	4.218	4.672
III.	Petani Ikan (orang)	759	887

Sumber: Pemda Timor Timur.

Sejalan dengan pemanfaatan potensi laut juga telah ditingkatkan pengembangan budidaya perikanan darat. Kegiatan pengembangan tersebut meliputi antara lain, pembangunan Balai Benih ikan di Same (Manufahi), yaitu pembuatan kolam ikan seluas 2 ha, pembuatan 2 perahu fibre glass, rehabilitasi kolam ikan dan pengadaan 100 kg bibit ikan mas. Sampai dengan akhir tahun 1983, terdapat 47.799 m² kolam ikan. Kegiatan budidaya air tawar dalam tahun 1985 tidak mengalami peningkatan, yaitu 32,9 ha, tersebar di 12 kabupaten se Timor Timur, dengan produksi rata-rata 0,5 ton/ha. Kegiatan budidaya tambak berpusat di 3 kabupaten yaitu: Dili, Manatuto dan Manufahi.

Dalam tahun 1985 produksi komoditi perikanan menunjukkan kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 1984, di mana untuk sektor Perikanan Laut meningkat 3,58% dan sektor Perikanan Darat sebesar 32,61%.

Tabel 16

PERKEMBANGAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI TIMOR TIMUR

No.	Nama Alat Tangkap	1984	1985
1.	Payang (Lempara)	4	4
2.	Pukat Pantai	14	26
3.	Jaring Insang Hanyut	304	362
4.	Pukat Cincin	1	1
5.	Jaring Insang Tetap	350	309
6.	Jaring Klitik	178	178
7.	Pukat Air Pasang	199	-
8.	Pancing,	1.970	3.686
9.	Sero	84	117
10.	Bubu	369	306
11.	Jala	1.065	2.990
12.	Pukat	420	-
Jumlah		4.958	7.979

Sumber: Pemda Timor Timur.

Pada tahun 1985 peningkatan sarana penangkapan ikan adalah sebesar 60,93% dari tahun 1984, yaitu dari 4.958 unit menjadi 7.979 unit.

Perkembangan armada perikanan sebagai peningkatan pembinaan mengalami kenaikan sebesar 15,24% dibanding dengan tahun 1984 yaitu dari 1.043 unit menjadi 1.202 unit, sedangkan jumlah nelayan bertambah 10,76% yaitu dari 4.218 orang menjadi 4.672 orang (1985) dengan jumlah terbesar berada di Kabupaten Dili.

Bila dibandingkan dengan potensi perikanan laut Timor Timur sebesar 17.496 ton per tahun, ternyata baru mampu dimanfaatkan sebesar 2,82% dalam tahun 1985 atau sebesar 493,90 ton. (Tabel 17)

Tabel 17

PERKEMBANGAN PRODUKSI KOMODITI PERIKANAN
DALAM TAHUN 1984 DAN 1985
(dalam ton)

No. Komoditi	1984	1985	Rata-rata Kenaikan (%)
1. Perikanan Laut	476,802	493,90	3,58
2. Perikanan Darat	6,9	9,15	32,61
Jumlah	483,702	503,05	-

Kenaikan produksi perikanan laut di Timor Timur, terutama disebabkan oleh adanya pembenahan dan peningkatan pengembangan armada perikanan, perkembangan alat tangkap dan peningkatan jumlah nelayan yang beroperasi di 10 Kabupaten Timor Timur, di samping adanya kegiatan operasional penyuluhan lewat latihan dan kursus nelayan petani ikan serta keadaan musim penangkapan dan cuaca yang cukup baik, sehingga memberikan peluang kepada nelayan lebih banyak memanfaatkan waktunya untuk kegiatan usaha penangkapan. Daerah potensi perikanan laut terbesar adalah di Kabupaten Dili, Manatuto, Baucau, Maliana, Liquisa dan Kovalima.

Konsumsi ikan dalam tahun 1985 mengalami kenaikan sebesar 2,5% dibanding tahun 1984. Namun bila dibandingkan antara konsumsi sesuai standar nasional (18 kg/kapita/tahun), ternyata di Timor Timur baru mencapai 4,55%.

Tabel 18

PERKEMBANGAN KONSUMSI IKAN DI TIMOR TIMUR
DALAM TAHUN 1984 DAN 1985
(dalam kg/kapita/tahun)

No. Uraian	1984	1985	Rata-rata Kenaikan (%)
- Konsumsi ikan	0,8	0,82	2,5

Salah satu penyebab meningkatnya produksi ikan adalah terjadinya peningkatan pembenahan sarana penangkapan pada sektor perikanan laut. Perkembangan peningkatan pembenahan sarana penangkapan pada sektor perikanan laut, telah ditunjukkan pada Tabel 15 dan 16.

Beberapa Permasalahan dan Proyeksi

Permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian selama ini adalah sebagai berikut:

Masalah Produksi

- a. Penyediaan benih yang masih terbatas di lokasi untuk kelancaran kegiatan Bimas;
- b. Penyaluran pupuk, obat-obatan dan pestisida yang belum sesuai dengan jadwal musim tanam karena keterbatasan transportasi;
- c. Kegiatan penyuluhan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) belum berjalan baik, disebabkan terbatasnya tenaga Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

Hal ini mengakibatkan rendahnya arus informasi teknologi yang diterima petani dan nelayan.

Masalah Pemasaran

- a. Jangkauan transportasi yang belum memadai, menyebabkan hasil produksi pertanian belum dapat dipasarkan di daerah lain dengan harga yang memadai;
- b. Kelembagaan petani dalam hal kelompok tani dan KUD belum berfungsi baik, sehingga mempengaruhi tingkat pemasaran hasil produksi;
- c. Mutu produksi yang dihasilkan belum memadai sehingga mempengaruhi harga pasaran;
- d. Pengelolaan tingkat usaha tani, pada umumnya masih dalam skala kecil sehingga belum mampu bersaing di pasaran.

Masalah Sarana, Prasarana dan Ketenagaan

- a. Peralatan dan sarana produksi pertanian seperti traktor, yang dipergunakan untuk mengolah sawah banyak yang rusak akibat tidak disertai dengan perawatan yang cukup baik. Sarana pengairan umumnya belum berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga pembagian air belum merata. Hal ini berpengaruh pada tingkat produksi yang dihasilkan;
- b. Tenaga penyuluh di kabupaten masih belum memadai untuk menggerakkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, dan hal tersebut mempengaruhi kelancaran kegiatan di lapangan.

Masalah Kelembagaan

- a. Belum ditumbuhkan kelompok tani di seluruh kabupaten, dan hal ini yang akhirnya berpengaruh pada kelancaran tugas penyuluhan pertanian;
- b. KUD belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan pemasaran komoditi pertanian maupun penyaluran;
- c. Sarana produksi pertanian, seperti BPP maupun Balai Benih yang belum berfungsi dengan baik turut menimbulkan hambatan bagi kelancaran tugas.

Proyeksi dan Target 1986

Dalam tahun 1986, *target produksi komoditi tanaman pangan* adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------|---|
| - Padi | : 39.841 ton yang direncanakan akan dihasilkan dari areal seluas 21.771 hektar, dengan produktivitas rata-rata 1,83 ton/ha. |
| - Jagung | : 50.397 ton yang direncanakan akan dihasilkan dari areal seluas 40.642 hektar, dengan produktivitas rata-rata 1,13 ton/ha. |

- Kacang Hijau : 1.225 ton yang direncanakan akan dihasilkan dari areal seluas 2.149 hektar, dengan produktivitas rata-rata 0,57 ton/ha.
- Kacang Tanah : 483 ton yang direncanakan akan dihasilkan dari areal seluas 1.276 hektar dengan produktivitas rata-rata 0,38 ton/ha.
- Kacang Kedele : 19 ton yang direncanakan akan dihasilkan dari areal seluas 31 hektar dengan produktivitas 0,61 ton/ha.
- Ubi Kayu : 36.411 ton yang direncanakan akan dihasilkan dari areal seluas 7.385 hektar dengan produktivitas 4,93 ton/ha.
- Ketela Rambat : 8.766 ton yang direncanakan akan dihasilkan dari areal seluas 2.218 hektar dengan produktivitas rata-rata 3,95 ton/ha.
- Sayur-sayuran : 1.907 ton yang direncanakan akan dihasilkan dari areal seluas 996 hektar, dengan produktivitas rata-rata 1,91 ton/ha.
- Buah-buahan : 3.139 ton yang direncanakan akan dihasilkan dari areal seluas 1.943 hektar, dengan produktivitas rata-rata 1,62 ton/ha.

Proyeksi komoditi tanaman pangan tersebut, ditetapkan untuk menuju pencapaian target swasembada pangan di masa yang akan datang. Khusus untuk komoditi padi terutama ditekankan pada kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi lahan sawah yang pernah ada. Dengan demikian diharapkan kebutuhan beras Timor Timur akan dapat dipenuhi sendiri tanpa perlu mendatangkan dari propinsi lain.

Berdasarkan sasaran tersebut di atas, maka untuk tiap kabupaten target produksi padi dan jagung dalam tahun 1986 adalah seperti tercantum dalam Tabel 19.

Tabel 19

PROYEKSI PRODUKSI PADI DAN JAGUNG SETIAP KABUPATEN DALAM TAHUN 1986
(dalam ton)

No.	Kabupaten	Padi	Jagung
1.	Lautem	865	1.986
2.	Viqueque	3.415	132
3.	Baucau	7.818	5.582
4.	Manatuto	3.572	285
5.	Dili	589	374
6.	Aileu	4.421	1.126
7.	Ainaro	961	7.982
8.	Liquisa	747	423
9.	Manufahi	2.006	1.014
10.	Ermera	681	230
11.	Bobonaro	13.645	19.852
12.	Kovalima	648	6.456
13.	Ambeno	473	4.955
Jumlah		39.841	50.397

Sumber: Pemda Timor Timur.

Tabel 20

PROYEKSI POPULASI TERNAK PER KABUPATEN
DI TIMOR TIMUR TAHUN 1986

No.	Kabupaten	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi	Ayam Buras	Ayam Ras	Itik
1.	Dili	393	333	174	14.687	147	20.867	58.985	10.161	2.599
2.	Baucau	1.158	5.191	2.379	6.121	9.999	15.512	36.891	-	2.002
3.	Manatuto	711	2.801	748	4.799	7.287	14.643	28.615	-	2.035
4.	Viqueque	1.457	3.610	2.137	3.207	984	11.309	27.325	-	2.009
5.	Lautem	1.956	5.313	2.967	4.042	2.598	9.591	28.853	-	2.059
6.	Manufahi	1.881	910	709	3.080	79	11.268	37.981	-	1.875
7.	Ainaro	1.903	2.624	1.150	4.550	327	15.407	28.688	-	1.595
8.	Aileu	616	203	233	5.437	289	10.435	24.135	-	1.649
9.	Armera	1.673	1.087	827	5.096	727	12.433	28.158	-	1.840
10.	Liquisa	704	611	358	5.789	731	12.089	26.243	-	1.843
11.	Bobonaro	15.019	5.238	4.159	6.511	2.740	20.757	36.640	-	3.835
12.	Kovalima	7.432	2.316	3.481	5.280	127	19.498	27.415	-	2.426
13.	Ambeno	17.432	6.314	4.390	9.999	2.875	18.350	29.245	-	3.897
Jumlah		52.313	36.285	23.717	79.598	28.910	192.359	419.204	10.161	29.664

Sumber: Pemda Timor Timur.

Proyeksi populasi ternak di Timor Timur tahun 1986 ditargetkan sebagai berikut:

- Sapi	: 52.313 ekor	- Babi	: 192.359 ekor
- Kerbau	: 36.285 ekor	- Ayam buras	: 419.204 ekor
- Kuda	: 23.717 ekor	- Ayam ras	: 10.161 ekor
- Kambing	: 79.598 ekor	- Itik	: 29.664 ekor
- Domba	: 28.910 ekor		

Perincian target proyeksi populasi ternak tahun 1986 untuk tiap jenis ternak dari tiap-tiap kabupaten, seperti terlihat pada Tabel 20.

Proyeksi produksi perikanan laut dan darat dalam tahun 1986, masing-masing ditargetkan sebesar 564,19 ton dan 6,30 ton. Perincian dari sasaran produksi tiap kabupaten dalam tahun 1986 seperti tampak dalam Tabel 21.

Tabel 21

TARGET PRODUKSI PERIKANAN LAUT DAN DARAT DI TIMOR TIMUR
DALAM TAHUN 1986
(dalam ton)

No.	Kabupaten	Perikanan Laut	Perikanan Darat
1.	Lautem	11,72	0,05
2.	Viqueque	30,74	0,19
3.	Baucau	95,80	0,17
4.	Manatuto	43,62	1,43
5.	Dili	156,30	1,59
6.	Liquisa	50,70	-
7.	Manufahi	31,70	0,13
8.	Bobonaro	46,10	0,12
9.	Kovalima	55,75	1,95
10.	Ambeno	42,20	0,17
11.	Aileu	-	0,09
12.	Ainaro	-	0,18
13.	Ermera	-	0,21
Jumlah		564,19	6,3

Sumher: Pemda Timor Timur

Untuk perikanan darat, diharapkan akan diperoleh hasil dari kegiatan kolam dan tambak.

Pelaksanaan perikanan tambak diarahkan pada tiga kabupaten, yaitu Dili, Manatuto dan Kovalima, dengan target kabupaten masing-masing adalah 1,45

ton, 1,29 ton dan 1,8 ton, sedangkan kolam dapat dikembangkan pada 12 kabupaten. Perincian target produksi kolam untuk masing-masing kabupaten dalam tahun 1986 ialah:

- Dili	: 0,145 ton	- Ermera	: 0,215 ton
- Manatuto	: 0,140 ton	- Ambeno	: 0,170 ton
- Baucau	: 0,170 ton	- Aileu	: 0,09 ton
- Lospalos	: 0,05 ton	- Ainaro	: 0,180 ton
- Viqueque	: 0,195 ton	- Kovalima	: 0,150 ton
- Manufahi	: 0,262 ton	- Bobonaro	: 0,125 ton

Target produksi dan areal panen serta rata-rata produktivitas dari tiap komoditi perkebunan dalam tahun 1986, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 22

TARGET PRODUKSI, AREAL PANEN DAN PRODUKTIVITAS KOMODITI
PERKEBUNAN DALAM TAHUN 1986

No.	Komoditi	Produksi (Ton)	Areal Panen (Ha)	Produktivitas (Kg/Ha)
1.	Kelapa	9.457,6	48.500	195
2.	Kopi	10.216	48.648	210
3.	Pinang	3.198,6	35.541	90
4.	Kapuk	1.116,8	9.712	115
5.	Kayu Manis	304,5	2.695	113
6.	Kemiri	673,4	3.890	180
7.	Cengkeh	0,6	1.545	0,45
8.	Tembakau	687,50	1.250	550

Sumber: Pemda Timor Timur.

Tabel 23

TARGET PERLUASAN DAN REHABILITASI TANAMAN PERKEBUNAN
(dalam hektar)

No.	Komoditi	Perluasan	Rehabilitasi
1.	Kelapa	400	350
2.	Kopi	-	600
3.	Pinang	-	150
4.	Kapuk	200	225
5.	Kayu Manis	-	125
6.	Kemiri	150	100
7.	Cengkeh	450	200
8.	Tembakau	350	75
9.	Kelapa Hibrida	75	-

Sumber: Pemda Timor Timur.

Dari sasaran target produksi seperti tercantum dalam Tabel 22 akan ditempuh penjabaran teknis kebijaksanaan di lapangan melalui usaha perluasan dan rehabilitasi tanaman perkebunan. Tabel 23 menunjukkan target perluasan dan rehabilitasi tanaman perkebunan dalam tahun 1986.

Usaha pokok mencapai tujuan pembangunan pertanian ditempuh melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi. Dalam rangka pencapaian target-target dan sasaran yang ditentukan untuk tahun 1986, langkah-langkah operasional yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Pertanian Tanaman Pangan

Melaksanakan pengembangan produksi tanaman dan palawija, peningkatan prasarana dan pelayanan, pengembangan perlindungan tanaman, pengembangan pasca panen, pemasaran dan usaha tani, pengembangan statistik dan perencanaan.

Untuk mendukung pelaksanaan intensifikasi telah digunakan pupuk, obat-obatan dan benih unggul, yang terbatas pada daerah-daerah intensifikasi. Jenis-jenis pupuk, obat-obatan dan benih unggul yang disebarkan adalah pupuk urea 259,5 ton, pupuk TSP 85,8 ton, insektisida 1.323 liter/kg, rodontisida 578 kg serta padi unggul VUTW 20 ton dan jagung Arjuna sebanyak 20 ton.

Target untuk program Bimas, akan dilakukan berbagai kegiatan pada musim tanam 1985/1986 yang meliputi:

- | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------|----|------------------|---|-------|----|
| - Insus padi sawah | : | 615 | ha | - Inmum palawija | : | 8.968 | ha |
| - Inmum padi sawah | : | 6.330 | ha | - Inmum sayuran | : | 529,5 | ha |

Peternakan

Langkah-langkah operasional di bidang peternakan dilakukan melalui: (a) Pengolahan bibit ternak dengan mengadakan ternak-ternak sapi/kerbau; (b) Pengamanan ternak dengan cara pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; (c) Pengamatan penyakit hewan; (d) Pengawasan obat hewan, dan (e) Kegiatan penyuluhan di lapangan.

Pengelolaan bibit ternak dilakukan dengan cara pengadaan sapi 400 ekor lewat anggaran APBN dan 650 ekor bantuan "Crash Program" serta pengadaan ternak lainnya sebanyak 450.000 ekor. Operasionalisasi vaksinasi yang digunakan untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan sebanyak 147.450 dosis.

Perikanan

Langkah-langkah operasional di bidang perikanan dilakukan melalui pengadaan alat tangkap, pembuatan kolam ikan, penambahan peralatan dan mesin perikanan, pengadaan sarana serta pembinaan kegiatan penyuluhan dan latihan penangkapan ikan.

Perkebunan

Dalam sektor ini dilakukan kegiatan-kegiatan berupa: (a) Inventarisasi calon petani dan calon lahan PRPTE seluas 300 ha; (b) Pembangunan kantor sebanyak dua unit dan rumah dinas sebanyak satu unit; (c) Pengadaan sarana kerja; (d) Peningkatan ketrampilan petani sebanyak 2.500 KK; (e) Pengendalian hama penyakit; (f) Monitoring dan statistik; (g) Penyuluhan perkebunan rakyat; (h) Penumbuhan kelompok tani; (i) Pembibitan kelapa hibrida sejumlah 5.760 butir; cengkeh sejumlah 24.000 anakan; dan kelapa sejumlah 10.000 butir.

Dalam kegiatan penyuluhan telah mulai digalakkan kegiatan informasi pertanian sebagai embrio terbentuknya Institusi Balai Informasi Pertanian (BIP). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembuatan folder (16.000 eksemplar), poster (12.000 eksemplar), brosur (12.000 eksemplar), foto dokumentasi, mimbar sarasehan, pameran pengkajian dan pemutaran film penyuluhan.

BIP, ialah lembaga penyuluhan pertanian yang mengkaji, memproduksi dan menyebarkan informasi pertanian dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkaji kebutuhan informasi pertanian, untuk menetapkan materi yang diperlukan pemakai;
- b. Mempersiapkan dan menghimpun bahan informasi pertanian;
- c. Memproduksi dan menyebarkan bahan informasi pertanian, sebagai bahan pelajaran untuk petani-petani nelayan beserta keluarganya dan para pemakai lainnya;
- d. Menyediakan dan melengkapi para penyuluh pertanian dengan bahan informasi pertanian;
- e. Melaksanakan bimbingan penerapan metode penyuluhan pertanian bagi para penyuluh pertanian;
- f. Menyelenggarakan beberapa penyuluhan pertanian, sesuai dengan kebutuhan;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi informasi pertanian;

- h. Menjalin kerjasama dengan unit-unit kerja lain yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penyuluhan pertanian;
- i. Meningkatkan peranan dan peranserta petani-nelayan beserta keluarganya dalam kegiatan pembangunan pertanian.

Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian. Tugas pokok forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian di Daerah Tingkat II (FKPP II) adalah merumuskan pelaksanaan kebijaksanaan Penyuluhan Pertanian pada Daerah Tingkat II yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan koordinasi antara sub-sektor pertanian dan instansi lain yang ada kaitannya dengan kegiatan Penyuluhan Pertanian pada Daerah Tingkat II;
- b. Merumuskan pola pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka koordinasi dengan mengikutsertakan Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) dari seluruh Indonesia;
- c. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan koordinasi penyuluhan maupun pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
- d. Menyampaikan permasalahan koordinasi penyuluhan pertanian yang tidak dapat dipecahkan kepada forum koordinasi penyuluhan pertanian di Daerah Tingkat I (FKPP I).

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Tugas pokok Pemimpin Balai Penyuluh Pertanian adalah menyusun program penyuluhan pertanian untuk dilaksanakan di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun program penyuluhan pertanian seluruh sub-sektor pertanian secara musiman dengan bimbingan Penyuluh Pertanian Spesialis yang berada di daerah Tingkat II maupun yang berada di *Balai Teknologi Pertanian (BTP)*;
- b. Penyelenggaraan monitoring pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
- c. Menyelenggarakan latihan untuk penyuluh pertanian lapangan (PPL) secara teratur, pasti dan berkelanjutan;
- d. Menyampaikan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dipecahkan secara setempat kepada Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian Daerah Tingkat II (FKPP);
- e. Menyelenggarakan koordinasi penyuluhan pertanian dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL) seluruh sub-sektor dan instansi lain yang ada kaitannya dengan kegiatan penyuluhan pertanian;
- f. Mengadakan pertemuan kontak tani secara periodik.

Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL). Tugas pokok Kelompok Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan program penyuluhan yang telah ditetapkan oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kunjungan secara teratur, pasti dan berkelanjutan kepada kelompok tani sesuai dengan sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU);
- b. Menyelenggarakan penyuluhan pertanian dengan materi yang terpadu untuk mendinamisasikan kelompok tani melalui pendekatan kelompok;
- c. Memanfaatkan metode penyuluhan pertanian untuk memantapkan sistem kerja latihan dan kunjungan (antara lain demplot, demfarm, dem area, dem unit, siaran pedesaan, kursus tani desa);
- d. Menyusun program penyuluhan pertanian dan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian dengan mengikutsertakan pemuka masyarakat;
- e. Melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Badan Pelaksana Bimas Kecamatan.

PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN SARANA PERHUBUNGAN

Sebelum Timor Timur menjadi bagian integral wilayah Indonesia, selama lebih dari empat abad jaringan transportasi di Timor Timur dapat dikatakan hampir tidak ada samasekali. Jalan beraspal hanya terdapat di kota Dili sepanjang 21 km, dan panjang jembatan tidak lebih dari 60 meter di seluruh Timor Timur. Mengingat bahwa situasi geografis Propinsi Timor Timur adalah daerah pegunungan, maka pembangunan sektor perhubungan mendapatkan prioritas dan penanganan secara khusus. Diharapkan dengan tersedianya jaringan perhubungan yang memadai akan mempunyai dampak yang lebih luas baik bagi pertumbuhan ekonomi, mobilitas penduduk serta meningkatnya keamanan. Mengenai yang terakhir ini (keamanan) kiranya perlu sedikit dijelaskan bahwa kemampuan GPK bertahan di hutan-hutan terutama disebabkan daerah tersebut belum dijamah oleh jaringan transportasi yang memadai. Oleh sebab itu pembangunan di sektor perhubungan menjadi salah satu prioritas di Timor Timur.

Jaringan perhubungan darat di Timor Timur berdasarkan catatan akhir Juni 1986 sudah mencapai lebih dari 3.000 km, yang terdiri atas permukaan jalan dengan Awacas, aspal biasa, tanah dan kerikil. Jalan tersebut antara lain meliputi daerah-daerah:

Laclubar-Manatuto	: ± 50 km	Ainaro - Jumalai	: ± 10 km
Ailiu - Same	: ± 50 km	Lospalos - Uatukerbau	: ± 40 km
G Henuc - Natarbora	: ± 50 km	Dili - Baucau	: ± 120 km
Maliana - Kailako	: ± 15 km	Kom - Lospalos	: ± 35 km
Aituto - Ainaro	: ± 20 km	Iliomar - Lospalos	: ± 40 km

Jaringan perhubungan darat telah mampu pula menghubungkan ibukota Propinsi Timor Timur dengan semua ibukota kabupaten, serta kota-kota di sekitar ibukota kabupaten. Khusus di kabupaten dan kota administratif Dili, mengingat kedudukannya sebagai pusat pemerintahan dan pintu gerbang kegiatan perekonomian ke kabupaten-kabupaten lainnya, baik sarana maupun prasarana transportasi dan komunikasi terlihat cukup memadai. Permukaan jalan sudah beraspal, baik dalam kota Dili maupun sampai ke ibukota-ibukota kecamatan. Untuk dalam kota tersedia angkutan penumpang berupa taksi dan bis, angkutan pedesaan berupa pick-up, dan untuk luar kota tersedia pula mobil angkutan barang dan bis penumpang antarkota. Mengingat banyaknya sungai-sungai yang melintas di Timor Timur maka untuk menunjang lancarnya perhubungan darat telah dibangun 18 jembatan. Salah satu jembatan yang terpanjang di Timor Timur adalah jembatan Lacro di Kabupaten Manatuto (\pm 270 meter). Dengan lebih mudahnya prasarana perhubungan darat, maka jumlah kendaraan meningkat dengan pesat. Mulai tahun 1976 sampai dengan 1984 kendaraan bermotor telah naik 400%. Pada tahun 1985 jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah, yaitu sebanyak 7.576 buah yang terdiri dari: 1.129 sedan, 1.859 jeep, pick-up dan truk, 122 bis dan 4.466 sepeda motor.

Selain itu sejumlah armada PN Damri secara rutin telah melayani trayek baik untuk dalam kota Dili, antarkota maupun antarpropinsi. Trayek dalam kota Dili mencakup Mercado-Bakara pp.; Mercado-Komoro pp.; Mercado-Talbere-Hospital pp.; trayek antarkota meliputi Dili-Baucau-Viqueque-Lospalos pp.; Dili-Aileu-Mandese-Same-Ainaro pp.; Dili-Liquisa-Maubara pp.; Dili-Ermera-Maliana pp. Sedang trayek antarpropinsi telah menghubungkan Dili-Kupang (Propinsi Nusa Tenggara Timur) pp. lewat Maliana dan Atambua. Selain PN Damri, beberapa perusahaan swasta juga telah mengoperasikan bis-bisnya sebagai alat transportasi umum ke seluruh pelosok Timor Timur.

Perkembangan jaringan perhubungan laut merupakan sarana komunikasi yang cukup penting pula di Timor Timur. Selain di Dili (Pelabuhan Dili) yang merupakan pelabuhan yang terbesar di Timor Timur dengan panjang dermaga 180 meter dan kedalaman 9 meter, serta mampu dirapati kapal dengan bobot 5.000 ton, Timor Timur memiliki beberapa pelabuhan lainnya seperti di Pante

Makasa (Ambenu), Maubara (Liquisa), Manatuto, Laga (Baucau), Con dan Jaco (Lautem), Alcambata dan Be Assu (Viqueque), Betano (Same) dan Suai. Untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya yang semula hanya dilakukan dengan kapal layar, maka sejak tahun 1983 perhubungan telah dilakukan dengan kapal perintis jenis-jenis Elang.

Sementara itu mulai bulan Agustus 1986, pelabuhan laut Dili akan dilayari oleh kapal penumpang mewah "Kelimutu," berkapasitas 920 penumpang yang akan melayani trayek secara berkala antara Dili dengan kota-kota di NTT, NTB, Bali dan Pulau Jawa. Dengan demikian diharapkan hubungan Timor Timur dengan propinsi lainnya semakin lancar dan meningkat.

Sebelum integrasi, terdapat pelabuhan udara di tengah-tengah kota Dili dengan panjang landasan hanya 790 meter sehingga hanya dapat didarati oleh pesawat-pesawat kecil jenis Dove dan DC-3. Pelabuhan udara ini sekarang tidak dipergunakan lagi sebagai tempat pendaratan pesawat tetapi dipergunakan sebagai landasan helikopter. Mengingat perhubungan udara juga merupakan sarana perhubungan yang penting maka pada tahun 1981 telah selesai dibangun pelabuhan udara "Komoro" yang dapat melayani pesawat terbang jenis Fokker 28 dengan trayek Jakarta-Denpasar-Kupang-Dili pp., Surabaya-Denpasar-Kupang-Dili pp.

Selain pelabuhan udara "Komoro," terdapat lapangan terbang perintis di beberapa kabupaten yang dapat didarati pesawat-pesawat terbang jenis CASA, Cessna dan Twin Otter. Sejak April 1983, Merpati Nusantara Airlines telah membuka trayek penerbangan perintis dengan route Kupang-Dili-Maliana-Kovalima pp. dan Kupang-Atambua-Dili pp., yang masing-masing dilakukan penerbangan dua kali seminggu. Di Baucau juga terdapat lapangan terbang dengan ukuran landasan 2.500×45 meter. Dengan kapasitas tersebut lapangan terbang ini mampu didarati pesawat terbang jenis DC-10. Namun ditinjau dari aspek ekonomis, membuka trayek penerbangan ke daerah itu sekarang masih belum menguntungkan. Dalam tahun 1986 jaringan perhubungan darat tampak semakin ditingkatkan.

MENINGKATKAN PELAYANAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN

Kemiskinan dan keterbelakangan rakyat Timor Timur selama masa penjajahan mempunyai akibat yang parah terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Jenis penyakit yang diidap oleh rata-rata masyarakat Timor Timur adalah malaria, TBC, influenza, penyakit kulit (scabies), diaree, anemia, penyakit mata, caries gigi, infeksi kulit dan jaringan di bawah kulit, conjunctivitis, infeksi akut, saluran pernapasan, frambosia, penyakit gigi, mulut, telinga, sendi otot, gangguan penyakit karena kurang gizi dan lain-lain.

Tabel 24

PERBANDINGAN SARANA FISIK KESEHATAN DI PROPINSI TIMOR TIMUR
PADA MASA PENJAJAHAN PORTUGIS DIBANDINGKAN DENGAN
SESUDAH 10 TAHUN PEMERINTAHAN TIMOR TIMUR

No.	Jenis Sarana Fisik	Zaman/Masa	
		Portugis	Setelah 10 tahun membangun
1.	Hospital Central RSUP	1	1
2.	Hospital Regional RS Kabupaten	2	2
3.	Hospital Rural Puskesmas	11	33
4.	Hospital Sanitario RS TBC	1	*
5.	Hospital Militer Rumah Sakit ABRI	1	2
6.	Hospital Particular Rumah Sakit Swasta	1	0
7.	Posto Sanitario Puskesmas Pembantu	25	117
8.	Posto Contwatato Balai Pengobatan: Pemerintah Swasta	13	34 17
9.	Pos Pelayanan Kesehatan		150
10.	Klinik KB		50
11.	Farmasi	1	
12.	Gudang Farmasi Kabupaten		4
13.	Apotik: Pemerintah - Kimia Farma Swasta		1 2
14.	Balai Labkes		1
15.	Gudang DDT		9
16.	Puskesmas Keliling		48
17.	Laboratorium Balai POM		1
18.	BKIA		4

Catatan: *Kebijaksanaan pemberantasan TBC dilakukan di Puskesmas.

Langkah pertama yang dilakukan untuk menanggulangi penyakit dan meningkatkan kesehatan rakyat adalah dengan merehabilitasi pusat-pusat kesehatan, membangun rumah sakit umum di Dili dan memperbaiki pabrik farmasi serta pengadaan alat-alat kesehatan. Selain itu dibangun pula sarana fisik (yaitu Puskesmas dan Puskesmas pembantu) di seluruh propinsi agar dapat menjangkau rakyat sebanyak-banyaknya. Selama satu dasawarsa ini sudah banyak sekali dibangun sarana fisik kesehatan di Timor Timur dibandingkan dengan masa sebelumnya. Sebagai ilustrasi perkembangan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 24.

Demikian pula jumlah tenaga medis, para medis maupun administrasi selalu diusahakan agar dapat melayani masyarakat sebaik-baiknya. Namun demikian jumlah yang ada dewasa ini masih kurang memadai bila dibandingkan dengan masalah yang dihadapi. Untuk lebih jelasnya diberikan pula tabel keadaan tenaga kerja Pebruari 1985, serta tambahan tenaga yang diharapkan sampai dengan akhir Pelita IV di Propinsi Timor Timur.

Usaha yang dilakukan sampai sekarang ini telah membuahkan hasil yang memadai. Kesungguhan ini dapat dilihat dari partisipasi para dokter yang bersedia ditempatkan di Timor Timur. Sehingga perbandingan dokter dan penduduk di Timor Timur sudah mencapai 1 : 7.000, meskipun secara nasional perbandingan tersebut adalah 1 : 3.000.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis dan para medis, pada tahun 1980 telah dibuka Sekolah Perawat Kesehatan (SPK). Selain itu pada tahun 1982 dilakukan pula program perbaikan gizi yang terutama ditujukan kepada bayi, anak balita, ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui. Program itu mendapat bantuan dari Unicef yang meliputi tujuh kecamatan, yaitu di Luro, Il-iomar, Ilatorali, Dilor, Natarbora, Laolubar dan Turisoai. Jumlah anak balita yang mengikuti program ini semula 60% dengan keadaan bergizi baik, 30% bergizi kurang dan 10% bergizi buruk. Kemudian keadaan gizi anak-anak balita tersebut meningkat menjadi 70% bergizi baik, 25,2% bergizi kurang dan 4,8% bergizi buruk. Untuk pencegahan gondok endemik, telah dilakukan penyuntikan Lipiodol kepada 13.200 penduduk, sedang pemberian Vitamin A dosis tinggi untuk mencegah penyakit rabun senja/kebutaan telah diberikan kepada 5.602 anak balita. Untuk memonitor status gizi anak telah diisi 15.773 Kartu Menuju Sehat (KMS), yang aktif mengikuti program ini rata-rata berjumlah 7.058 anak balita.

Untuk meningkatkan kesehatan lingkungan telah dibangun penyediaan air bersih pedesaan, jamban keluarga dan sarana pembuangan air limbah, yang dilaksanakan sejak tahun 1980/81. Sampai saat ini telah dibangun 13 unit perpipaan, 1 sumur artesis, 13 unit perlindungan mata air, 52 unit penampungan air hujan, 3.400 sumur pompa tangan dangkal, 1.765 unit jamban keluarga,

1.587 unit sumur pompa tangan dalam, 990 unit sumur gali, 305 unit sarana pembuangan air limbah dan 22 unit sarana mandi, cuci dan kakus.

Untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi, anak balita dan menurunkan fertilitas, menuju terciptanya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) sejak tahun 1984/85, telah dilaksanakan lima program terpadu yang terdiri dari Program Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA), Program Perbaikan Gizi, Program Imunisasi, Program Penanggulangan Diare dan Program Keluarga Berencana (KB).

Khusus program KB di Timor Timur perlu lebih dijelaskan bahwa tujuannya bukan semata-mata menekan angka kelahiran, melainkan juga menitikberatkan kepada usaha peningkatan kesejahteraan ibu dan anak dengan mengatur jarak kelahiran. Akseptor KB kini tercatat 6.062 orang. Sebagian besar akseptor menggunakan pil dan suntik di samping IUD. Untuk menunjang program KB ini terdapat 64 klinik KB.

Mengingat serta menyadari bahwa pengenalan Program KB Nasional di Propinsi Timor Timur baru dimulai pada Pelita III, yaitu baru sekitar 6 tahun -- sedangkan di Jawa/Bali telah 16 tahun -- maka dasar pertimbangan dalam melaksanakan program ini adalah dimulai dengan penyuluhan tentang maksud, tujuan serta manfaat daripada pelaksanaan program bagi peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan pada umumnya. Karena dengan merencanakan kelahiran anak secara bertanggung jawab, akan lebih mudah mencapai taraf kehidupan keluarga yang lebih bermutu daripada sebelumnya.

Pelaksanaan Program KB akan ditempuh secara sukarela dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab oleh pasangan suami-isteri yang masih subur, dilakukan dengan cara:

- a. Diberikan penyuluhan oleh para motivator/penyuluh, baik yang berasal dari unsur pemerintah maupun dari unsur masyarakat, sehingga tertanam kesadaran serta tanggung jawab di kalangan para calon peserta KB untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya. Penyuluhan dapat dilakukan secara massal, secara kelompok maupun secara tatap muka, tergantung dari situasi yang dihadapi di lapangan. Penyuluhan diberikan dengan cara penyuluhan secara tatap muka, dengan berkunjung dari rumah ke rumah, memberi kesempatan berdialog secara bebas antara petugas penyuluhan dengan para calon akseptor. Apabila diingat, bahwa para penyuluh itu sebagian besar adalah penduduk setempat, maka mudah dipahami betapa akrab suasana yang timbul dalam proses penyuluhan tersebut.
- b. Bila penyuluhan itu mengakibatkan para calon akseptor bersedia untuk menjadi peserta KB, mereka dibujuk ke Puskesmas terdekat, guna mendapat pelayanan yang mereka sukai: apakah mau dengan cara KB alamiah ataupun dengan cara lainnya. Hal ini sepenuhnya diserahkan pada para

Tabel 25

**KEADAAN TENAGA SAMPAI DENGAN 1 FEBRUARI 1985, TAMBAHAN TENAGA
SAMPAI DENGAN AKHIR REPELITA IV PROPINSI TIMOR TIMUR**

No.	Kategori Tenaga	Kebutuhan Tenaga sampai dengan akhir Repelita IV	Keadaan Tenaga per 15 Pebruari 1985	Tambahan Tenaga selama Repelita IV
1.	Dokter Ahli Dalam	2	1	1
2.	Dokter Ahli Anak	2	1	1
3.	Dokter Ahli Bedah	2	1	1
4.	Dokter Ahli Obgyn	2	1	1
5.	Dokter Umum	167	77	90
6.	Dokter Gigi	21	10	11
7.	Farmasi S1, S3	12	4	8
8.	Gizi S1, S3	2	-	2
9.	Kesehatan Masyarakat S1, S3	2	-	2
10.	Kesehatan Lingkungan S1, S3	1	-	1
Jumlah Medis		213	95	118
11.	SPK/SGPR/AKPER	658	184	474
12.	SPPH/APK	136	32	104
13.	SPRG/AKG	28	8	20
14.	SMAK/AAM	29	3	26
15.	SPAG/Gizi	34	4	30
16.	SMF	23	-	23
17.	AFIS/ARM	1	1	-
18.	AKNES	4	-	4
19.	ATEM	2	1	1
20.	APRO/SEK. Peng/ ROXI	6	1	5
21.	SMA + 1 th./SPPM	114	40	74
22.	SMA + th./Pekarya	97	-	97
23.	SMP + 1 th./SD + 4 th.	91	91	-
24.	SD + Kurang 1 th.	821	821	-
Jumlah Para Medis		2.044	1.186	858
25.	S1/S3 Non-Medis	5	2	3
26.	Tata Usaha Sarjana Muda	10	2	8
27.	Tata Usaha SMA	211	87	130
28.	Tata Usaha SMP	257	97	160
29.	Tata Usaha SD	352	166	186
Jumlah Non-Medis		841	354	487
Jumlah Seluruh		098	1.635	1.463

Tabel 26

**REALISASI PROGRAM REPELITA III DAN RENCANA PROGRAM DALAM
REPELITA IV PROPINSI TIMOR TIMUR**

Jenis Kegiatan/Program	Satuan	Realisasi Sampai Akhir Repelita III	Repelita IV	Tahun				
				1984/85	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89
A. PENGEMBANGAN SARANA KESEHATAN								
PENGEMBANGAN PUSKESMAS								
I.								
1.	Pembangunan Puskesmas	buah	28	14	5	3	3	3
2.	Pembangunan Puskesmas Pembantu	buah	102	23	12	-	9	7
3.	Pembangunan Pos Pelayanan Kesehatan	buah	50	35	-	-	-	-
4.	Pembangunan Rumah Dokter	buah	27	7	2	-	6	6
5.	Pembangunan Rumah Paramedis	buah	24	50	4	-	23	23
REHABILITASI/PERBAIKAN								
II.								
1.	Perbaikan Puskesmas	buah	33	22	3	6	5	8
2.	Perbaikan Puskesmas Pembantu	buah	25	84	8	1	39	39
3.	Perbaikan Rumah Dokter	buah	-	37	4	7	13	13
4.	Perbaikan Rumah Paramedis	buah	13	33	3	5	13	13
5.	Perbaikan Puskesmas Keliling	buah	-	52	21	-	16	16
PENGEMBANGAN/PERLUASAN/ PENINGKATAN								
III.								
1.	Perluasan Puskesmas	buah	5	12	2	3	3	4
2.	Peningkatan Puskesmas Pembantu	buah	-	29	6	5	8	10
PEMBELIAN/PENGADAAN								
IV.								
1.	Pengadaan Puskesmas Keliling	buah	34	81	7	8	12	12
2.	Pengadaan Sepeda Motor	buah	60	1	1	-	-	1
3.	Pengadaan Sepeda	buah	109	77	5	8	26	26

Sumber: Pemda Timor Timur.

calon untuk memilihnya, dengan mendapat keterangan-keterangan yang diperlukan. Atas putusan pilihannya, barulah para petugas pelayanan (medis atau paramedis) memberikan pelayanan yang diperlukan.

Apabila para calon belum bersedia menjadi peserta KB, para penyuluh dapat berbuat sesuatu, selain meninggalkan pesan agar direnungkan kembali secara masak-masak, apa yang pernah mereka perbincangkan. Sering terjadi, setelah lewat beberapa waktu, calon tadi lalu mengambil keputusan untuk mencoba menjadi peserta KB. Andaikata calon tetap tidak bersedia menjadi peserta KB, maka tak ada satu pun sanksi yang dapat dijatuhkan kepadanya. Dan memang nyatanya: tidak ada sanksi untuk hal seperti itu.

Dengan melihat uraian di atas dapat diketahui bahwa telah dilakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan taraf kesehatan dan gizi kepada rakyat Timor Timur. Oleh karena itu pula maka tidak benar bilamana ada pihak-pihak tertentu yang masih menyatakan bahwa kesehatan rakyat Timor Timur semakin mundur, demikian pula mengenai gizi. Mengenai yang terakhir ini malahan Palang Merah Internasional (ICRC) telah melakukan survei mengenai nutrisi pada bulan Juni 1985 di 25 desa yang dianggap rawan pangan. Kesimpulan survei tersebut dinyatakan sebagaimana dimuat dalam bulletin ICRC pada bulan Agustus 1985 adalah sebagai berikut: "On the whole, the medico-nutritional situation of the inhabitants of the villages visited did not show any serious problems. No assistance was thought necessary, except for three villages." Meskipun hasil survei adalah positif tetapi karena sedikit banyak mengindikasikan adanya potensi kerawanan pangan (meskipun dari 25 desa hanya tiga desa yang dianggap perlu dibantu), maka Gubernur (Pemda Timor Timur) telah membentuk panitia yang ditugaskan untuk selalu memantau situasi pangan di seluruh Timor Timur, dan segera melakukan tindakan bilamana terdapat daerah yang mengalami kekurangan pangan. Survei semacam itu dilakukan lagi oleh ICRC pada bulan Desember 1985, terutama tiga desa yang pada hasil survei Juni 1985 dianggap rawan pangan. Berdasarkan hasil survei bulan Desember 1985 memang desa-desa yang dianggap rawan pangan telah mengalami kemajuan yang memadai.

Meskipun di bidang kesehatan kemajuan telah banyak dicapai, tetapi masih terdapat beberapa hambatan, yaitu: (1) Keterbatasan baik tenaga medis, maupun paramedis; (2) fasilitas seperti alat transportasi, komunikasi belum memadai; lebih-lebih mengingat kondisi geografis yang kurang menguntungkan; (3) tingkat pendidikan masyarakat masih sederhana sehingga seringkali rakyat lebih percaya kepada dukun daripada kepada dokter/atau tenaga medis lainnya.

Mengingat hambatan-hambatan yang dihadapi maka selanjutnya disusun rencana untuk: (1) meningkatkan jumlah tenaga medis/para medis, serta sarana dan prasarana kesehatan; (2) meningkatkan jangauan pelayanan; (3)

meningkatkan keterampilan/pengetahuan petugas kesehatan; (4) meningkatkan pemberantasan penyakit menular; (5) meningkatkan kesehatan lingkungan.

PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan Dasar

Pertumbuhan pendidikan tingkat dasar (Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar) di Propinsi Timor Timur secara kuantitatif berkembang sangat pesat dan menggembirakan. Pesatnya perkembangan tersebut disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak.

Dari tabel berikut ini segera dapat diketahui bahwa masalah yang dihadapi dalam tingkat pendidikan ini adalah kurangnya tenaga guru.

Pada tahun ajaran 1985/1986 jumlah Taman Kanak-kanak yang ada sebanyak 17 (tujuh belas) buah, dengan jumlah murid 1.666 (seribu enam ratus enam puluh enam) anak. Dari Taman Kanak-kanak yang ada, 16 (enam belas) buah berstatus Taman Kanak-kanak Swasta dan 1 (satu) buah Taman

Tabel 27

JUMLAH MURID, JUMLAH SISWA TAMAN KANAK-KANAK
PER KABUPATEN DI TIMOR TIMUR 1985/86

No. Urut	Kabupaten	Sekolah			Jumlah Guru		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah Siswa
1.	Kovalima	-	-	-	-	-	-
2.	Ainaro	-	1	1	1	-	39
3.	Manufahi	-	1	1	1	-	33
4.	Viqueque	-	1	1	2	-	32
5.	Lautem	-	1	1	1	1	68
6.	Baucau	-	-	-	-	-	-
7.	Manatuto	-	-	-	-	-	-
8.	Dili	1*	7	8	28	4	1.075
9.	Aileu	-	1	1	-	1	48
10.	Liquisa	-	-	-	-	-	-
11.	Ermera	-	2	2	2	3	287
12.	Bobonaro	-	1	1	1	-	42
13.	Ambeno	-	1	1	-	-	42
Jumlah		1*	16	17	37	9	1.666

*Taman Kanak-kanak persiapan negeri.

Sumber: Pemda Timor Timur.

Kanak-kanak Persiapan Negeri yaitu: Taman Kanak-kanak Pembina Tingkat Propinsi yang berada di Kabupaten Dili. Sedang jumlah tenaga guru yang ada sebanyak 45 (empat puluh lima) orang terdiri dari guru negeri yang diperbantukan dan guru swasta (honorar), yang sebagian masih perlu ditingkatkan kemampuannya. Dengan melihat jumlah dan keadaan tenaga guru Taman Kanak-kanak yang ada, maka kualitas Pendidikan Taman Kanak-kanak di Propinsi Timor Timur masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemahaman dan penyajian kurikulum. Keadaan Taman Kanak-kanak pada tahun ajaran 1985/1986 tergambar dalam Tabel 27.

Permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan tingkat sekolah dasar adalah masih diperlukannya jenis sekolah ketrampilan, mengingat anak usia sekolah 7-12 tahun di daerah terpencil masih kecil kemungkinannya melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.

Pendidikan Guru

Sekolah Pendidikan Guru untuk Sekolah Dasar

Kekurangan tenaga guru ini akan semakin membesar jumlahnya mengingat dengan telah dicanangkan Wajib Belajar, berarti semua anak usia 7-12 tahun harus memasuki lembaga pendidikan tingkat dasar. Data anak usia 7-12 tahun belum bersekolah tahun 1985/1986 diperkirakan seluruhnya ± 22.000 , dan kalau dijumlah anak tersebut masuk SD berarti diperlukan tambahan guru lagi sebanyak 880 orang.

Dengan melihat kenyataan tersebut, maka jelaslah bahwa peranan sekolah/kursus pendidikan guru semakin menentukan untuk memenuhi kekurangan guru tersebut demi suksesnya Wajib Belajar di Indonesia.

Untuk mengatasi kekurangan guru SD, maka sejak tahun 1979, telah didirikan lembaga Pendidikan Guru di Propinsi Timor Timur, dan pada tahun 1985/1986 ini telah ada 5 buah Lembaga Pendidikan Guru SD dan 1 buah PSGMTP (Pendidikan Sekolah Guru Menengah Tingkat Pertama). Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang lembaga pendidikan guru (SPG, KPG dan SGO) dapat dilihat pada Tabel 28.

Sekolah Pendidikan Guru untuk Pendidikan Menengah Tingkat Pertama

Untuk mengatasi kekurangan tenaga guru SMP, di Propinsi Timor Timur telah didirikan PGSMTN Negeri Dili. Keadaan PGSMTN Negeri Dili

Tabel 28

JUMLAH SEKOLAH DITINJAU DARI LEMBAGA, GURU DAN SISWA SEKOLAH
PER KABUPATEN TAHUN 1985

No. Kabupaten	Jumlah SD			Jumlah Guru			JUMLAH SISWA						Jumlah Ruang
	Negeri	Swasta	Jumlah	PNS	Calon PNS	Jumlah	I	II	III	IV	V	VI	Jumlah
1. Covalima	31	8	39	139	13	152	1.314	993	934	791	755	669	5.435
2. Ainaro	35	4	39	186	-	186	1.887	1.248	1.415	1.127	1.125	958	7.750
3. Manufahi	20	5	25	149	3	152	230	1.107	1.090	953	899	724	7.074
4. Viqueque	27	5	32	222	1	223	3.099	2.577	1.962	1.542	1.243	886	11.209
5. Lautem	31	3	34	180	6	186	2.825	1.821	1.509	1.213	985	838	9.191
6. Baucau	21	32	53	315	54	369	4.541	3.462	2.558	2.032	1.702	1.519	15.414
7. Manatuto	18	1	19	143	10	153	1.174	976	817	735	544	393	4.639
8. Dili	33	7	40	527	-	527	3.727	3.190	2.988	2.460	2.006	1.763	16.134
9. Aileu	13	4	17	90	4	94	590	628	52	524	413	332	3.048
10. Liquica	26	3	29	111	4	115	2.027	1.073	864	833	622	601	6.020
11. Ermera	43	-	43	207	-	207	3.366	1.865	1.362	1.018	772	829	8.912
12. Bobonaro	66	9	75	332	22	354	3.248	2.147	1.654	1.395	1.167	824	10.435
13. Ambeno	36	4	40	177	15	192	1.962	1.018	888	799	488	412	5.567
Jumlah	400	85	485	2.778	132	2.910	3.205	22.105	18.461	15.322	12.741	10.448	111.228
													2.107

Sumber: Pemda Timor Timur.

Tabel 29

JUMLAH SEKOLAH GURU DAN PARA SISWANYA PADA TAHUN 1985/1986

No.	Nama Sekolah dan Tempat	Guru Tetap	Jumlah Murid			
			I	II	III	Total
1.	SPG Negeri Dili	17	392	438	310	1.140
2.	SPGK Dili	6	81	55	45	181
3.	KPG Negeri Dili	1	104	105	-	209
4.	SPGK Maliana	5	95	-	-	95
5.	SGO Persatuan Negeri Baucau	-	99	-	-	99

Sumber: Pemda Timor Timur.

1985/1986 adalah sebagai berikut:

- Jurusan Bahasa Indonesia	:	41 orang	(28 putra dan 13 putri)
- Jurusan Matematika	:	14 orang	(8 putra dan 6 putri)
- Jurusan IPA	:	28 orang	(23 putra dan 5 putri)
Angkatan II (Semester I)			
- Jurusan Bahasa Inggris	:	23 orang	(10 putra dan 13 putri)
- Jurusan Matematika	:	17 orang	(10 putra dan 7 putri)
- Jurusan Olahraga/Kesehatan	:	42 orang	(32 putra dan 10 putri)

Pendidikan Menengah Tahun Pertama

Minat belajar generasi muda Timor Timur ternyata cukup besar, hal itu dapat dilihat dari Tabel 30. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kebu-

Tabel 30

RENCANA TAMBAHAN RUANG BELAJAR DAN TAMBAHAN GURU SMP SETIAP KABUPATEN PADA TAHUN AJARAN 1986/1987

No.	Kabupaten	Murid*	Ruang Belajar			Guru		
			Kebutuhan	Telah Ada	Rencana Tambahan	Kebutuhan	Telah Ada	Rencana Tambahan
1.	Dili	4.154	104	30	74	156	66	90
2.	Manatuto	459	12	18	-	51	15	36
3.	Baucau	1.932	49	30	19	172	19	100
4.	Lautem	977	25	22	3	82	10	72
5.	Viqueque	719	18	23	-	97	12	85
6.	Manufahl	867	22	16	6	53	11	42
7.	Kovallma	1.337	35	21	14	101	13	88
8.	Ainaro	1.521	38	24	14	85	14	71
9.	Aileu	402	10	12	-	48	10	38
10.	Liquisa	663	17	12	5	60	10	50
11.	Bobonaro	1.406	36	29	7	157	25	132
12.	Ambeno	1.101	28	21	7	75	19	56
13.	Ermera	670	17	23	-	111	28	83
Jumlah		16.208	411	281	149	1.249	252	997

*Murid 1986/1987: Jumlah murid 1986/87 dikurangi perkiraan lulusan SMP 1985/86 kemudian ditambah bibit lulusan SD 1985/86.

Sumber: Pemda Timor Timur.

tuhan ruang dan guru untuk tahun 1986/87 cukup besar. Jumlah ini tampaknya akan semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Pendidikan Menengah Tingkat Atas

Pendidikan Menengah Tingkat Atas terdiri dari Pendidikan Menengah Umum dan Pendidikan Menengah Kejuruan. Pendidikan Menengah Kejuruan terdiri dari Sekolah Teknologi Menengah dan Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas, serta Pendidikan Kejuruan lainnya.

Pendidikan Menengah Umum Tingkat Atas. Berbeda dengan tingkat pendidikan Dasar dan Menengah Pertama, jumlah guru tingkat SMA cukup menggembirakan. Ratio guru-murid adalah 1: 9 padahal idealnya 1 : 35/40. Namun demikian, dengan diubahnya 4 (empat) SMA swasta menjadi SMA Negeri, ratio guru-murid menjadi lebih proporsional. Namun yang masih perlu ditingkatkan adalah jumlah ruang belajar, oleh karena itu direncanakan suatu perluasan ruang belajar seperti tersebut dalam Tabel 31.

Sekolah Menengah Tingkat Atas Kejuruan. Bertitik-tolak dari pelaksanaan pembangunan daerah di Timor Timur, masalah penyediaan tenaga kerja yang trampil merupakan hal yang mendesak. Usaha untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Menengah Tingkat Atas Kejuruan tidak semudah dibandingkan pendirian Lembaga Pendidikan Menengah lainnya. Pemilihan jenis kejuruan memerlukan penelitian seksama ditinjau dari penyediaan sarana penunjang yang berupa tenaga guru dengan kualifikasi tertentu, peralatan, dan kemungkinan dapat berkembang dan berlanjutnya sekolah tersebut.

Sampai saat ini di Timor Timur baru dapat didirikan beberapa jenis sekolah kejuruan dengan daerah penyebarannya, seperti tersebut dalam Tabel 32.

Pada tahun ajaran 1985/1986 dari jumlah sekolah menengah tingkat atas kejuruan yang memiliki kelas I sampai dengan kelas III baru SMEA Negeri Dili dan STM Katolik Don Bosco. Sedang SMEA Negeri Dili sejak tahun 1982/1983 telah meluluskan siswanya seperti tersebut dalam Tabel 33.

Sebagian besar lulusan SMEA tersebut diserap oleh berbagai instansi di Timor Timur, dan sebagian kecil saja yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau bekerja di instansi swasta. Seperti sudah diuraikan di atas tentang kesulitan pendirian Pendidikan Kejuruan, maka penambahan jenis sekolah kejuruan yang masih relevan dengan kondisi alam Timor Timur, adalah bidang pertanian.

Tabel 31

TAMBAHAN RUANG BELAJAR, DAN TAMBAHAN GURU SETIAP SMA NEGERI
PADA TAHUN AJARAN 1986/87

No.	Nama Sekolah	Jumlah Ruang Belajar				Guru		
		Murid*	Kebutuhan	Telah Ada	Rencana Tambahan	Kebutuhan	Telah Ada	Rencana Tambahan
1.	SMAN Dili	951	24		12	48	35	13
2.	SMAN Maliana	416	11		8	24	10	14
3.	SMAN Baucau	132	4		1	24	15	9
4.	SMAN Alnaro	136	4		1	23	-	24
5.	SMAN Suai	-	-		-	24	-	24
6.	SMAN Gleno	-	-		-	23	-	24
7.	SMAN II Dili	-	4		4	24	-	24
Jumlah		1.035	47	21	26	190	60	132

Catatan: *Murid 1986/87: Jumlah murid 1985/86 dikurangi perkiraan lulusan SMA 1985/86 kemudian ditambah bibit/penerimaan siswa baru 1986.

Tabel 32

DATA KUANTITATIF SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS
KEJURUAN PROPINSI TIMOR TIMUR TAHUN 1985/1986

No.	Nama Sekolah	Jumlah		Guru		
		Kelas	Siswa	GT	GTT	Jumlah
1.	SMEAN Dili	17	774	22	22	44
2.	STM Pers. Negeri Dili	3	128	-	8	8
3.	SMKK Pers. Negeri Dili	1	30	-	5	5
4.	SMOS Pers. Negeri Dili	2	122	-	8	8
5.	STMK Don Bosco	6	93	1	10	11
6.	SMEA Oekusi	4	183	-	16	16
7.	SMEA Manatuto	1	46	-	10	10
8.	SMEA Liquisa	2	60	-	7	7
9.	SMEA Aileu	2	67	-	16	16
Jumlah		38	1.503	23	102	125

Catatan: *Jurusan Bangunan/mebel : 10 siswa
Jurusan mesin konstruksi : 16 siswa

Tabel 33

DATA KUANTITATIF LULUSAN SMEA PROPINSI TIMOR TIMUR

No.	Tahun	Jurusan	Calon	Tak Lulus	Lulus
1.	1982/1983	Tata Buku	42	-	42
2.	1983/1984	Tata Buku	88	8	80
3.	1984/1985	Tata Buku	159	9	150
Jumlah			289	17	272

Pendidikan Tinggi

Bagi lulusan SLTA yang hendak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi masih harus dilakukan di luar Timor Timur. Kegiatan ini telah dilakukan semenjak Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1976. Sejak tahun itu hingga sekarang sudah ada kurang lebih 600 putera Timor Timur yang belajar di berbagai Perguruan Tinggi/Akademi dan berbagai Fakultas/Jurusan. Sebagian besar mereka mendapatkan beasiswa baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dan sudah banyak yang telah berhasil, terutama mereka yang belajar di APDN. Untuk tahun ajaran 1985/1986 jumlah mahasiswa yang berasal dari Timor Timur berjumlah 151 orang. Di samping itu dewasa ini mereka diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah di Universitas Terbuka. Sementara itu, pada bulan Oktober 1986 telah dibuka Universitas "Timor Timur" di Dili dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang memadai dalam rangka pembangunan di Timor Timur.

Kegiatan bidang pendidikan luar sekolah tidak kurang mendapatkan perhatian, bahkan kegiatan tersebut dilaksanakan sampai pada tingkat desa. Secara garis besar kegiatan tersebut meliputi empat macam yaitu: (a) Kejar Pendidikan Dasar (Paket A); (b) Kejar PKK; (c) Kejar Kejuruan (ketrampilan); dan (d) Kejar Usaha.

Bidang keolahragaan serta pembinaan generasi muda juga telah berkembang secara memadai. Untuk menampung gairah berolahraga di kalangan pemuda telah terbentuk berbagai perkumpulan olahraga, antara lain di Dili telah didirikan sasana tinju dengan harapan kelak akan dapat dimunculkan petinju yang berpredikat nasional/internasional dari Timor Timur. Pembinaan generasi muda dilaksanakan melalui sekolah antara lain dengan jalan penataran P-4 bagi siswa kelas I SMTP/SMTA, pengiriman pemuda untuk program ke luar negeri, pemilihan calon anggota Paskibraka, dan penataran kemampuan kepemimpinan generasi muda, serta pengiriman pemuda/pelajar ke luar negeri yaitu ke Kanada dan Jepang dalam rangka program persahabatan pemuda antarbangsa.

MENINGKATKAN KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAHAN

Dari segi pemerintahan, Propinsi Timor Timur setelah integrasi dengan Republik Indonesia, telah mengalami perubahan yang mendasar. Perubahan itu terutama karena penataan lembaga-lembaga pemerintahan yang sebelumnya diatur sebagai daerah jajahan (Portugal) kemudian diubah menjadi bagian dari negara yang mempunyai kedaulatan tersendiri.

Institusi-institusi pemerintahan disesuaikan dengan alam kemerdekaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini antara lain berkaitan dengan peranan gereja yang pada zaman penjajahan Portugal merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan, dalam alam kemerdekaan peranan gereja ditempatkan sebagai lembaga keagamaan yang diberikan kebebasan mengembangkan agama, tetapi tidak lagi menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan. Dengan demikian lembaga gereja lebih dapat memusatkan pembinaan iman dan spiritual umatnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah mulai dibentuk lembaga-lembaga pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia. Pada zaman penjajahan struktur pemerintahan terdiri dari: 13 *Administracao de Concelho* (setingkat kabupaten); 64 *Post Administrativo* (setingkat kecamatan); 29 *Regulado* (Raja); 408 *Suko* (suku); 1.717 *Povoacao* (setingkat desa). Setelah integrasi struktur tersebut menjadi sebagai berikut: 13 kabupaten; 64 kecamatan; dan 442 desa.

Di dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian sangat diperhatikan hukum adat dan tradisi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian lembaga-lembaga sosial yang sudah ada sejak zaman Portugal tidak perlu dihapuskan sejauh hal itu sejalan dengan semangat UU no. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa.

Sebagai upaya untuk meningkatkan dinamika pemerintahan daerah agar dapat melaksanakan tugasnya, tidak hanya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, melainkan juga melaksanakan pembangunan, maka dalam kurun waktu satu dasawarsa telah dibentuk instansi-instansi di tingkat daerah baik kedinasan maupun instansi di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana di propinsi Indonesia lainnya. Maka dapat dikatakan bahwa secara kelembagaan dan struktural Propinsi Timor Timur tidak jauh berbeda dengan propinsi di Indonesia lainnya. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah mengisi lembaga-lembaga tersebut dengan aparatur yang memadai baik kecakapan maupun pengabdianya agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lancar, demikian pula dalam penyelenggaraan pembangunan. Dalam hal ini perlu dicatat pula bahwa bidang tugas aparatur pemerintahan tidak saja memerlukan ketrampilan teknis melainkan membutuhkan pula kepekaan dalam memahami permasalahan secara mendasar. Misalnya saja mengenai masalah agraria terdapat beberapa masalah yang cukup peka yaitu: *Pertama*, pemberian kepastian atas hak tanah di mana pada saat ini bukti yang dimiliki masyarakat atas tanah pada umumnya masih merupakan bukti hak tanah berdasarkan hukum Portugis; *Kedua*, belum adanya peraturan perundangan (pedoman) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan mengkonversikan hak-hak atas tanah sesuai dengan UUPA.

Selain daripada itu tugas dari aparaturnya pemerintah tidak saja menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan melainkan juga harus menjadi pimpinan masyarakat yang dituntut memberikan keteladanan bagi anggota masyarakat. Kiranya hal ini penting sekali mengingat sikap masyarakat yang baru saja bebas dari belenggu penjajahan akan sangat peka terhadap perlakuan dari orang-orang pendatang dari luar Propinsi Timor Timur. Tingkah laku beberapa oknum aparaturnya pemerintahan yang tercela akan merusak seluruh citra aparat pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu kiranya sangat wajar bila aparaturnya pemerintah yang ditugaskan ke Timor Timur mempunyai kualitas yang mampu memberikan keteladanan bagi anggota masyarakat.

Dari aspek kuantitatif jumlah aparaturnya pemerintah di Propinsi Timor Timur cukup memadai. Jumlah tersebut pada akhir tahun 1985 berjumlah 10.529 orang. Tetapi struktur/komposisi aparaturnya terlalu berat pada golongan I. Secara lebih terinci struktur tersebut adalah sebagai berikut: Golongan I 8.168 orang; Golongan II 2.180 orang; Golongan III 170 orang; Golongan IV 9 orang.

Dengan komposisi aparaturnya pemerintah daerah sebagaimana disebutkan di atas maka jalannya roda pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kemampuan aparaturnya pemerintah, Pemerintah Daerah Timor Timur mengirimkan pemuda-pemudinya untuk belajar di berbagai universitas di luar Timor Timur. Jumlah mereka sekitar 600 orang dan beberapa di antaranya sudah dapat menyelesaikan studinya dan kembali ke Timor Timur. Kebanyakan dari mereka adalah pegawai pemerintah daerah yang dianggap potensial untuk menyelesaikan studi di tingkat universitas. Selain daripada itu para pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Timor Timur diberi kesempatan pula menempuh kuliah di Universitas Terbuka.

PENUTUP

Setelah lebih kurang satu dasawarsa rakyat Timor Timur melaksanakan pembangunan, telah banyak hasil yang dicapai terutama dalam mempersiapkan pembangunan untuk tahap-tahap selanjutnya. Masalah-masalah yang dihadapi rakyat secara mendasar seperti kesehatan, pendidikan, sarana perhubungan, setahap demi setahap telah dapat dipecahkan. Khususnya pembangunan sarana perhubungan telah mampu menembus isolasi daerah-daerah yang semula samasekali tidak pernah dibayangkan sebelumnya terutama jalan tembus Lospalos-Iliomar-Uatukerbau serta Lospalos-Kom. Hal ini diharapkan agar dapat pula meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai selama ini bukan berarti tidak ada tantangan. Justru semakin banyak hasil yang dicapai semakin tampak kekurangan yang harus diselesaikan. Misalnya seperti tenaga guru yang belum mampu mengimbangi jumlah murid, beberapa daerah yang masih belum terjangkau oleh sarana perhubungan maupun masalah masih perlunya meningkatkan ketrampilan aparatur pemerintah. Khusus terhadap aparatur pemerintah yang bertugas di wilayah Propinsi Timor Timur kiranya dituntut pengabdian yang ekstra lebih besar dibandingkan di daerah-daerah lain. Karena kecuali sebagai aparat yang menyelenggarakan roda pemerintahan, aparat pemerintah di Timor Timur juga bertugas untuk menjalin hubungan sambung-rasa dengan rakyat secara lebih intensif. Hal ini dimaksudkan agar rakyat yang masih sederhana dapat direbut hatinya, dan dibangun sikapnya secara bertahap untuk menikmati alam kemerdekaan yang merupakan idaman setiap manusia. Oleh karena itu kiranya yang tidak kalah pentingnya adalah sikap dari seluruh lapisan pimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah Timor Timur terutama yang datang dari luar Timor Timur untuk memberikan keteladanan serta berkewajiban menularkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dengan demikian integrasi yang sudah berjalan satu dasawarsa dan sudah berhasil secara bertahap meningkatkan harkat dan martabat rakyat Timor Timur, untuk masa selanjutnya dapat menyatukan hati dan tekad untuk mencapai masyarakat yang makmur dan berkeadilan.

DAFTAR PENYALUR

MAJALAH ANALISA, THE INDONESIAN QUARTERLY DAN BUKU-BUKU TERBITAN CSIS:

BALI: *TB Sumber Mas Bali*, Jl. Sulawesi 113.

BANDUNG: *TB Alumni*, Jl. Ir. H. Juanda 54; *TB Gramedia*, Jl. Merdeka 43; *TB Mawar*, Jl. Bunga 64; *TB Sanggar Buku Bandung*, Jl. Ir. H. Juanda 52; *TB Balai Buku Angkasa*, Jl. Merdeka 6; *TB Djawa*, Jl. Braga 79; *TB Karya Nusantara*, Jl. Asia Afrika 94; *TB Pembimbing Masa*, Jl. Ganesha 10; *TB Pioneer*, Jl. Asia Afrika 78.

BEKASI: *TB Aneka Ilmu*, Pusat Pertokoan Bekasi (PPB) Blok A No. 8-9 dan Blok F No. 84-85, Pusat Pertokoan Kranji Blok IV No. 6; *TB Sari Ilmu*, PPB Blok II Lt. II/63; *T.B. Sumber Ilmu*, PPB Blok II Lt. II/80.

BOGOR: *TB Batu Tulis*, Jl. Suryakencana 173; *TB Filia*, Jl. Merdeka No. 7; *TB Modena*, Jl. Suryakencana 280; *TB Mutiara*, Jl. Siliwangi No. I-AA; *TB Pembimbing Masa*, Jl. Pajajaran 3E; *TB Wiasa*, Jl. Suryakencana 98; *TB Wisma Batik Indah*, Jl. Otto Iskandardinata 51; *TB Sartika*, Jl. Dewi Sartika; *Harum Sari Supermarket*, Jl. Pajajaran; *TB Elta*, Jl. Siliwangi 64; *Rahardja Agency*, Jl. Siliwangi 63(Blk).

IRIAN JAYA: *TB Gunung Agung*, Jl. Irian No. 5.

JAKARTA BARAT: *TB Ciptoning*, Tomang Plaza, Jl. Kyai Tapa; *TB Feminy*, Pertokoan Taman Cosmos, Blok B 27-28, Jalan Kedoya Raya, Pesing; *TB Istana Buku*, Jl. Kedoya Raya 27C; *TB Lista Minimart*, Sunrise Garden, Blok X/6; *TB Purnama*, Taman Harapan Indah, Blok AA I, Jl. Tubagus Angke, Jelambar; *TB Taruma Negara*, Universitas Taruma Negara, Jl. S. Parman 1, Grogol.

JAKARTA PUSAT: *TB Abdi Wacana*, Jl. Proklamasi 27; *BPK Gunung Mulia*, Jl. Kwitang 22; *TB Cosmos*, Jl. Biak 20 A-22; *TB Dessy*, Proyek Senen Blok I Lt. III; *TB Djembatan*, Jl. Kramat Raya 152; *Drugstore*, Hotel Sari Pacific, Jl. M.H. Thamrin; *TB Ghalia Indonesia*, Proyek Senen Blok I Lt. IV, No. 27-29; *TB Gramedia*, Jl. Gajah Mada 109 dan Jl. Pintu Air 72; *TB Gunung Agung*, Jl. Kwitang 6 dan Ratu Plaza, Jl. Jend. Sudirman; *TB Ichtiar*, Jl. Majapahit 6; *TB Indira*, Duta Merlin, Lt. II, Jl. Gajah Mada 3-5; *TB Kalman Media Pusaka*, Proyek Senen Blok I Lt. IV; *TB Merdeka Sarana*, Jl. Diponegoro; *TB Sari Agung*, Sarinah Lt. V, Jl. M.H. Thamrin; *TB Sastra Hudaya*, Jl. Proklamasi 61; *TB Tropen*, Jl. Pasar Baru 113.

JAKARTA SELATAN: *TB Adinda*, Jl. R.S. Fatmawati Kav. 77A, Cipete; *TB Bahagia*, Jl. Cisaronggiri 1 Los A II No. 13-17; *TB Buana Minggu*, Jl. Wolter Monginsidi 61, Kebayoran Baru; *TB Darlia*, Jl. Pasar Minggu 8; *TB Gramedia*, Jl. Melawai IV/13, Kebayoran Baru; *Newstand Gunung Agung*, Hotel Kartika Plaza, Jl. Jend. Sudirman; *TB Ichlas*, Jl. Panglima Polim Raya 86, Blok A, Kebayoran Baru; *Bursa Buku IIK*, Jl. Purnawarman 99, Kebayoran Baru; *NV Indoprom*, P.O. Box 2090 JKT; *TB Kakidian Mas*, Jl. Radio Dalam Raya 12, Kebayoran Baru; *PT Iswandi Lestari*, Gedung Arthaloka Lt. Dasar, Jl. Jend. Sudirman 2; *Newstand Sahid Jaya*, Jl. Jend. Sudirman; *TB Scientific Book Centre*, Jl. Melawai IV No. 165, B 7 Blok M, Kebayoran Baru; *TB Universitas Nasional*, Jl. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu; *TB Sedayu Store*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 2, Blok M, Kebayoran Baru.

JAKARTA TIMUR: *TB Angkasa*, Jl. Angkasa IC, Halim Perdanakusumah; *TB Bakti*, Komplek IKIP, Rawamangun; *Bursa Buku FISIP-UI*, Jl. Pemuda, Rawamangun; *TB Gramedia*, Jl. Matraman Raya 46-48; *Hilman Book Shop*, Komplek Pertokoan Pondok Bambu, Jl. Pahlawan Revolusi 3; *NV Indoprom Co.*, Jl. Cililitan Besar Ujung; *TB Jaya*, Pasar Sunan Giri Lt. I, Rawamangun; *TB Waringin*, Jl. Jatiwaringin,

Pondok Gede; *TB Utama*, Jl. Pahlawan Revolusi 22, Pondok Bambu; *TB Prima*, Jl. Pahlawan Revolusi 46, Klender.

JAKARTA UTARA: *TB Graffiti*, Jl. Kelapa Gading Boulevard Blok TN II No. 12A-14-15.

KEDIRI: *TB Budaya*, Jl. Dhoho 61.

MAGELANG: *TB Kedaulatan Rakyat*, Jl. Jend. A. Yani 9; *TB Santoso*, Jl. Pemuda 3.

MALANG: *TB Atoom*, Jl. H.A. Salim No. 6; *TB Gramedia*, Jl. Basuki Rachmat 3; *TB Palinglengkap*, Jl. Basuki Rachmat 22A.

MANADO: *TB President*, Komplek Pusat Pertokoan Lt. III, Jl. Piere Tendean; *CV Sanggalangi*, Jl. Tikala Baru 5.

MEDAN: *TB Deli*, Jl. Jend. A. Yani 48; *L.M. Sinaga Agency*, Jl. Krakatau Komplek DPRD Tkt. I Sumut 11.

PADANG: *TB Angrek*, Jl. Pasar Raya 15; *TB Pancuran Ilmu*, Jl. Hillgo 26.

PURWOKERTO: *Yayasan Al-Amin*, Jl. Palsraja 20.

RIAU: *TB Penyalur Berita*, Jl. Ir. H. Juanda 66.

SEMARANG: *TB Gramedia*, Jl. Pandanaran 116; *TB Merbabu*, Jl. Pandanaran 108-110; *TB Mickey Morse*, Jl. Depok 51.

SURABAYA: *TB Gramedia*, Jl. Basuki Rachmat 95; *TB Indira*, Jl. Tunjungan 71; *TB Karya Anda*, Jl. Prabon 55; *Kopma Universitas Surabaya*, Jl. Ngagel Jaya Selatan 169; *TB Sari Agung*, Jl. Tunjungan 5.

SURAKARTA: *TB Budhilaksana*, Jl. P. Diponegoro 16; *TB Lima Sekawan*, Jl. Slamet Riyadi 166; *TB Pikiran Rakyat*, Jl. Slamet Riyadi 222; *TB Sekawan*, Jl. Diponegoro 16.

TANJUNGPURBAN: *TB Alumni*, Jl. Kartini 22B; *TB Fajar Agung*, Jl. Kartini 45.

TASIKMALAYA: *TB Widyagraha*, Jl. Bojongkaum 61-63.

YOGYAKARTA: *TB Ba-Un*, Shopping Centre A 7-8; *TB Campuciana*, Jl. Panjaitan KM 1,5 (Depan Pondok Krapyak); *TB Gramedia*, Jl. Jend. Sudirman 54-56; *TB Indah*, Shopping Centre R 2-3; *TB Indira*, Jl. Jend. Sudirman 62; *TB Kedaulatan Rakyat*, Jl. P. Mangkubumi 42; *TB Sari Ilmu*, Jl. Malioboro 119-121; *TB Anda*, Shopping Centre P3; *TB Pembangunan*, Jl. P. Mangkubumi; *TB Taman Siswa*, Jl. Taman Siswa 6; *TPK Gunung Mulia*, Jl. Jend. Sudirman 69; *Kopma UGM*, Gelanggang Mahasiswa Pintu Barat Bulaksumur.

The Indonesian Quarterly



The Outstanding Journal on Indonesian Problems

- The journal for scholars, diplomats, and journalists on Indonesian problems and related issues.
- Keep you up-to-date
- Mostly by Indonesian writers
- Published since 1972 in January, April, July and October.

CSIS also publishes an Indonesian Journal ANALISA and books on socio-economic and international affairs:

- **Trends in Marketing,**
J. PANGLAYKIM.
- **Law in Indonesia,** *SOEBEKTI*
- **Golkar: Functional-Group Politics in Indonesia**
Julian M. BOILEAU
- **Pacific Economic Cooperation: The Next Phase,**
Hadi SOESASTRO and HAN Sung-joo (Eds.)



Centre for Strategic and International Studies
Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160.
Phone : 356532-35. Telex : 45164 CSIS IA.